



## **LAPORAN AKTUALISASI**

### **PEDOMAN *PROOFREADING*/PENYUNTINGAN PENGOLAHAN HASIL TRANSKRIP MENJADI RISALAH RAPAT SEMENTARA MENGUNAKAN FITUR *PROOFING* PADA *MICROSOFT WORD***

Disusun oleh:

Nama : Anisa Nur Nia Rahmah, S.I.P.

NIP : 19941025201902002

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

**PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN III  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA  
2019**



**LEMBAR PERSETUJUAN  
LAPORAN AKTUALISASI**

**Pedoman *Proofreading*/Penyuntingan dalam Pengolahan Hasil Transkrip  
menjadi Risalah Rapat Sementara Menggunakan Fitur *Proofing* pada  
*Microsoft Word***

**Disusun Oleh:**

Nama : Anisa Nur Nia Rahmah, S.I.P.  
NIP : 19941025 201903 2 002  
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Peserta Diklat,

Anisa Nur Nia Rahmah, S.I.P.

Menyetujui,

Mentor,

Dra. Mitra Anindyarina,  
NIP. 196202224199032001

Coach,

Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.  
NIP. 196804011988032003



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kami dapat menyusun rancangan aktualisasi ini.

Penyusunan rancangan aktualisasi ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dorongan, saran, dan nasihat dari semua pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam kepada:

1. Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M., Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
2. M. Dimyati Sudja, S.Sos., M.Si., Kepala Biro Persidangan I
3. Muhammad Yus Iqbal, S.E., Kepala Bagian Risalah.
4. Prof. Dr. Udjianto Singgih P, M.Si., penguji.
5. Dra. Mitra Anindiyarina, mentor.
6. Sulasi Rongiyati, S.H., M.H., *coach*.

Rancangan aktualisasi ini menjelaskan tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Penulis sebagai Perisalah Legislatif Ahli Pertama, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Rancangan Aktualisasi ini juga merupakan bagian dari internalisasi dan aktualisasi bentuk nyata dari nilai-nilai dasar profesi ASN yang berupa Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi serta Peran dan Kedudukan ASN. Penulis berharap rancangan aktualisasi ini dapat bermanfaat untuk pekerjaan dan sumbangan pengetahuan.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih dan semoga apa yang penulis tuliskan dalam rancangan aktualisasi ini bermanfaat bagi kita semua.

Bogor, 26 Agustus 2019

Anisa Nur Nia Rahmah

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I .....	5
A. Latar belakang .....	5
B. Dasar Hukum .....	7
BAB II .....	8
A. Visi Misi Unit Kerja .....	8
B. Struktur Organisasi .....	9
C. Penjelasan Tugas dan Fungsi .....	9
BAB III .....	13
A. Identifikasi Isu .....	13
B. Pemilihan Isu Prioritas .....	17
C. Gagasan Pemecahan Isu .....	19
D. Rancangan Aktualisasi .....	20
E. Tabel Perubahan Pelaksanaan Kegiatan .....	30
BAB IV .....	32
A. Penjelasan Pelaksanaan Aktualisasi .....	32
B. Stakeholder .....	48
C. Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala .....	48
D. Analisis Dampak .....	49
1. Hasil Inisiatif .....	49
2. Nilai Dasar Aneka .....	51
E. Jadwal Kegiatan .....	53
BAB V .....	54
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	57
LAMPIRAN .....	58



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Bangsa Indonesia terbentuk pada waktu yang sangat lama. Pada studi-studi pembentukan bangsa, tujuan/cita-cita menjadi penting untuk merangkai *puzzle* bagian-bagian yang berbeda. Begitu juga Indonesia yang memiliki tujuan/cita-cita bangsa salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut dalam perdamaian dunia. Hingga saat 74 tahun Indonesia merdeka masih sangat relevan cita-cita tersebut. Namun pada era ini tantangan dan semua kondisi mengalami banyak perubahan. Untuk itu dibutuhkan strategi yang berbeda.

Diprediksi pada beberapa tahun ke depan akan terjadi bonus demografi pada angkatan usia produktif. Hal tersebut bisa merupakan tantangan dan masalah. Untuk itu Indonesia seharusnya melakukan pengembangan dalam bidang SDM<sup>1</sup>. Pengembangan bidang SDM salah satunya dalam sektor negara sendiri pada manajemen SDM pada tubuh birokrasi di Indonesia sendiri.

Berdasarkan hal tersebut pelatihan dan pendidikan yang terintegrasi untuk ASN adalah keperluan untuk menjadi elemen negara untuk memperkuat sektor pelayanan publik. Hal tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk pada ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN, CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan reintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

---

<sup>1</sup> Kementerian PPN/Bappenas dan OECD. Siaran Pers: Bonus Demografi 2030-2040 Strategi Indonesia Terkait Ketenagakerjaan dan Pendidikan. Diakses dari [https://www.bappenas.go.id/files/9215/0397/6050/Siaran\\_Pers\\_-\\_Peer\\_Learning\\_and\\_Knowledge\\_Sharing\\_Workshop.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/9215/0397/6050/Siaran_Pers_-_Peer_Learning_and_Knowledge_Sharing_Workshop.pdf) pada tanggal 22 Agustus 2019 Pukul 10.59.

Dalam rangka pembangunan SDM pada ASN maka diperlukan habituasi yang membuat CPNS dapat terbiasa dan melakukan inovasi guna menunjang tugas dan fungsinya sebagai ASN. Berdasarkan hal tersebut itu maka dibuatlah suatu rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi yang dikerjakan harus mengandung nilai-nilai ANEKA, peran dan kedudukan ASN serta budaya organisasi, dalam hal ini budaya RAPI dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Penulis adalah seorang CPNS yang bertugas pada Bagian Risalah, Biro Persidangan I, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Untuk menginternalisasi nilai-nilai yang sudah disebut penulis melakukan observasi dan mencermati tugas dan fungsi sebagai Perisalah Legislatif Ahli Pertama. Salah satu tugas Perisalah Legislatif Pertama yang penting adalah melakukan penyusunan risalah.

Bagian risalah sendiri merupakan bagian yang baru ada secara formal di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Tugas penyusunan risalah haruslah dilakukan secara hati-hati . Hal tersebut karena menyangkut pesan dari seorang legislator/pejabat penting yang dalam isinya juga membicarakan hal penting. Di Inggris, yang serupa risalah legislatif disebut *Hansard*. *Hansard* yang berlaku dalam semua persemakmuran Inggris memiliki kaidah dalam penyusunan yang disebut *The Hansard Uniformity Guide*<sup>2</sup>.

Afrika Selatan adalah salah satu negara yang juga mematuhi kaidah *The Hansard Uniformity Guide*. Beberapa masalah berkaitan dalam penyusunan *Hansard* diantaranya tentang kesalahan tata bahasa, susunan kata, preposisi dan konjungsi, serta pengulangan dan penggunaan kata yang berlebihan<sup>3</sup>. Begitupun yang terjadi pada risalah

---

<sup>2</sup> Reinhardt, Trudy. 2000. *Hansard Translation: Problem and Issues In The Translation and Editing of Verbatim Reports of Parliamentary Proceedings*.  
<https://repository.nwu.ac.za/handle/10394/6587> diakses pada tanggal 22 Agustus 2019 Pukul 11.01 WIB hal. 50.

<sup>3</sup> Loc.cit., Hal. 53.



legislatif, editorial menjadi isu yang patut untuk diseriisi oleh semua pihak yang terkait.

Berkaitan dengan rangkaian pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi yang diinisiasi oleh LAN, maka disusunlah rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi yang akan disusun mengharuskan kita untuk mengidentifikasi tiga isu penting. Ketiga isu penting tersebut penulis lihat berdasarkan tugas dan fungsi, kondisi pada unit kerja dan kebutuhan pada unit kerja. Sehingga pada bab-bab selanjutnya akan ditunjukkan mengenai deskripsi tiga isu, analisis isu menggunakan teknik USG, rencana kegiatan untuk mencapai aktualisasi, dan beberapa penjelasan mengenai nilai-nilai dasar ASN serta peran dan kedudukan PNS di NKRI.

#### **B. Dasar Hukum**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018;
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil



## **BAB II PROFIL ORGANISASI**

### **A. Visi Misi Unit Kerja**

#### **Visi Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR RI**

“Terwujudnya dukungan persidangan Komisi dan Persidangan paripurna yang profesional dan akuntabel.”

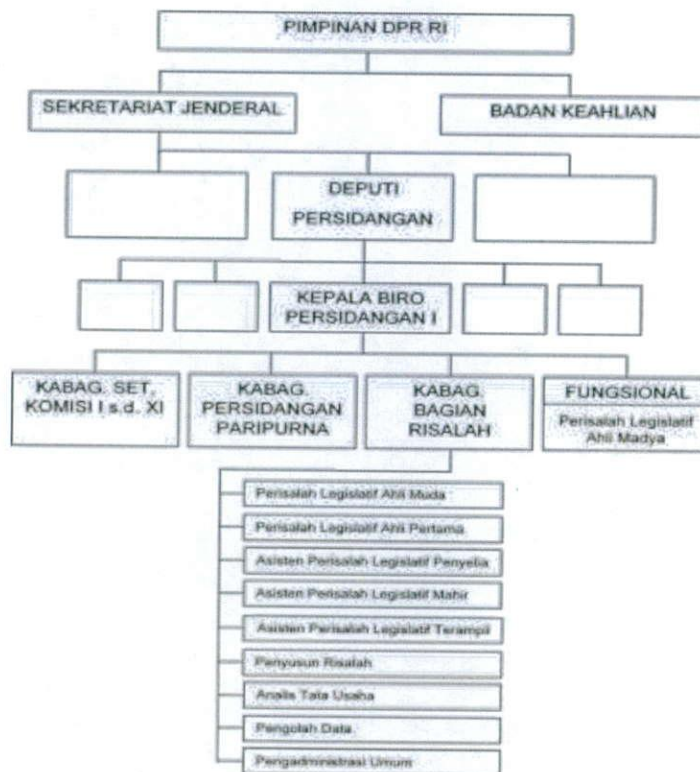
#### **Misi Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR RI:**

- a. Mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaan Fungsi DPR RI Bidang Legislasi, Bidang Anggaran dan Bidang Pengawasan.
- b. Mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaan Persidangan Paripurna.
- c. Mewujudkan kebijakan penyelenggaraan dukungan persidangan di Komisi dan Persidangan Paripurna.

#### **Tujuan Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR RI:**

- a. Meningkatkan dukungan rapat dan tata usaha pelaksanaan Fungsi DPR RI di Bidang Legislasi, Bidang Anggaran dan Bidang Pengawasan.
- b. Meningkatkan dukungan rapat dan tata usaha pelaksanaan Persidangan Paripurna.
- c. Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan persidangan di Komisi dan Persidangan Paripurna.

## B. Struktur Organisasi



## C. Penjelasan Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017, tugas Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif telah diatur dalam BAB IV Bagian Kesatu Pasal 5 yaitu melaksanakan kegiatan di bidang risalah legislatif, yang meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif. Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Pertama sesuai sebagai berikut:

- 1) mengoordinasikan kegiatan penyusunan risalah rapat sementara;
- 2) melakukan inventarisasi hasil transkrip, kelengkapan, dan bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara;

- 3) memeriksa hasil inventarisasi bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara;
- 4) mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa Indonesia, berdasarkan:
  - a) jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman
  - b) jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman
  - c) jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman
  - d) jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman
  - e) jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman
- 5) mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa asing, berdasarkan:
  - a) jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman
  - b) jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman
  - c) jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman
  - d) jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman
  - e) jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman
- 6) mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa daerah berdasarkan:
  - a) jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman
  - b) jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman
  - c) jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman
  - d) jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman
  - e) jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman
- 7) menelaah dan menyerahkan risalah rapat sementara kepada penyelenggara rapat untuk dikoreksi
- 8) melakukan perbaikan risalah rapat sementara terhadap hasil koreksi penyelenggara/peserta rapat untuk menjadi risalah rapat resmi
- 9) menyusun laporan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat resmi yang meliputi:
  - a) bulanan
  - b) triwulan
  - c) semester
  - d) tahunan
- 10) melakukan pengumpulan dokumen *softcopy* yang akan dijadikan sebagai e-risalah



- 11) menginventarisir dokumen *softcopy* yang akan dijadikan sebagai e-risalah
- 12) melakukan pembuatan e-risalah:
  - a) risalah rapat sementara
  - b) risalah rapat resmi
  - c) risalah rapat yang sudah divalidasi
  - d) catatan rapat
  - e) laporan singkat
  - f) himpunan risalah rapat
- 13) menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan e-risalah yang meliputi:
  - a) bulanan
  - b) triwulan
  - c) semester
  - d) tahunan
- 14) menelaah kumpulan dokumen *softcopy e-risalah*
- 15) menginventarisir dokumen *softcopy e-risalah*
- 16) membuat sistem database informasi risalah
- 17) melakukan pemasukkan e-risalah kedalam database sistem informasi risalah:
  - a) risalah rapat sementara
  - b) risalah rapat resmi
  - c) risalah rapat yang sudah divalidasi
  - d) catatan rapat
  - e) laporan singkat
  - f) himpunan risalah rapat
- 18) menyusun laporan pelaksanaan tugas pemuktahiran database risalah yang meliputi:
  - a) bulanan
  - b) triwulan
  - c) semester
  - d) tahunan
- 19) melakukan pengumpulan e-risalah yang akan dipublikasikan
- 20) menginventarisir e-risalah yang akan dipublikasi
- 21) menelaah dan meminta persetujuan e-risalah yang akan dipublikasikan;

22) melakukan publikasi dalam jaringan intranet/internet:

- a) risalah rapat sementara
- b) risalah rapat resmi
- c) risalah rapat yang sudah divalidasi
- d) catatan rapat
- e) laporan singkat
- f) himpunan risalah rapat

23) menyusun laporan pelaksanaan tugas publikasi e-risalah dalam jaringan intranet/internet yang meliputi:

- a) bulanan
- b) triwulan
- c) semester
- d) tahunan



### **BAB III**

#### **RANCANGAN AKTUALISASI**

##### **A. Identifikasi Isu**

**Isu pertama :**

Belum tersedianya pedoman *proofreading*/penyuntingan dalam pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara.

**Penyebab :**

1. Belum adanya juknis tentang pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara.
2. Belum teridentifikasinya teknologi pendukung dalam *proofreading*/penyuntingan pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara.
3. Masing-masing perisalah legislatif memiliki standar pengolahan risalah rapat yang berbeda-beda.
4. Pendidikan dan pelatihan khusus untuk Bidang Risalah belum dilakukan sehingga belum adanya kognisi/pemahaman yang seragam berkaitan dengan *proofreading*/risalah rapat.

##### **Kondisi Saat Ini:**

Transkrip yang diberikan kepada Perisalah Legislatif Ahli Pertama masih belum sempurna. Ketidaksempurnaan itu penulis lihat dari penggunaan tanda baca yang tidak pada tempatnya, masih adanya penyingkatan kata, masih adanya kata yang salah pada pengetikan. Dalam naskah yang siap untuk digunakan seperti risalah rapat resmi, diperlukan suatu proses yang disebut *proofreading*. *Proofreading* dilakukan untuk mencegah kesalahan dalam penyusunan risalah. Pada hakikatnya *proofreading* adalah merapikan naskah agar mudah dipahami pembaca. Naskah akhir/risalah haruslah sempurna. Pada proses

*proofreading* hal yang menjadi fokus utama adalah pemberian tanda baca, ejaan, dan kejelasan ekspresi<sup>4</sup>.

#### **Kondisi yang diharapkan:**

Kondisi yang diharapkan dari isu diatas adalah adanya pedoman *proofreading*/penyuntingan dalam pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara dengan menggunakan fitur *proofing* pada aplikasi *Microsoft Word*. Hal tersebut membuat risalah rapat sementara lebih tersempurnakan dari segi pemberian tanda baca, ejaan, dan kejelasan ekspresi.

#### **Dampak:**

Masalah tersebut cukup mendesak untuk segera ditemukan solusinya. Apabila tidak segera ditemukan maka akan terus berulangnya kesalahan tanda baca, ejaan dan kejelasan ekspresi. Sementara risalah rapat adalah dokumen yang penting bagi akuntabilitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut berdampak pada mutu risalah rapat sementara yang rendah. Dampak yang lain jika mutu risalah rapat yang rendah adalah kredibilitas dan citra DPR RI.

#### **Dukungan teoritik dari mata pelatihan terkait:**

Proyek habituasi ini membantu kita dalam memahami tentang agenda pembelajaran ketiga yaitu pelayanan publik. Risalah rapat pada dasarnya adalah dokumen yang disediakan untuk masyarakat luas. Dalam pelayanan publik, layanan yang diberikan haruslah berorientasi pada pelayanan yang prima dalam hal ini dari segi mutu dan kredibilitas. Proyek habituasi ini merupakan bagian dari usaha untuk memberikan layanan publik yang baik.

---

<sup>4</sup> Scoot, Mary dan Joan Turner. 3 Oktober 2008. *Problematising Proofreading*. Zeitschrift Schreiben. Diakses pada [www.zeitschrift-schreiben.eu](http://www.zeitschrift-schreiben.eu) pada 20 Juli 2019 pukul 14.00 WIB.



**Isu kedua:**

Belum adanya bukti tertulis dalam penyusunan risalah dari transkrip menjadi risalah rapat sementara.

**Masalah :**

Dalam melakukan pengolahan risalah rapat sementara masih tidak adanya bukti tertulis yang konkret dalam proses pengolahan transkrip menjadi risalah rapat sementara.

**Penyebab :**

Bukti proses pengolahan risalah rapat sementara memang belum pernah atau tidak ada kewajiban untuk menyertakannya.

**Kondisi yang diharapkan:**

bukti berupa dokumen tentang proses tersebut ada dan menjadi *monitoring* untuk seberapa jauh Perisalah Legislatif Ahli Pertama melakukan perubahan/pengolahan dari transkrip menjadi dokumen risalah rapat sementara.

**Dampak :**

Bukti mengenai proses pengolahan risalah rapat ini jika tidak dilakukan tidak memiliki dampak yang signifikan. Karena bukti tersebut akan digunakan jika terjadi kasus yang mana hal tersebut jarang terjadi. Namun hal lain yang akan terjadi susahnya *me-monitoring* kinerja PL berkaitan dengan seberapa besar ia melakukan kekeliruan pada penyusunan risalah rapat sementara.

**Dukungan teoritik dari mata pelatihan terkait:**

Dari isu kedua ini maka mata pelatihan yang terkait adalah soal manajemen ASN. Hal tersebut dikarenakan bukti pengerjaan proses risalah merupakan salah satu dari konsep manajemen ASN yang menitikberatkan pada *monitoring* kinerja.

**Isu ketiga:**

belum tersedianya sistem keamanan dokumen risalah rapat sementara.

**Masalah:**

Konsep Risalah rapat sementara yang belum ditandatangani oleh Pimpinan Rapat ketika bocor atau adanya penyuntingan yang tidak memiliki otoritas dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan data dan informasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

**Penyebab:**

Belum adanya pengaturan pengamanan terhadap dokumen risalah rapat sementara, yang belum sempurna.

**Kondisi yang diharapkan:**

Adanya pengamanan yang sederhana untuk dokumen risalah rapat sementara berupa penguncian pada aplikasi *Microsoft Word* sehingga tidak bisa dilakukan penyuntingan dan penyuntingan lebih lanjut selain orang yang memiliki otoritas dalam melakukan pengelolaan penyuntingan dalam hal ini perisalah legislatif ahli pertama/terkait.

**Dampak:**

Jika pengamanan ini tidak dilakukan maka akan terjadi kerawanan data berupa penyuntingan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab.

**Dukungan teoritik dari mata pelatihan terkait:**

Pada isu ketiga ini mata pelatihan yang terkait adalah tentang manajemen ASN. Isu ketiga yang menekankan pada pengaman data dan informasi di Bagian Risalah ini berkaitan dengan aspek kode etik bahwa ASN yang baik adalah mampu menjaga rahasia jabatan dan juga senantiasa memberikan informasi yang benar.



## B. Pemilihan Isu Prioritas

NO	ISU	U	S	G	TOTAL
1.	Belum tersedianya pedoman proofreading/penyuntingan dalam pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara dengan menggunakan fitur proofing, Microsoft Word.	5	5	4	14
2.	Belum adanya bukti tertulis dalam penyusunan risalah dari transkrip menjadi risalah rapat sementara.	3	3	4	10
3.	Belum tersedianya sistem keamanan dokumen risalah rapat sementara.	4	4	4	12

Tabel 1. Teknik Analisis USG

Keterangan : (skor antara 1 – 5)

Perhitungan atau analisa menggunakan skala likert:

- 1 : sangat kecil / rendah pengaruhnya.
- 5 : sangat besar / tinggi pengaruhnya.
- U : seberapa mendesak suatu isu harus dibahas dan ditindak lanjuti.
- S : seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dampaknya.
- G : seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tidak ditangani.

Dari penilaian tersebut, dapat dijelaskan bahwa:

1. Isu pertama : Belum tersedianya pedoman *proofreading*/penyuntingan dalam pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara.

✓ **Urgency** jika *proofreading*/penyuntingan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara tidak dikerjakan dengan efektif dan efisien maka akan berimbas pada lamanya waktu pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara. Dikarenakan lamanya waktu pengerjaan tersebut maka akan memperpanjang waktu penyerahan risalah rapat kepada komisi terkait, sementara risalah di negara-negara lain seperti Inggris, Irlandia, Australia memiliki waktu maksimal risalah siap digunakan kurang lebih 2-3 jam dari sejak rapat dilaksanakan. Tentunya tidak efektif dan efisien pada pengerjaan tersebut akan terjadi penumpukan pekerjaan.

✓ **Seriousness** *Proofreading*/penyuntingan yang kurang efektif dan efisien akan terjadi masalah serius yaitu masalah tersebut akan mengakibatkan banyak kesalahan eja, kesalahan tanda baca dan



ketidakjelasan ekspresi. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi mutu dari risalah rapat itu sendiri.

✓ **Growth** Risalah rapat merupakan salah satu mekanisme akuntabilitas yang penting bagi DPR RI. Sangat krusialnya risalah rapat maka jika terdapat kesalahan eja, pemberian tanda baca dan ketidakjelasan ekspresi yang dapat mempengaruhi mutu risalah maka akan pula berpotensi menurunkan citra dan kredibilitas DPR RI.

2. Isu kedua : Belum adanya bukti tertulis dalam penyusunan risalah dari transkrip menjadi risalah rapat sementara.

✓ **Urgency**, pada isu ini bukti tertulis dalam penyusunan risalah tidak terlalu mendesak untuk dilakukan. Sejauh ini bagian risalah masih berfokus pada masalah penyuntingan.

✓ **Seriousness**, isu kedua ini memang memiliki tingkat keseriusan yang relatif. Kerelatifitasannya dapat dilihat bahwa bukti penyusunan risalah ini digunakan pada hal-hal tertentu ketika terjadi kasus yang membutuhkan seberapa jauh risalah ditambah atau dikurangi katanya. Terlebih isu kedua ini tidak masuk pada sasaran kinerja pegawai.

✓ **Growth**, bukti penyusunan risalah rapat ini bukan merupakan tugas utama perisalah legislatif ahli pertama. Sehingga jika tidak dilakukan tidak akan ada peningkatan masalah yang muncul. Hanya saja pada saat-saat tertentu akan dibutuhkan bukti penyusunan risalah legislatif.

3. Isu ketiga : Belum tersedianya sistem keamanan dokumen risalah rapat sementara.

✓ **Urgency**, sistem keamanan dokumen risalah rapat sementara sangat mendesak untuk dilakukan. Namun pembangunan sistem keamanan ini akan melibatkan banyak sumberdaya dan pihak. Pembangunan sistem ini memerlukan waktu dan anggaran tertentu.

- ✓ **Seriousness**, isu sistem keamanan dokumen merupakan isu yang serius namun sebetulnya pembuatan sistem keamanan dokumen ini bukan merupakan tugas dan fungsi perisalah legislatif ahli pertama terlebih lagi pembuatan sistem keamanan ini sangatlah kompleks.
- ✓ **Growth**, Jika sistem keamanan dokumen tidak ada maka akan terjadi kerawanan data. Namun kerawanan dokumen pun akan tetap terjadi baik dalam sistem yang aman sekalipun. Sehingga titik pentingnya adalah bagaimana membuat pegawai lebih berintegritas dan menciptakan sistem integritas dalam lingkungan kerja.

Dari isu-isu yang dianalisis menggunakan teknis analisis USG maka dapat ditarik isu yang akan diangkat adalah tentang belum tersedianya *proofreading*/penyuntingan dalam pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara.

### **C. Gagasan Pemecahan Isu**

Terdapat pedoman *proofreading*/penyuntingan dalam pengolahan hasil transkrip menjadi risalah sementara menggunakan fitur *proofing* pada aplikasi *Microsoft Word*. Penggunaan fitur *proofing* dalam *Microsoft Word* dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada pengolahan hasil transkrip menjadi risalah sementara.



#### D. Rancangan Aktualisasi

- Unit Kerja** : Bagian Risalah Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
- Identifikasi Isu** : a. Belum tersedianya pedoman *proofreading*/penyuntingan pada pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara.  
b. Belum adanya bukti tertulis dalam penyusunan risalah dari transkrip menjadi risalah rapat sementara.  
c. Belum tersedianya sistem keamanan dokumen risalah rapat sementara.
- Isu yang diangkat** : Belum tersedianya pedoman *proofreading*/penyuntingan pada pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara menggunakan fitur proofing Microsoft Word.
- Gagasan Pemecahan Isu** : Penggunaan fitur *proofing* pada aplikasi *Microsoft Word* dalam efektifitas dan efisiensi pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Mencari referensi tentang kaidah <i>proofreading</i> /penyuntingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengumpulkan referensi atau data yang berkaitan dengan kaidah <i>proofreading</i>/penyuntingan risalah legislatif.</li> <li>- Menyusun literatur review tentang kaidah <i>proofreading</i>/penyuntingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Refrensi</li> <li>- Literatur Review</li> </ul>	Nilai Dasar PNS: - <b>Komitmen Mutu</b> (Berorientasi Mutu) Mengumpulkan referensi mengenai kaidah merupakan usaha untuk mengejar mutu yang baik. Karena di dalamnya ada upaya menelaah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencarian referensi kaidah ilmiah ini sangat mendukung visi Biro Persidangan I yaitu Terwujudnya dukungan persidangan Komisi da Persidangan paripurna yang profesional dan akuntabel.</li> <li>- Kegiatan literatur review</li> </ul>	<b>Profesional</b> (penyusunan referensi merupakan upaya yang bersifat profesional tidak serampangan dalam menjalankan

				<p>mana yang tepat perihal kaidah <i>proofreading</i></p> <p><b>- Nasionalisme</b> (Menghargai Karya orang lain) Penyusunan literatur review tentu saja ada aktivitas stasi dalam kaidah-kaidah ilmiah hal itu untuk menghindari plagiarisme sehingga dapat dikatakan sebagai penghargaan terhadap karya orang lain.</p> <p><b>- Etika publik</b> (disiplin) kedisiplinan dalam dalam sitasi dapat menjauhkan dari kasus plagiarisme.</p> <p><b>- Anti Korupsi (integritas dan kejujuran)</b> Dimensi tersebut dapat ditelisik pada kegiatan perisalah pada pencarian data. Pencarian data tersebut meneguhkan</p>	<p>mendukung misi organisasi yaitu mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaan fungsi DPR RI bidang legislasi, bidang anggaran dan bidang pengawasan.</p>	<p>kaidah ilmiah) <b>Integritas</b> Dalam menjalankan nilai profesional maka diperlukan integritas dalam konteks menjalankan prinsip pada pekerjaan yang melekat. Bahwa contohnya kaidah untuk melakukan sesuatu terdepan tata aturan yang harus dipatuhi.</p>
--	--	--	--	--	--	--

				<p>prinsip bahwa dalam melakukan sebuah penelitian harus sesuai dengan kaidah. Tidak boleh asal dalam mengerjakan sebuah pekerjaan.</p> <p><b>Peran dan Kedudukan:</b>  <b>Manajemen ASN</b>          ASN memiliki kode etik dalam melaksanakan tugasnya dengan cemat dan disiplin. Proses menelaah sesuatu adalah bentuk nyata dari kode etik ASN.</p>		
2	Diskusi terarah dengan <i>coach</i> dan mentor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjadwalan waktu diskusi.</li> <li>- Koordinasi tentang kaidah proofreading/penyuntingan dan rencana kegiatan selanjutnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jadwal koordinasi</li> <li>- Laporan singkat mengenai diskusi terarah dengan mentor atau atasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Akuntabilitas (Kejelasan Target, dan Transparan)</b></li> <li>- Penyusunan jadwal yang rapi akan menghasilkan keteraturan karena jika tidak ada penjadwalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh rangkaian kegiatan ini mendukung visi organisasi yaitu terwujudnya dukungan persidangan Komisi dan Persidangan Paripurna yang profesional dan akuntabel</li> <li>- Penyusunan laporan</li> </ul>	<p><b>Akuntabel</b>          Kegiatan koordinasi kegiatan penyusunan risalah rapat menunjukan adanya transparansi dalam proses tersebut</p>



				<p>maka akan dimungkinkan terjadi banyak kendala pertemuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Komitmen mutu (berorientasi pada mutu)</b> Kegiatan diskusi terarah dengan mentor berorientasi mutu menuju kegiatan tiga yaitu melakukan simulasi.</li> </ul> <p><b>Peran dan Kedudukan :</b> <b>Whole of Government</b> Hal tersebut dikarenakan adanya koordinasi dan kerja sama antara peserta, mentor ataupun coach.</p>	<p>mengenai diskusi terarah juga mendukung misi organisasi yaitu dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaan persidangan</p>	
3	<p>Mencari referensi dan melakukan instalasi fitur <i>proofing</i> dalam</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencari informasi mengenai fitur <i>proofing</i> dalam <i>Microsoft Word</i></li> <li>- Membuat laporan yang berisi seputar instalasi <i>proofing</i> pada <i>Microsoft</i></li> </ul>	<p>Adanya dokumentasi tentang aktifitas pencarian informasi</p>	<p><b>Nilai Dasar PNS:</b> - <b>Komitmen Mutu (Berorientasi Mutu)</b> Mengumpulkan referensi mengenai kaidah merupakah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencarian referensi kaidah ilmiah ini sangat mendukung visi Biro Persidangan I yaitu Terwujudnya dukungan persidangan Komisi da</li> </ul>	<p><b>Profesional</b> Penyusunan referensi dan instalasi merupakan upaya yang</p>

Microsoft Word pada komputer kerja.	Word	<p>mengenai fitur <i>proofing</i>.</p> <p>- Laporan singkat singkat instalasi <i>proofing</i> pada <i>Microsoft Word</i></p>	<p>usaha untuk mengejar mutu yang baik. Karena didalamnya ada upaya menelaah mana yang tepat perihal kaidah <i>proofreading</i></p> <p>- <b>Nasionalisme</b> (Menghargai Karya orang lain) Penyusunan literatur <i>review</i> tentu saja ada aktivitas stasi dalam kaidah-kaidah ilmiah hal itu untuk menghindari plagiarisme sehingga dapat dikatakan sebagai penghargaan terhadap karya orang lain.</p> <p>- <b>Etika publik</b> (disiplin) kedisiplinan dalam dalam sitasi dapat menjauhkan dari kasus plagiarisme.</p> <p><b>Peran dan Kedudukan: Manajemen ASN</b> ASN memiliki kode etik</p>	<p>Persidangan paripurna yang profesional dan akuntabel.</p> <p>- Kegiatan literatur review mendukung misi organisasi yaitu mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaan fungsi DPR RI bidang legislasi, bidang anggaran dan bidang pengawasan.</p>	bersifat profesional tidak serampangan dalam menjalankan kaidah ilmiah.
-------------------------------------	------	--	--	---	---

				dalam melaksanakan tugasnya dengan cemat dan disiplin. Proses menelaah sesuatu adalah bentuk nyata dari kode etik ASN.		
4	Melakukan simulasi proofreading/ penyuntingan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara dengan menggunakan fitur proofing pada Microsoft Word.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan proofreading/ penyuntingan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara dengan menggunakan fitur proofing pada Microsoft Word.</li> <li>- Membandingkan antara pengolahan risalah rapat sementara dengan proofing microsofy word dengan pengolahan tanpa fitur proofing.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil risalah rapat sementara dengan proofing</li> <li>- Laporan singkat perbandingan risalah tanpa fitur proofing dengan risalah menggunakan fitur proofing.</li> </ul>	<p>Nilai dasar ASN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Akuntabilitas (Kejelasan Target)</b> Kegiatan ini mencerminkan kejelasan target karena harus menyiratkan perbedaan hasil transkrip menggunakan metode rancangan aktualisasi saya dengan tidak memakai aktualisasi saya.</li> <li>- <b>Komitmen Mutu (berorientasi mutu)</b> Kegiatan simulasi ini memang sangat mencerminkan orientasi terhadap mutu karena adanya percobaan pada metode.</li> </ul> <p><b>Peran dan Kedudukan :</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan simulasi ini adalah bagian dari pendukung terhadap visi Biro Persidangan I yaitu Terwujudnya dukungan persidangan Komisi dan Persidangan paripurna yang profesional dan akuntabel.</li> <li>- Sedangkan pendukung misi organisasi yaitu mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaan fungsi DPR RI bidang legislasi, bidang anggaran dan bidang pengawasan.</li> </ul>	<b>Profesional dan integritas</b> Kegiatan simulasi ini sangat tercermin budaya organisasi utamanya pada profesional dan integritas. Profesional artinya adanya akumulasi pengetahuan yang dipakai untuk menuju sebuah simulasi sedangkan integritas dalam kegiatan ini adalah adanya komitmen untuk menghasilkan



				<b>Whole of Government</b> Hal tersebut dikarenakan adanya koordinasi dan kerja sama antara peserta, mentor ataupun coach.		sesuatu yang berdampak positif bagi unit kerja dan organisasi.
5	Menyusun Pedoman Proofreading/ Penyuntingan dalam Pengolahan Hasil Transkrip menjadi Risalah Rapat Sementara.	- Menyusun Pedoman Proofreading/ Penyuntingan.	- Draft pedoman Proofreading/ Penyuntingan	Nilai Dasar PNS: - <b>Akuntabilitas (tanggung jawab, kejelasan target, keterbukaan)</b> Penyusunan pedoman proofreading menyiratkan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu dari tanggung jawab dari pekerjaan, pada sisi lain bahwa pedoman ini nantinya diharapkan dapat memperjelas	- Seluruh rangkaian kegiatan ini mendukung visi organisasi yaitu terwujudnya dukungan persidangan Komisi dan Persidangan Paripurna yang profesional dan akuntabel - Penyusunan pedoman ini mendukung misi organisasi yaitu dukungan rapat dan	<b>Akuntabilitas</b> - akuntabilitas menjadi aspek penting dalam hal ini. Karena pedoman adalah salah satu bagian dari mekanisme akuntabilitas itu sendiri. <b>Integritas</b> - Penyusunan pedoman ini dapat memiliki

				<p>penyusunan risalah hal tersebut berarti ada kejelasan target. Sedangkan pedoman sendiri juga merupakan salah satu contoh dari adanya keterbukaan.</p> <p><b>- Etika publik (disiplin)</b> Penyusunan pedoman adalah upaya mendisiplinkan cara kerja.</p> <p><b>- Komitmen mutu (efektif, efisien, inovasi dan orientasi mutu)</b> Peran dan Kedudukan: <b>Pelayanan Publik</b> Tersedianya panduan berupa pedoman ini kemudian memperjelas pelayanan terhadap alat kerja dewan sebagai user dari pemakai risalah, dan masyarakat pada umumnya.</p>	tata usaha dalam pelaksanaan persidangan	sisi integritas bahwa pedoman merupakan prinsip/kaidah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.
6	Membuat infografis tentang tata	Pembuatan infografis yang berisi tentang tata cara	- Adanya infografis ini akan	<p>Nilai Dasar PNS:</p> <p><b>- Akuntabilitas (tanggung jawab,</b></p>	- Seluruh rangkaian kegiatan ini mendukung visi	<b>Akuntabilitas</b> akuntabilitas menjadi aspek

	<p>cara proofreading/ penyuntingan yang efektif dan efisien berdasarkan fitur <i>proofing</i> pada <i>Microsoft Word</i></p>	<p>proofreading/penyuntingan dengan memanfaatkan fitur <i>proofing</i> pada <i>Microsoft Word</i></p>	<p>berguna untuk mengetahui dan memahami tata cara proofreading/penyuntingan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan fitur <i>proofing</i> pada <i>Microsoft Word</i>.</p>	<p><b>kejelasan target, keterbukaan)</b>            Penyusunan infografis ini bagian dari tanggung jawab dari pekerjaan, pada sisi lain bahwa infografis ini nantinya diharapkan dapat memperjelas penyusunan risalah hal tersebut berarti ada kejelasan target. Sedangkan infografis sendiri juga bisa dijadikan salah satu contoh dari adanya keterbukaan.</p> <p><b>- Etika publik ( disiplin)</b>            Penyusunan infografis ini adalah upaya berkomunikasi dalam bekerja untuk menampilkan informasi yang sederhana dan dimengerti.</p> <p>Peran dan Kedudukan: <b>Pelayanan Publik</b>            Tersedianya panduan berupa pedoman ini</p>	<p>organisasi yaitu terwujudnya dukungan persidangan Komisi dan Persidangan Paripurna yang profesional dan akuntabel</p> <p>- Penyusunan infografis ini mendukung misi organisasi yaitu dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaan persidangan</p>	<p>penting dalam hal ini. Karena infografis adalah salah satu bagian dari mekanisme akuntabilitas itu sendiri.</p>
--	--	---	---	--	---	--



				kemudian memperjelas pelayanan terhadap alat kerja dewan sebagai user dari pemakai risalah, dan masyarakat pada umumnya.		
--	--	--	--	--	--	--

**E. Tabel Perubahan Pelaksanaan Kegiatan**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Tahapan Pelaksanaan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Bukti Fisik</b>
1	Mencari referensi tentang kaidah <i>proofreading</i> /penyuntingan	1.1 Mengumpulkan referensi atau data yang berkaitan dengan kaidah <i>proofreading</i> /penyuntingan risalah legislatif	29,30 Agustus 2019	Foto
		1.2 menyusun literatur <i>review</i> tentang kaidah <i>proofreading</i> /penyuntingan	30 Agustus 2019	Dokumen <i>review</i> literatur
2	Diskusi terarah dengan <i>coach</i> dan mentor	2.1 Penjadwalan waktu diskusi	3 September 2019	Diskusi Verbal dan melalui aplikasi whatsapp.
		2.2 Koordinasi tentang kaidah <i>proofreading</i> /penyuntingan dan rencana kegiatan selanjutnya.	6 September 2019	Foto dan Catatan Singkat
3	Mencari referensi dan melakukan instalasi fitur <i>proofing</i> Microsoft Word pada komputer kerja	3.1 Mencari informasi mengenai fitur <i>proofing</i> , <i>microsoft word</i>	6 September 2019	Foto, daftar informasi mengenai <i>proofing</i>
		3.2 Membuat laporan yang berisi seputar instalasi <i>proofing</i> pada <i>microsoft word</i> .	10, 11 September 2019	Laporan
4	Melakukan simulasi <i>proofreading</i> /penyuntingan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara dengan menggunakan fitur <i>proofing</i> pada <i>Microsoft Word</i> .	4.1 Menggali data mengenai penggunaan fitur <i>proofing</i> pada komputer kerja pada rekan kerja sesama Perisalah Legislatif Ahli Pertama	18-19 September 2019	Dokumen
		4.2 Melakukan <i>Prooreading</i> /Penyuntingan Hasil Transkrip Menjadi Risalah Rapat Sementara dengan Menggunakan Fitur <i>Proofing</i> pada Microsoft Word	20-22 September 2019	Dokumen dan Video
5	Menyusun pedoman <i>proofreading</i> /peny	5.1 menyusun pedoman <i>proofreading</i> /penyuntingan.	24-25 September 2019	Draf pedoman

	untingan dalam pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara			
6	Membuat info grafis tentang tata cara <i>proofreading</i> /penyuntingan yang efektif dan efisien berdasarkan fitur <i>proofing</i> pada <i>Microsoft Word</i>	6.1 Pembuatan info grafis yang berisi tentang tata cara <i>proofreading</i> /penyuntingan dengan memanfaatkan fitur <i>proofing</i> pada <i>Microsoft Word</i> .	30 September -4 Oktober 2019	Draf pedoman berbentuk info grafis



## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN AKTUALISASI**

#### **A. Penjelasan Pelaksanaan Aktualisasi**

##### **1. Mencari Referensi tentang Kaidah *Proofreading*/Penyuntingan**

Kegiatan pertama yang dilakukan oleh penulis adalah mencari referensi tentang kaidah *proofreading*/penyuntingan untuk risalah rapat sementara. Dalam kegiatan ini terdapat dua cabang kegiatan yaitu mengumpulkan referensi atau data yang berkaitan dengan kaidah *proofreading*/penyuntingan risalah rapat sementara. Yang kedua, adalah menyusun literatur *review* tentang kaidah *proofreading*/penyuntingan.

##### **1.1. Mengumpulkan Referensi atau Data yang Berkaitan dengan Kaidah *Proofreading*/Penyuntingan Risalah Rapat Sementara.**

Dalam tahapan kegiatan ini penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan kaidah penyuntingan risalah rapat sementara. Kaidah ini setelah berdiskusi dengan mentor dan *coach* penulis mencoba menelaah Pedoman Umum Tata Naskah Resmi dan Surat Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Republik Indonesia. Selain itu penulis mendatangi perpustakaan dan mencari secara *online* via internet. Yang kemudian penulis menemukan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Mengumpulkan Referensi	Mengumpulkan Referensi
	
Mengumpulkan referensi	
	

## 1.2. Menyusun Literatur *Review* tentang Kaidah Proofreading/Penyuntingan

Dalam kegiatan ini penulis memiliki kesimpulan bahwa penyuntingan dalam tahap risalah rapat sementara memiliki sedikit perbedaan atau limitasi dibanding penyuntingan pada karya ilmiah atau naskah resmi lain. Penyuntingan pada risalah rapat sementara memiliki beberapa batasan penyuntingan yaitu terletak pada penyuntingan ejaan, tanda baca, pemenggalan paragraf dan kejelasan ekspresi. Keempat hal tersebut didapat setelah mengadakan diskusi dengan beberapa senior dalam

Bagian Risalah dan kemudian melihat berbagai referensi yang terkait. Selain itu menurut penulis keempat hal tersebut menjadi penting dalam proses penyuntingan risalah rapat sementara untuk membedakan dengan hasil transkrip. Terdapat pada lampiran kegiatan 1.

### **1.3.Keterkaitan dengan Mata Pelatihan**

Tahapan kegiatan pertama ini, terdapat keterkaitan dengan substansi dengan mata pelatihan nilai dasar PNS serta peran dan kedudukan ASN yang terelaborasi dalam paparan berikut ini:

#### **a. Nilai Dasar PNS**

##### **- Komitmen Mutu**

Tahapan kegiatan pengumpulan referensi atau data mengenai kaidah *proofreading*/penyuntingan risalah rapat sementara, komitmen mutu menjadi hal yang dominan dalam kegiatan ini. Hal tersebut dikarenakan risalah rapat sementara merupakan output yang penting dalam jenjang jabatan Perisalah Legislatif Ahli Pertama. Sehingga output yang memiliki kualitas mutu yang baik dapat ditempuh dengan didasarkan oleh proses penelaahan jika boleh disebut sebagai proses penelitian terhadap kaidah yang mencakup apa-apa saja yang dapat disunting maupun yang tidak boleh disunting pada produk risalah rapat sementara.

##### **- Nasionalisme**

Dalam melakukan penelusuran referensi atau data dalam kaidah penyuntingan risalah rapat sementara penulis menyajikan apa-apa saja yang penulis dapat dalam satu laporan literatur *review*. Penulis berkomitmen



untuk menyajikan sitasi yang pas untuk kegiatan tersebut. Penyajian sitasi yang tepat adalah bentuk menghargai karya orang lain yang mana itu merupakan salah satu unsur dari nasionalisme.

- Etika Publik

Pengumpulan referensi atau data pada kaidah *proofreading*/penyuntingan dengan memperhatikan sitasi dapat menunjukkan bahwa terkandung nilai etika publik di dalamnya. Jika kita tidak mencantumkan sitasi dalam pengumpulan referensi atau data dalam penelitian apapun hal itu sudah termasuk plagiasi dapat dikenai sanksi.

- Anti Korupsi

Salah satu elemen penting dari anti-korupsi adalah tentang bagaimana menciptakan mekanisme akuntabilitas. Dalam kegiatan ini sudah jelas sekali bahwa ketika akan berargumen atau menetapkan kaidah disertai dengan *evidence* yang tepat dan akurat adalah salah satu bentuk akuntabilitas yang mendukung nilai anti-korupsi.

b. Peran dan Kedudukan ASN

- Manajemen ASN

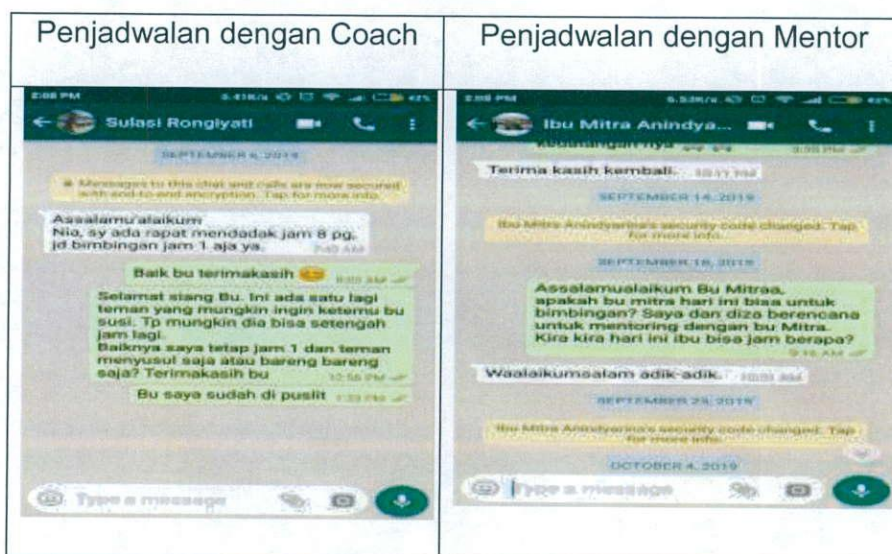
Tahapan kegiatan ini sarat dengan unsur manajemen ASN bahwa dalam melakukan tupoksinya disertai dengan *evidence* yang tepat. Seperti kegiatan pengumpulan data ini menjadikan kegiatan penyusunan pedoman untuk penyuntingan ini tersedia *evidence* yang tepat dan tidak serampangan.

## 2. Diskusi Terarah dengan *Coach* dan Mentor

Diskusi terarah dengan *coach* dan mentor menjadi salah satu elemen penting dalam aktualisasi ini. Pengerjaan aktualisasi ini semata-mata bukan hanya kerja individu namun meliputi kerja tim secara keseluruhan baik peserta, *coach* dan mentor. Diskusi dilakukan dengan tujuan untuk menyatukan persepsi, konsultasi dan kemudian memonitor perkembangan peserta. Hal ini penting dilakukan untuk agar peserta tidak keluar dari jalur yang ada pada proses aktualisasi. Dalam kegiatan ini terdapat dua kegiatan yaitu penjadwalan waktu diskusi dan koordinasi tentang kaidah *profreading*/penyuntingan dan rencana kegiatan atau tahapan selanjutnya.

### 2.1. Penjadwalan Waktu Diskusi

Kegiatan penjadwalan waktu diskusi terhadap mentor dan *coach* dilakukan baik secara lisan maupun melalui aplikasi *WhatsApp*. Hal ini dilakukan untuk menyepakati ketersediaan waktu kedua belah pihak sehingga dapat ditemukan waktu dan kondisi yang pas.





## 2.2. Koordinasi Tentang Kaidah *Proofreading*/Penyuntingan Dan Rencana Kegiatan Selanjutnya.

Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan berkelompok. Penulis mengawali dengan apa yang sudah penulis kerjakan selama seminggu setelah proses diklatsar dilakukan. Penulis menjelaskan temuan penulis mengenai apa yang penulis temukan tentang kaidah *proofreading*/penyuntingan. Dalam diskusi dengan *coach* dan mentor penulis memberi informasi bahwasanya terdapat sedikit perubahan seperti elemen yang tercakup dalam penyuntingan dengan menggunakan fitur *proofing* hanya mencakup 2 hal saja yaitu perbaikan kesalahan eja dan tanda baca. Sehingga dalam proses ini baik mentor dan *coach* sudah menyetujui mengenai fokus pada kegiatan aktualisasi penulis hanyalah berfokus pada kesalahan eja dan pemberian tanda baca menggunakan fitur *proofing*.

Diskusi dengan Mentor	Diskusi dengan Coach
	

## 2.3. Keterkaitan dengan Mata Pelatihan

Tahapan kegiatan kedua ditemukan beberapa keterkaitan dengan substansi dengan mata pelatihan nilai dasar PNS serta peran dan kedudukan ASN meliputi:



a. Nilai Dasar PNS

- Akuntabilitas

Kegiatan ini menurut penulis sangat terkait dengan akuntabilitas. Bahwa proses diskusi terarah merupakan salah satu dari *monitoring* progres pelaksanaan aktualisasi yang dilakukan penulis. *Monitoring* merupakan salah satu aspek yang berkaitan dengan akuntabilitas.

- Komitmen Mutu

Dalam melakukan komitmen mutu, *check* dan *recheck* dilakukan dengan salah satunya mengadakan diskusi dengan *coach* dan mentor sehingga pemahaman yang penulis dapatkan bukan atas dasar pemahaman yang pribadi dan sempit. Masukan dari pihak eksternal penulis mutlak diperlukan demi kualitas mutu yang baik.

b. Peran dan Kedudukan ASN

- *Whole of Government*

Dalam kegiatan ini menurut penulis syarat dengan nilai *whole of government* dimana ada interaksi yang dapat berupa kerja sama dalam kegiatan aktualisasi ini antara mentor, *coach* dan teman satu kelompok dalam *coach* untuk menyepakati secara bersama kapan akan dilakukan *coaching* dalam satu waktu.

**3. Mencari Referensi Dan Melakukan Instalasi Fitur *Proofing* Microsoft Word Pada Komputer Kerja**

Tahapan kegiatan pencarian referensi dan melakukan instalasi fitur *proofing* pada *microsoft word* pada komputer kerja dilakukan

dengan dua tahapan kegiatan: pertama, mencari kegiatan informasi mengenai fitur *proofing*, *microsoft word*; kedua, pembuatan laporan yang berisi seputar pada instalasi fitur *proofing* pada *microsoft word*.

### 3.1. Mencari Informasi Mengenai Fitur *Proofing*, Microsoft Word

Pencarian informasi mengenai fitur *proofing* pada *Microsoft Word* dilakukan dengan melalui penelusuran internet dan pada laman resmi Microsoft yaitu <https://support.office.com>. Selain itu juga penulis menggunakan sumber dari *youtube* dan kanal lain yang relevan.

Cara Instalasi Proofing dapat dilihat pada:

1. <https://medium.com/@dataq/pengecekan-ejaan-bahasa-indonesia-menggunakan-microsoft-word-2016-3e5ed26220ca>
2. <https://www.howtogeek.com/220333/how-to-use-the-proofing-panel-in-word/>
3. [https://www.researchgate.net/profile/Donna\\_Bain\\_Butler/publication/283260130\\_Strategies\\_for\\_Clarity\\_in\\_L2\\_Legal\\_Writing/links/562f817208aea5dba8d37351/Strategies-for-Clarity-in-L2-Legal-Writing.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Donna_Bain_Butler/publication/283260130_Strategies_for_Clarity_in_L2_Legal_Writing/links/562f817208aea5dba8d37351/Strategies-for-Clarity-in-L2-Legal-Writing.pdf)
4. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889490609000490>
5. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=dXNoAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA213&dq=Clarity+of+expression+in+proofreading+IN+HANSARD&ots=yph7sV54uJ&sig=p\\_XjHRIu1d\\_uj\\_WAqymAJbk4&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=dXNoAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA213&dq=Clarity+of+expression+in+proofreading+IN+HANSARD&ots=yph7sV54uJ&sig=p_XjHRIu1d_uj_WAqymAJbk4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

### 3.2. Membuat Laporan yang Berisi Seputar Instalasi *Proofing* pada Microsoft Word.

Setelah melakukan penelusuran terhadap informasi mengenai fitur *proofing*, penulis juga kemudian membuat laporan mengenai instalasi *proofing*. Fitur *proofing* ini tidak kemudian serta-merta terpasang pada perangkat kerja – *microsoft word*-, sehingga diperlukan instalasi tersendiri. Dalam melakukan praktik instalasi penulis melakukan proses instalasi pada perangkat kerja penulis yang menggunakan tipe *microsoft*



*office* 2013. Selain itu penulis juga melakukan instalasi kepada komputer milik rekan kerja sesama jabatan yaitu Ines Adhitya Pambudi, Diza Nabila Mirza, Oki Rusera, R.A. Hunna Karina Koesmarini dan Titiek Endartini. Selebihnya setelah dilakukan pengamatan bahwa tidak semuanya menggunakan *office* 2010 bahkan masih terdapat yang menggunakan *office* 2007 yang notabene tidak bisa dipasang fitur *proofing*. Langkah-langkah dalam melakukan instalasi ini akan dilampirkan pada lampiran kegiatan tahapan 3.



### 3.3. Keterkaitan dengan Mata Pelatihan

Dalam kegiatan ketiga ini terdapat keterkaitan substansi dengan mata pelatihan nilai dasar PNS serta peran dan kedudukan ASN diantaranya:

#### a. Nilai Dasar PNS

- Komitmen Mutu

Kegiatan ketiga ini hampir sama dengan kegiatan pertama. Sehingga unsur komitmen mutu merupakan hal yang dominan dalam hal ini. Fitur *proofing* adalah salah



satu fitur penunjang yang efektif dalam mendeteksi kesalahan eja dan tanda baca.

- Nasionalisme

Pencarian sumber untuk instalasi ini dilakukan dengan cara yang legal dengan melakukan pengunduhan pada situs resmi *microsoft*. Bukan melalui situs ilegal. Hal tersebut berarti kita sebagai warga negara yang baik menghargai hak kekayaan intelektual orang/perusahaan. Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku merupakan salah satu elemen dari nasionalisme.

- Etika Publik

Kegiatan ketiga ini juga sarat dengan dimensi etika publik. Dimana penulis dalam mencari alat yang efektif digunakan pada penyuntingan risalah rapat sementara menggunakan alat yang memang sudah ada dan penulis tidak mengambil klaim bohong atas temuan tersebut.

b. Peran dan Kedudukan ASN

- Manajemen ASN

Dalam kegiatan ini, sarat dengan unsur manajemen ASN yang berarti setiap tupoksi harus memiliki *evidence*. Selain itu kegiatan ini menyiratkan akan daya kreativitas ASN dalam pemecahan solusi terhadap hambatan yang dihadapi dalam pekerjaan sehari-hari.

**4. Melakukan Simulasi *Proofreading*/Penyuntingan Hasil Transkrip Menjadi Risalah Rapat Sementara dengan Menggunakan Fitur *Proofing* pada Microsoft Word**

Pada tahapan kegiatan ini terdapat beberapa kegiatan diantaranya:

#### **4.1. Menggali data mengenai penggunaan fitur proofing pada komputer kerja pada rekan kerja sesama Perisalah Legislatif Ahli Pertama**

Penulis melakukan penggalian data dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis. Terdapat 7 pertanyaan yang diajukan oleh penulis seputar pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara dan seputar fitur *proofing* yang ada pada *microsoft word*. Penulis melakukan penggalian data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada 5 orang CPNS Perisalah Legislatif Ahli Pertama.

Dari kelima orang tersebut maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu: terdapat beberapa kendala dalam pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara salah satunya adanya kesalahan eja atau typo, disamping dengan beberapa aspek lain seperti tata format dalam risalah rapat sementara. Selain itu penggunaan *proofing* belum *familiar* digunakan oleh CPNS Perisalah Legislatif Ahli Pertama. Terdapat lima lampiran dari penggalian data tertulis pada CPNS Perisalah Legislatif Pertama yaitu lampiran tahapan kegiatan 3.

#### **4.2. Melakukan *Prooreading*/Penyuntingan Hasil Transkrip Menjadi Risalah Rapat Sementara dengan Menggunakan Fitur *Proofing* pada Microsoft Word**

Dalam melakukan *proofreading*/penyuntingan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara penulis melakukan 2 langkah yang sedikit berbeda. Pertama penulis mencoba untuk meminta risalah rapat yang sudah dikerjakan oleh Perisalah Legislatif Ahli Pertama yaitu risalah rapat sementara milik Hijriatul Mabruk pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi

V DPR RI dengan BNPP, BPWS dan BMKG pada 4 September 2019. Dalam risalah rapat sementara itu masih ditemukan kesalahan eja. Saudara Hijriatul Mabruk belum menggunakan *proofing* pada Microsoft Office pada komputer kerjanya. Kedua, penulis mendapat *file* hasil transkrip dari saudara Inez Adhitya Pambudi yang belum dijadikan risalah pada Rapat Kerja Gabungan Komisi IX satu kaset dengan 8 halaman. Dari situ ditemukan setidaknya kurang lebih 133 kesalahan. Terdapat dua lampiran risalah rapat sementara dan analisa dari kedua lampiran tahapan kegiatan 4.

#### 4.3. Keterkaitan dengan Mata Pelatihan

Kegiatan ini memiliki keterkaitan dengan substansi mata pelatihan nilai dasar PNS serta peran dan kedudukan ASN yaitu:

##### a. Nilai Dasar PNS

###### - Akuntabilitas

Proses penentuan bahwa pengolahan risalah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara dengan menggunakan fitur *proofing* secara efektif ataupun efisien dibuktikan dengan menyimulasikan penggunaan fitur *proofing* ini dengan teman dalam satu rumpun jabatan yang sama. Hal ini termasuk dari akuntabilitas, bahwa klaim efektif dan efisien bukan merupakan klaim pribadi penulis melainkan sudah dibuktikan.

###### - Komitmen Mutu

Guna menuju risalah rapat sementara yang minim salah eja dan tanda baca penulis mencoba melakukan simulasi dengan penginstalan *proofing* agar dapat digunakan oleh



teman sejawat dan tingkat jabatan yang sama yaitu perisalah legislatif ahli pertama. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu yang mana ini merupakan bagian komitmen mutu.

b. Peran dan Kedudukan ASN

- *Whole of Government*

*Whole of government* memiliki dimensi salah satunya kerja sama dan penyamaan persepsi atau tujuan. Kegiatan pada tahap ini memiliki sifat kerja sama meskipun hanya lingkup pada satu rumpun jabatan. Tetapi *whole of government* salah satunya berupaya menyelesaikan sebuah permasalahan dengan efektif melalui sinergi yang di dapat dari kerja sama.

**5. Menyusun Pedoman *Proofreading*/Penyuntingan Dalam Pengolahan Hasil Transkrip Menjadi Risalah Rapat Sementara**

Tahapan kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk memperjelas apa-apa saja yang sudah penulis lakukan pada kegiatan pertama hingga ke-empat. Sehingga kegiatan ini lebih merupakan pada kegiatan penjas/output yang penulis hasilkan pada kegiatan aktualisasi 30 hari kerja. Pada tahap ini terdapat hanya satu kegiatan yaitu menyusun pedoman *proofreading*/penyuntingan.

Penyusunan pedoman *proofreading*/penyuntingan pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara menggunakan fitur *proofing* Ms. Word dilakukan dengan mengidentifikasi tiga hal yang berhubungan dengan output kegiatan pertama dan kegiatan ketiga. Tiga tersebut diantaranya adalah menjelaskan penyuntingan apa saja yang ada pada tahap pembuatan risalah rapat sementara, langkah-langkah instalasi *proofing*, penggunaan fitur *proofing* untuk

penyuntingan pada risalah rapat sementara. Terdapat output berupa pedoman pada lampiran tahapan kegiatan 5.

### **5.1.Keterkaitan dengan Mata Pelatihan**

#### **a. Nilai Dasar PNS**

##### **- Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan penyusunan pedoman kaidah penyuntingan. Pedoman ini dilakukan untuk memperjelas apa-apa saja yang harus dilakukan saat melakukan kegiatan penyuntingan risalah rapat sementara. Sehingga dalam melakukan penyusunan risalah rapat sementara terdapat *guidance* yang jelas.

##### **- Etika Publik**

Risalah rapat sementara yang nantinya akan menjadi risalah resmi merupakan dokumen yang sifatnya akan digunakan oleh masyarakat luas. Sehingga dalam melakukan penyusunan risalah rapat sementara harus diatur agar tidak terdapat kesalahan ketika sudah akan diakses oleh publik.

##### **- Komitmen Mutu**

Dokumen risalah legislatif merupakan dokumen yang akan diakses pada publik. Sehingga kegiatan 5 ini sangat mendukung apa yang dinamakan komitmen mutu dan menjaga kualitas mutu dari risalah legislatif dengan salah satunya menjaga mutu risalah rapat sementara melalui pedoman penyuntingan risalah rapat sementara.

#### **b. Peran dan Kedudukan ASN**



- Pelayanan Publik

Kegiatan ini berhubungan dengan pelayanan publik dikarenakan dokumen yang dihasilkan adalah dokumen yang bersifat publik meskipun terdapat risalah rapat tertutup tetapi risalah rapat merupakan salah hak yang dimiliki oleh publik untuk diakses dalam sebaik-baiknya dalam segi kualitas dan aksesibilitas. Sehingga demi melakukan pelayanan publik yang berkualitas tata aturan yang berupa pedoman merupakan salah satu elemennya.

**6. Membuat Info grafis tentang Tata Cara *Proofreading*/Penyuntingan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Fitur *Proofing* pada *Microsoft Word***

Hasil dari tahapan ini yaitu info grafis adalah merupakan output yang dihasilkan pada kegiatan aktualisasi ini. Info grafis ini memuat tentang kaidah *proofreading*/penyuntingan risalah rapat sementara, instalasi dan penggunaan fitur *proofing* pada microsoft word.

**6.1.Pembuatan Infografis Yang Berisi Tentang Tata Cara *Proofreading*/Penyuntingan Dengan Memanfaatkan Fitur *Proofing* Pada *Microsoft Word*.**

Pembuatan infografis ini dibuat dengan memanfaatkan fitur yang ada dalam internet yaitu fitur canva pada <https://www.canva.com>. Kegiatan ini relatif tidak memakan waktu namun penulis harus lebih jeli untuk menyeleksi informasi yang tepat agar pengguna mengerti dengan mudah infografis yang penulis buat. Terdapat lampiran berupa info grafis pada lampiran tahapan kegiatan 6.





Gambar 6.1

## 6.2.Keterkaitan Dengan Mata Pelatihan

### a. Nilai Dasar PNS

#### - Akuntabilitas

Infografis tentang kaidah *proofreading*/penyuntingan risalah rapat sementara dengan menggunakan fitur *proofing* menurut penulis merupakan salah satu bentuk dari akuntabilitas dari semua tahapan kegiatan aktualisasi yang dikerjakan. Dalam konteks penyusunan risalah rapat sementara infografis ini akan berguna sebagai *reminder* bagaimana melakukan penyuntingan dengan efektif.

#### - Etika Publik

Info grafis ini menyajikan sesuatu informasi mengenai kaidah yang penting dalam proses pembuatan risalah legislatif. Dalam penyuntingan tidaklah etis jika dilakukan tanpa ada dasar pengetahuan yang jelas dan baik. Pengetahuan yang jelas dan baik ini turut menyumbang hal kualitas mutu risalah rapat. Hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai bentuk dari etika publik.

#### b. Peran dan Kedudukan

##### - Pelayanan Publik

Dalam kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari produk pelayanan publik. Sekali lagi penulis tekankan bahwa risalah legislatif adalah merupakan produk pelayanan publik yang harus dikawal mutu dan kualitasnya dari semenjak pembuatan transkrip, pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara sampai kemudian otentifikasi dan validasi risalah rapat.

#### B. Stakeholder

*Stakeholder* terkait dalam pelaksanaan aktualisasi ini maka pihak yang terlibat adalah Asisten Perisalah Legislatif, Perisalah Legislatif Ahli Pertama.

#### C. Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala

No	Kendala	Strategi
1	Terbatasnya referensi tentang tata cara <i>proofreading</i> /penyuntingan risalah rapat di Indonesia. Mengingat naskah Risalah Rapat Legislatif memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan naskah populer yang lain.	<ol style="list-style-type: none"><li>Melakukan penelusuran referensi dengan melihat bentuk risalah rapat di negara lain seperti Inggris dengan <i>Hansard</i>, Amerika Serikat dengan <i>Congressional Report</i>.</li><li>Menelusuri jurnal penelitian yang berkait dengan <i>Hansard/Congressional Report</i>.</li></ol>
2	Kendalanya terdapat pada tahapan kegiatan 4 yaitu untuk menentukan transkrip mana yang akan digunakan, ataukah risalah rapat sementara yang sudah ada namun dilihat kembali untuk menentukan bahwa jika menggunakan metode pelacakan secara baca <i>scanning</i> masih terdapat kesalahan.	<ol style="list-style-type: none"><li>Melakukan diskusi dengan <i>coach</i> dan mentor tentang sebaiknya apa yang diambil. Argumen utamanya hanya menunjukkan bahwa metode <i>proofing</i> ini membantu dalam pelacakan kesalahan eja</li></ol>

		dalam hasil transkrip dan juga mendapat saran kata yang tepat dari microsoft word.
3	Belum dimilikinya pengetahuan yang memadai tentang pembuatan info grafis yang menarik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menelusuri cara pembuatan info grafis yang informatif dan menarik melalui internet.</li> <li>b. Menggali informasi kepada pakar tentang info grafis.</li> </ul>

## D. Analisis Dampak

### 1. Hasil Inisiatif

Pada analisis dampak bagian hasil inisiatif penulis membaginya ke dalam tiga bagian dampak yaitu dampak secara individu, unit atau organisasi. Pertama, dampak secara individu hasil inisiatif dengan pedoman penyuntingan risalah rapat sementara menggunakan fitur *proofing* ini membuat penulis lebih jelas mengetahui mengenai kesalahan eja. Penulis dapat mempercepat waktu untuk mengerjakan penyuntingan risalah pada bagian penyuntingan lain. Selain memperjelas kesalahan eja, penggunaan *proofing* pada pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara membuat risalah rapat sementara menjadi lebih akurat dibandingkan risalah rapat sementara tanpa menggunakan fitur *proofing*. Keakuratan tersebut tentu juga perlu didukung dengan kognisi/pengetahuan yang baik mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan pengetahuan mengenai frasa bahasa asing yang dapat dicek pada situs *merriam webster* atau kamus pada google.

Kedua, dampak pada unit –Bagian Risalah- yaitu tersedianya risalah rapat sementara yang akurat pada tataran ejaan. Seringkali ejaan membuat pembaca tidak dapat



menangkap makna dalam kalimat yang ada pada risalah legislatif. Sehingga keterbacaan/*readability* dalam hal ini ejaan menjadi harus diperhatikan. Berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 26 Tahun 2017, Perisalah Legislatif Ahli Pertama bertugas untuk menyusun risalah rapat sementara, sementara jabatan Perisalah Legislatif Muda menelaah kembali risalah rapat sementara. Penelaahan oleh Perisalah Legislatif Muda akan sangat terbantu jika risalah rapat sementara secara ejaan telah sesuai sehingga akan mempercepat kinerja Perisalah Legislatif Muda untuk membuat risalah resmi. Potensi digunakannya fitur *proofing* pada penyusunan risalah rapat sementara secara praktis akan membuat kinerja pembuatan risalah rapat sementara akan lebih akurat dan cepat sehingga dapat diteruskan dengan lebih cepat di jenjang pengecekan selanjutnya.

Ketiga, analisis dampak hasil inisiatif penulis pada organisasi –Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI- tersedianya risalah rapat yang akurat pada ejaan. Seperti yang telah diutarakan pada paragraf sebelumnya, *readability* menjadi komponen yang penting dari sebuah risalah rapat bagi pengguna risalah rapat yaitu publik secara luas. Ketika *readability* dari sebuah risalah rapat baik maka potensi untuk misinterpretasi akan semakin minim. Hal tersebut berarti Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dianggap telah mampu menyajikan dokumen yang akurat. Posisi risalah rapat itu sendiri adalah posisi yang menurut penulis sangat signifikan bagi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI pada umumnya, dan bagi DPR pada khususnya. Penulis memandang bahwa risalah rapat merupakan salah satu bentuk akuntabilitas tentang progres kinerja dewan. Sehingga jika dapat men-*deliver* risalah rapat secara akurat maka hal tersebut menjadi salah satu indikator

bahwa DPR dan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI berkomitmen atas akuntabilitas kinerja DPR.

## **2. Nilai Dasar Aneka**

### **➤ Akuntabilitas**

Dampak dari nilai akuntabilitas jika tidak diterapkan dalam program aktualisasi penulis adalah tidak terkontrolnya tahapan kegiatan yang dikerjakan oleh penulis. Tidak adanya kontrol dalam tahapan aktualisasi yang dilakukan penulis akan berimplikasi pada program yang tidak sempurna. Sedangkan jika terdapat akuntabilitas, akan terdapat juga proses *monitoring*/penilaian terhadap tahapan yang dikerjakan. *Monitoring* tersebut akan dapat mengidentifikasi kurang sempurnanya program untuk dapat disempurnakan sehingga program berjalan dengan baik.

### **➤ Nasionalisme**

Ketiadaan unsur nilai nasionalisme dalam program aktualisasi ini akan membuat program ini hanya dilakukan sebatas formalitas. Sehingga tidak dapat semaksimal mungkin mengerjakan program ini. Nasionalisme, penulis terjemahkan dengan motivasi untuk bekerja secara sungguh-sungguh untuk negara. Oleh karena itu pembuatan program aktualisasi yang tidak didasari untuk orientasi rakyat, bangsa dan negara akan menghasilkan program yang tidak bermanfaat.

### **➤ Etika Publik**

Program aktualisasi ini jika tidak dijalankan dengan nilai etika publik maka sebagai seorang CPNS yang baru akan tidak mendapatkan penerimaan yang baik dari lingkungan. Beberapa dimensi tentang etika publik yaitu tentang



kedisiplinan, kesopanan dan hormat terhadap rekan kerja. Jika dimensi-dimensi tersebut juga tidak ada dalam melakukan aktualisasi bukan tidak mungkin aktualisasi terhambat atau bahkan mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut misalnya saja dalam program penggalian informasi mengenai risalah rapat sementara akan tidak tergambar dengan jelas bagaimana yang sebenarnya dan akan berakibat pada sia-sianya rancangan aktualisasi yang telah disusun.

➤ **Komitmen Mutu**

Komitmen mutu merupakan sebuah gagasan yang diberikan individu atau kelompok untuk menciptakan sebuah *output* yang efektif, efisien, dan inovasi. Pedoman *proofreading*/penyuntingan risalah rapat sementara adalah merupakan bagian dari inovasi yang dapat mendatangkan manfaat untuk bagian risalah. Selain itu risalah rapat sementara yang telah disunting dengan aplikasi *proofing* dapat menciptakan *outcome* kepada perisalah legislatif muda yang juga menggunakan risalah rapat sementara untuk sebagai lanjutan dari tugas dan fungsinya. Sehingga jika tidak dilakukan maka tidak akan muncul outcome dan komitmen mutu yang dapat membantu pihak yang memerlukan.

➤ **Anti Korupsi**

Satu hal yang penting dalam komponen anti-korupsi adalah integritas. Integritas menjadi hal penting bagi jabatan perisalah legislatif. Perisalah legislatif memiliki potensi tinggi dalam penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang yang dimaksud adalah ketika terjadi suatu peristiwa yang membuat ia harus mengurangi atau menambahkan suatu kata pada risalah rapat. Risalah rapat



memiliki dimensi politis yang sangat sensitif. Sehingga integritas menjadi salah satu formula yang harus dimiliki oleh jabatan perisalah legislatif.

Jika aktualisasi ini tidak dilakukan berdasarkan nilai anti korupsi maka akuntabilitas, kedisiplinan dan tanggung jawabnya tidak akan terpenuhi. Sehingga membuat penulis sebagai ASN tidak profesional dalam bekerja.

#### E. Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Agustus		September				Oktober
		III	IV	I	II	III	IV	I
1	Mencari referensi tentang kaidah <i>proofreading</i> /penyuntingan.							
2	Diskusi terarah dengan <i>coach</i> dan mentor							
3	Mencari referensi dan melakukan instalasi fitur <i>proofing</i> dalam <i>microsoft word</i> pada komputer kerja.							
4	Melakukan simulasi <i>proofreading</i> /penyuntingan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara dengan menggunakan fitur <i>proofing</i> pada <i>Microsoft word</i> .							
5	Menyusun pedoman <i>proofreading</i> /penyuntingan dalam pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara							
6	Membuat infografis tentang tata cara <i>proofreading</i> /penyuntingan yang efektif dan efisien berdasarkan fitur <i>proofing</i> pada <i>Microsoft Word</i>							

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Tugas pokok dari seorang Perisalah Legislatif Ahli Pertama salah satunya adalah mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara sesuai dengan Permen PAN-RB No 26 Tahun 2017. Seiring berjalannya waktu penulis menemukan sedikit kendala yaitu belum akuratnya hasil risalah rapat sementara seperti adanya kalimat tidak utuh/typo, tanda baca yang tidak tepat. Untuk itulah penulis merasa diperlukan suatu alat yang dapat digunakan secara mudah dan dapat diakses dalam membantu kinerja Perisalah Legislatif Ahli Pertama dalam menyusun risalah rapat sementara.

Kemudian akhirnya penulis berinisiatif untuk membuat program aktualisasi yang berjudul pedoman *proofreading*/penyuntingan pada pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara menggunakan fitur *proofing* pada microsoft Word. Setelah 30 hari kerja aktualisasi penulis mendapati bahwa fitur *proofing* dapat sekali digunakan untuk menyunting risalah rapat sementara.

Sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya bahwa dalam program aktualisasi ini setidaknya terdiri dari 6 tahapan kegiatan. Dari masing-masing kegiatan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Tahapan pertama mencari referensi tentang kaidah *proofreading*/penyuntingan untuk risalah rapat sementara. Dari kegiatan tersebut terdapat nilai dasar PNS seperti komitmen mutu, nasionalisme, etika publik, anti korupsi dan manajemen ASN. Sedangkan pada tahapan kegiatan dua yaitu diskusi terarah dengan *coach* dan mentor terdapat beberapa nilai dasar PNS yaitu



akuntabilitas, komitmen mutu. Sementara peran dan kedudukan ASN pada tahapan kedua ini adalah *whole of government*,

Pada tahapan kegiatan ketiga yaitu mencari referensi dan melakukan instalasi fitur *proofing microsoft word* pada komputer kerja, terdapat nilai dasar PNS yaitu komitmen mutu, nasionalisme, etika publik. Sementara peran dan kedudukan ASN terdapat manajemen ASN. Pada tahapan kegiatan keempat, melakukan simulasi *proofreading/penyuntingan* hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara dengan menggunakan fitur *proofing* pada *microsoft word* terdapat nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, komitmen mutu. Peran dan kedudukan ASN yang ada pada tahapan ini adalah *Whole of Government*.

Tahapan kelima adalah menyusun pedoman *proofreading/penyuntingan* dalam pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara dengan nilai dasar PNS sebagai berikut akuntabilitas, etika publik dan komitmen mutu. Sementara peran dan kedudukan ASN yang ada adalah pelayanan publik. Tahapan yang keenam yang merupakan terakhir adalah membuat info grafis tata cara *proofreading/penyuntingan* yang efektif dan efisien dengan menggunakan fitur *proofing*, Microsoft Word yang memiliki nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, etika publik. Sementara untuk peran dan kedudukan ASN yaitu pelayanan publik.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan terdapat beberapa saran yang penulis akan sampaikan di subbab ini. Saran yang penulis maksud dibagi menjadi dua yaitu untuk penyelenggara dan instansi/unit kerja.

Saran yang dapat penulis berikan untuk penyelenggara latsar adalah dari segi penulisan laporan lebih diperjelas kembali mengenai



konten dari laporan aktualisasi. Konten yang jelas akan memudahkan para peserta untuk melakukan penulisan laporan. Misalnya saja pada laporan rancangan aktualisasi terdapat kendala dan strategi mengatasi kendala. Tetapi kemudian juga ada pada laporan aktualisasi. Menurut penulis bagian kendala dan strategi mengatasi kendala lebih tepat diberikan pada laporan aktualisasi saja dibandingkan pada laporan rancangan aktualisasi. Sementara itu, pokok pikiran dari setiap subbab belum tergambar jelas akan dibawa seperti apa. Sehingga penting untuk memperjelas pokok pikiran dari setiap subbab dikarenakan laporan aktualisasi ini berbeda dengan laporan penelitian yang lain. Jika terdapat *speciality* hendaknya diperjelas.

Sedangkan pada instansi atau unit kerja menurut penulis, program aktualisasi penulis akan sangat signifikan manfaatnya kepada unit kerja secara langsung dan instansi secara tidak langsung. Berdasarkan pengamatan yang penulis telah lakukan, fitur *proofing* yang pada dasarnya dapat membantu kinerja pembuatan risalah rapat sementara oleh Perisalah Legislatif Pertama. Namun ditemukan beberapa hal yang kemudian berpotensi menghambat penggunaan fitur *proofing* secara maksimal yaitu belum semua komputer kerja di bagian risalah *microsoft office*-nya kompatibel dengan fitur *proofing*. Fitur *proofing* hanya dapat digunakan pada *office* 2010, 2013, 2016 dan seterusnya. Sementara yang rata-rata komputer yang terdapat di Bagian Risalah masih ada yang menggunakan *microsoft office* 2007. Meskipun sudah ada yang menggunakan *microsoft office* 2016 juga belum dilakukan pemasangan fitur *proofing*. Sehingga saran yang dapat penulis berikan untuk unit kerja yaitu Bagian Risalah adalah dilakukannya *upgrading microsoft office* yang lama menjadi *microsoft office* yang terbaru 2016/2019 yang kemudian juga harus dilakukan penginstalan fitur *proofing*. Hal tersebut sangat penting untuk menunjang kinerja para pegawai pada Bagian Risalah baik Asisten Perisalah Legislatif maupun Perisalah Legislatif

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian PPN/Bappenas dan OECD. Siaran Pers: Bonus Demografi 2030-2040 Strategi Indonesia Terkait Ketenagakerjaan dan Pendidikan. Diakses dari [https://www.bappenas.go.id/files/9215/0397/6050/Siaran\\_Pers\\_-\\_Peer\\_Learning\\_and\\_Knowledge\\_Sharing\\_Workshop.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/9215/0397/6050/Siaran_Pers_-_Peer_Learning_and_Knowledge_Sharing_Workshop.pdf) pada tanggal 22 Agustus 2019 Pukul 10.59.
- Mollin, S. (2007). The Hansard hazard: gauging the accuracy of British parliamentary transcripts. *Corpora*, 2(2), 187-210.
- Rahmadi, Duwi. (2017). Solo. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia & Kesalahan Berbahasa*. Genta Smart Publisher.
- Reinhardt, Trudy. 2000. *Hansard Translation: Problem and Issues In The Translation and Editing of Verbatim Reports of Parliamentary Proceedings*. <https://repository.nwu.ac.za/handle/10394/6587> diakses pada tanggal 22 Agustus 2019 Pukul 11.01 WIB hal. 50.
- Scoot, Mary dan Joan Turner. 3 Oktober 2008. *Problematising Proofreading*. *Zeitschrift Schreiben*. Diakses pada [www.zeitschrift-schreiben.eu](http://www.zeitschrift-schreiben.eu) pada 20 Juli 2019 pukul 14.00 WIB.
- Scott, M. & Turner, J. (2007) *Problematising 'proofreading'*. EATAW Conference paper, Bochum.
- Slembrouck, S. (1992). *The parliamentary Hansard 'verbatim' report: the written construction of spoken discourse*. *Language and literature*, 1(2), 101-119.
- Sungguh, As'ad. (2016). Jakarta. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Pembentukan Istilah*.

# LAMPIRAN



# **Lampiran**

## **Tahapan Kegiatan 1**

**Bahan Pertanyaan/Klarifikasi untuk mentor, *coach* dan senior pada Bagian Risalah, Biro Persidangan I, Sekretariat Jenderal DPR RI**

**Mentor**

1. Soal tata bahasa, apakah seperti bahasa formal atau bahasa lisan?
2. Soal banyaknya pengulangan, uhm, uh apakah harus di hapus dalam risalah mengingat risalah adalah naskah yang baku.
3. Menanyakan tentang apakah pemberian tanda baca itu diizinkan atau tidak.
4. Konfirmasi tentang kejelasan ekspresi bagaimana penulisannya misal batuk dan lain sebagainya.

**Coach**

1. Diskusi mengenai apa yang sudah di selesaikan pada kegiatan satu tentang penyusunan kaidah proofreading/penyuntingan pada risalah rapat sementara.
2. Diskusi mengenai step selanjutnya dalam riset dan instalasi fitur proofing pada Microsoft Word. (instalasinya berapa komputer yang harus di instalasi? Yang perlu sampel untuk menginstalasi).

**Senior/Mentor**

1. Apakah kata kejelasan ekspresi ini apa penyebutan yang pas dan definisi yang pas? Apakah ekspresi ketika batuk, dan bla-bla atau justru kejelasan keterangan seperti misalnya dia menyebutkan ketua apa atau kepala apa, namun tidak disebut bernama siapa, apakah itu juga disebutkan?
2. Apakah risalah rapat ini akan menjadi gaya tulis dan formal atau hanya kemudian ada pembenahan secara minor. Untuk itu apa saja yang menurut senior dan mentor kebijakan risalah rapat ini.

### Bahan Pertanyaan.

1. Menurut Ibu apa perbedaan antara transkrip dan risalah rapat sementara?
2. Apa yang harus ada pada risalah rapat sementara?
3. Proses apa saja yang harus dilakukan untuk mengubah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara?
4. Selama Ibu bekerja menurut itu untuk sampai ke khalayak, apa ukuran risalah legislatif yang baik?
5. Berdasarkan literatur review yang saya lakukan, saya menemukan bahwa ciri khas Hansard itu sangat formal dan disesuaikan dengan Grammar Bahasa Inggris. Nah menurut Ibu, risalah legislatif akan dibawa pada gaya yang seperti apa? Apa adanya atau formal layaknya naskah dinas yang resmi?

Oke ...Mbak begini ya....

1. Transkrip adalah alih media dari media suara ke media tulis , sementara risalah sementara adalah transkrip dikoreksi dan yang sudah diformat dengan cover yang di cover menjelaskan sebagai mana contoh dibawah ini namun dilakukan validasi, otentikasi, oleh yang berhak melakukan , jadi masih tersusun biasa...tapi lebih tinggi dari transkrip yang hanya merupakan alih media dari suara ke tulis.



### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

### RISALAH SEMENTARA RAPAT KONSULTASI PENGGANTI RAPAT BADAN MUSYAWARAH

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: II (Dua)
Jenis Rapat	: Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah
Hari, Tanggal	: Kamis, 8 Desember 2016
Pukul	: 16.30 sd 17.46 WIB
Sifat Rapat	: Tertutup
Tempat	: Ruang Rapat Pimpinan DPR RI , Gedung Nusantara III DPR RI Jakarta.
Pimpinan Rapat	: <b>Fahri Hamzah, S.E (Wakil Ketua DPR RI/Korkesra)</b>
Sekretaris Rapat	: Sekretaris Jenderal DPR RI (Dr. Winantuningtyastiti.S.M.Si.)
Acara	: Penjadwalan kembali Rapat Paripurna tanggal 8 Desember 2015.
Hadir	: I. <b>PIMPINAN DPR RI</b> <b>Fahri Hamzah, S.(Wakil Ketua DPR RI/Korkesra)</b>



## **II. PIMPINAN FRAKSI-FRAKSI DPR RI :**

### **1. Pimpinan F-PDI Perjuangan.**

Alex Indra Lukman

### **2. Pimpinan F-Partai Golkar.**

a. H. John Kennedy Aziz, S.H.

b. Ferdiansyah, S.E., M.M.

c. H. Mukhamad Misbakhun , S.E.

### **3. Pimpinan F-Partai Gerindra.**

a. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M

b. Ir. A. Riza Patria, MBA

### **4. Pimpinan F-Partai Demokrat**

Didik Mukrianto, SH.

### **5. Pimpinan F-PAN NASIONAL (F-PAN)**

a. Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si

b. Andi Taufan Tiro, S.T.

### **6. Pimpinan Fraksi – PKB**

Daniel Johan, SE

### **7. Pimpinan Fraksi-PKS**

H. Ishan Qolba Lubis, MA.

### **8. Pimpinan Fraksi - PPP**

Dr. H.R.A. Dimiyati Natakesumah, S.H., M.H., M.Si.

### **9. Pimpinan Fraksi – NasDem.**

a. Johnny G. Plate

b. H. Syarief Abdullah ALK, S.H., M.H., M.Si.

c. Mayjend TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra.

### **10. Pimpinan Fraksi – Partai Hanura.**

a. Capt H. Djoni Rolindrawan, SE, MMAR., MBA.

b. Fauzih H. Amro, M.Si

2. Isi risalah sementara sudah harus dikoreksi baik ejaan, maupun siapa yang berbicara sesuai rekaman, penulisan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Dan sudah tidak ada lagi yang bolong-bolong. termasuk penulisan bahasa asing yang benar.
3. Risalah adalah naskah dinas resmi juga. Maka harus ada cover seperti diatas. Dan harus ditandatangani oleh ketua atau sekretaris rapat atau orang yang mendapat pendelegasian untuk itu Contoh :
4. Mudah-mudahan ini bisa kita nanti jadi catatan. Saya kira itu ya cukup ya Bapak/Ibu sekalian. Kita tutup dengan membaca ***Alhamdulillahirrobilalamin.***

**(RAPAT DITUTUP PK.17.46 WIB)**

a.n Sekretaris Rapat  
Kabag Set Badan Musyawarah

Dra. Nurani Bodroini  
NIP. 196007031988032001

## **Literatur Review Kaidah Proofreading/Penyuntingan**

### **Review Artikel : *The Written Construction of Spoken Discourse*, Stef Slembrouck (Universitas Gent, Belgia).**

Artikel ini mencoba melihat tentang analisis linguistik kritis pada praktisi *discourse* representatif pada konteks institusi. Penulis memfokuskan pada *proceedings* dalam Parlemen Inggris. Ia menggunakan metode perbandingan teks laporan dengan transkrip debat. Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana parlemen memproduksi hansard dan kemudian adanya transformasi dalam gaya verbatim.

Pada artikel ini dimulai dari pendahuluan, teori dari *discourse* representatif, praktek hansard, dan konklusi. Hal yang menarik dari bab praktek hansard dalam bab itu disebutkan mengenai kepenulisan (alih bahasa menjadi formal standar bahasa Inggris, kegamblangan/kejelasan dan format yang baik), *The premium on ideational meaning*, bersahut-sahutan dan interaksi dengan audiens, identifikasi format dan pidato.

Setidaknya ada beberapa temuan yang patut menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan risalah rapat berkaca pada kasus hansard diantaranya mengenai penyaringan ucapan seperti pengucapan yang tidak lancar seperti repetisi, ucapan kata yang setengah, ucapan yang tidak lengkap, penjedaan, tata bahasa yang kurang tepat, dan lain. Selain penyaringan ucapan yang perlu diperhatikan seperti intonasi dan penekanan dalam berbicara juga harus diperhatikan. Selain itu kejelasan dan format yang baik juga merupakan hal yang penting dalam penulisan sebuah naskah hansard.

Hal lain lagi adalah ketika dalam sebuah debat atau pembicaraan terdapat pembicaraan yang saling bersahutan dan kemudian juga terdapat penekanan dalam ekspresi seperti suara tinggi, suara batuk, suara tertawa dan sebagainya. Dalam hansard hal tersebut diberikan penulisan yang jelas sehingga jelas terjadi kejelasan dalam hal ekspresi. Kemudian kejelasan identifikasi mengenai pembicara dalam sebuah debat yang kemudian dituliskan dalam hansard menjadi hal yang sangat vital untuk dilakukan oleh seorang editor hansard.

### **Review Jurnal: *The Hansard Hazard: Gauging The Accuracy of British Parliamentary Transcripts*.**

Jurnal ini terdiri dari beberapa bagian yaitu pendahuluan, *The hansard transcripts as a Corps linguistics Resources*, *a Study of transcription accuracy*, dan hasil terdiri dari beberapa bagian pula yaitu



karakteristik *speech*, karakteristik dari debat/percakapan parlemen, pilihan kata dan tata bahasa legislator dan tentu bab akhir ditutup dengan kesimpulan. Tulisan tersebut menarik bahwa terdapat penelitian/kajian yang komprehensif bagaimana *Parliamentary speech* tersebut diteliti dan implikasinya terhadap citra legislator ataupun citra parlemen itu sendiri.

Dalam penelitian tersebut terdapat sesuatu untuk ditelisik misalnya oleh Slembrouck dalam Hansard beberapa hal yang dieliminasi yaitu *false starts* misalnya dalam kata *re resources*, *reformulations* contohnya *is proposal is proposing*, dan *repetition* dalam kata *seventeen million pounds*. Dalam term bahasa Inggris terdapat istilah *filled pause* seperti *uh* atau *uhm* yang sering juga terdapat dalam verbatim/transkrip namun tidak semestinya berada dalam naskah resmi seperti *hansard*. Slembrouck menyarankan bahwa bahasa lisan adalah *clumsy* ketika dialihkan/transkrip menuju *hansard* harus memiliki perlakuan yang khusus.

Diakhir kesimpulan pada tulisan tersebut memaparkan hal yang dilematis yaitu *hansard* sebagai naskah resmi maka ia sangat dipoles dengan sesuai gaya formal bahasa Inggris namun tidak mengubah arti. Namun bagi para peneliti bahasa atau untuk analisa linguistik hal tersebut tidak mencerminkan orisinalitas. Inilah kemudian yang harus dikaji lebih dalam lagi mengenai *hansard* sebagai bagian dari teks yang penting.

### **Review Jurnal: Problematising Proofreading (Mary Scott dan Joan Turner)**

Jurnal ini mengulas tuntas mengenai proofreading dalam dunia akademik seperti dalam penulisan skripsi, tesis dan disertasi. Proofreading biasanya dilihat sebagai tahap akhir setelah penulisan selesai disusun dan penyusunan ulang beberapa kali. Namun dewasa ini terdapat berbagai macam proofreaders yang terkomersialisasi secara luas. Sehingga jurnal tersebut lebih menjelaskan dan memproblematisasi mengenai isu-isu yang ada pada proofreading. Dalam jurnal ini juga dijelaskan mengenai definisi *proofreading* yang masih membingungkan dan memiliki arti yang kontradiktif dari pemolesan sampai merapikan teks.

Hal menarik yang dalam jurnal ini adalah dalam publisitas akademik, membaca proof adalah prosedur yang rutin dilakukan, proses pembersihan dan sebelum dipublikasikan. Terdapat sebuah pedoman dalam *Zeitschrift Schreiben* yaitu tulisan harus bebas dari kesalahan. Hal tersebut adalah tanggung jawab dari penulis untuk melakukan proofread untuk tata bahasa (grammar), punctuation (tanda baca), ejaan dan kejelasan ekspresi.



### **Review buku: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia**

Buku ini memiliki daftar bahasan seperti mengenal bahasa Indonesia, sejarah ejaan di Indonesia, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, pedoman umum pembentukan istilah, panduan pembakuan istilah komputer, kesalahan berbahasa Indonesia: praktisi dalam kehidupan sehari-hari, analisis kesalahan berbahasa, sekapur sirih penyuntingan naskah. Dari daftar bab tersebut yang kemudian menjadi relevan dalam penyuntingan hasil transkrip adalah soal pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang meliputi: pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca dan penulisan unsur serapan.

Pada bagian pemakaian huruf disebutkan hal seperti huruf abjad, vokal, konsonan, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, huruf tebal. Pada bagian penulisan kata disebutkan meliputi kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti ku-, kau-, -ku, -mu, dan -nya dan kata si dan sang. Sedangkan dalam pemakaian tanda baca meliputi tanda titik, koma, titik koma, titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elips, tanda petik, tanda petik tunggal, tanda kurung, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostrof.

### **Review buku: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Pembentukan Istilah**

Buku ini diterbitkan oleh penerbit Bumi Aksara, penulis As'ad Sungguh. Buku ini diterbitkan tahun 2016 di Jakarta. Dalam buku ini terdiri dari 11 bab. 11 bab tersebut umumnya lebih menjelaskan mengenai regulasi tentang kebahasaan, plagiarisme, penulisan standar nasional Indonesia. Dalam buku ini bab-bab yang relevan berada pada bahasan bab 1 tentang pedoman umum bahasa Indonesia dan bab petunjuk membaca cetak coba yang baku.

## DAFTAR BACAAN

Mollin, S. (2007). The Hansard hazard: gauging the accuracy of British parliamentary transcripts. *Corpora*, 2(2), 187-210.

Rahmadi, Duwi. (2017). Solo. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia & Kesalahan Berbahasa*. Genta Smart Publisher.

Scott, M. & Turner, J. (2007) *Problematising 'proofreading'*. EATAW Conference paper, Bochum.

Slembrouck, S. (1992). *The parliamentary Hansard 'verbatim' report: the written construction of spoken discourse*. *Language and literature*, 1(2), 101-119.

Sungguh, As'ad. (2016). Jakarta. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Pembentukan Istilah*.

## **Lampiran**

### **Tahapan Kegiatan 2**



## Laporan Bimbingan pada 6 September 2019

Dilakukan pada jam 09.45-10.22

Peserta menjelaskan mengenai:

1. Timeline kegiatan aktualisasi
2. Peserta menjelaskan temuan pada kegiatan pertama yaitu kegiatan mencari referensi tentang kaidah proofreading/penyuntingan
3. Kemudian peserta juga menjelaskan mengenai kegiatan tiga yaitu pencarian referensi dan melakukan instalasi fitur *proofing microsoft word* pada komputer kerja.
4. Peserta meminta rekomendasi mengenai kegiatan empat yaitu mengenai simulasi *proofreading/penyuntingan* hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara dengan menggunakan fitur *proofing* pada microsoft word. Mentor merekomendasikan bahwa simulasi dibutuhkan 2 orang dalam penyusunan risalah rapat sementara yaitu CPNS/PNS yang menjabat sebagai perisalah legislatif ahli pertama. Namun tidak diperlukan perbandingan pengerjaan risalah rapat sementara yang sama dengan menggunakan atau tidak menggunakan *proofing*. Namun yang harus membandingkan hanya saya sendiri.
5. Dari mentoring ini masih belum ditemukan kesepakatan mengenai seberapa lama seorang perisalah legislatif ahli pertama harus menyelesaikan risalah rapat sementara karena belum ditemukan atau belum adanya juknis dalam kerangka penyusunan risalah rapat sementara.

Mentor,

Peserta

Dra. Mitra Anindyarina.

Anisa Nur Nia Rahmah

### **Kaidah *Proofreading*/Penyuntingan dalam Risalah Rapat Sementara**

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan dapat ditemukan beberapa kesimpulan. Yang pertama kita harus dapat mengidentifikasi karakteristik teks yang ada. Misalnya saja teks yang berupa naskah resmi seperti risalah. Risalah merupakan gambaran tertulis mengenai jalannya persidangan. Untuk itu sebagai gambaran tertulis maka ia harus dapat menggambarkan secara tepat apa yang terjadi dalam persidangan. Namun juga harus diperhatikan bahwa gambaran tertulis tersebut juga memerlukan perangkat untuk memudahkan pembacaan. Sehingga sangat penting kita untuk memperhatikan pula keterbacaan salah satu hal yang penting adalah soal ejaan, tanda baca dan kejelasan ekspresi.

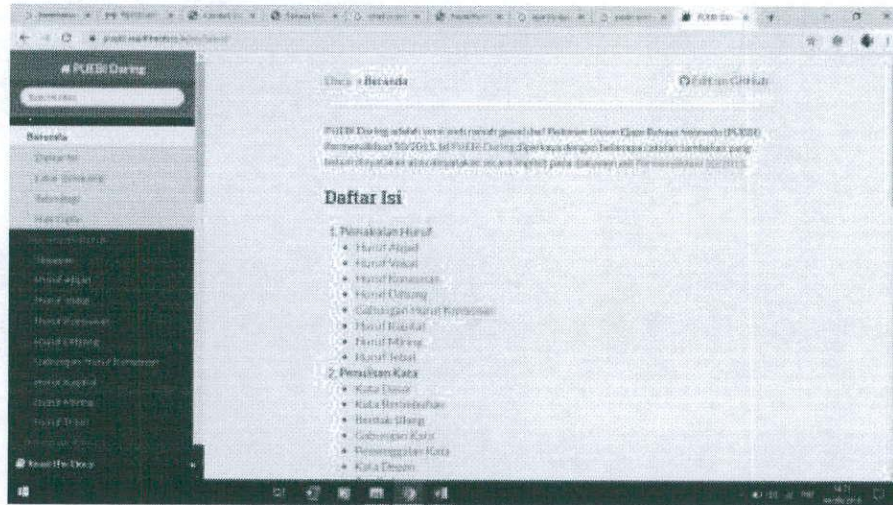
Oleh karena itu kaidah *proofreading*/penyuntingan dalam konteks pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara terdapat empat bagian penyuntingan yaitu:

- a. Ejaan
- b. Tanda baca
- c. Pemenggalan Paragraf
- d. Kejelasan ekspresi

Ejaan adalah kaidah penulisan bunyi (huruf, kata dsb) dan penggunaan tanda baca. Penulisan huruf mencakup huruf kapital, huruf miring dan huruf tebal. Penulisan kata disesuaikan dengan lima bentuk kata dan sebelas kelas kata bahasa Indonesia. Penulisan tanda baca diterapkan dengan pemahaman lima kategori fungsi dari tiga belas punctuation dalam bahasa Indonesia. Ejaan yang tertib akan meningkatkan keterbacaan tulisan.

Setidaknya dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia terdapat tiga aspek penggunaan bahasa yaitu pemakaian huruf, penulisan kata dan pemakaian tanda baca. Namun sekarang sudah ada PUEBI dari berbasis website yang dapat diakses pada <https://puebi.readthedocs.io/en/latest/>. PUEBI sesuai dengan Permendikbud 50/2015.





## 1. Pemakaian Huruf

Dalam hal ini terdapat bagian yang penting yaitu tentang pemakaian huruf. Pemakaian huruf yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Huruf abjad  
Huruf abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf yaitu dari a sampai dengan z.
- b. Huruf vokal  
Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas lima huruf yaitu a, e, i, o, dan u.
- c. Huruf konsonan  
Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia adalah 21 huruf selain huruf vokal diatas.
- d. Huruf diftong  
Sedangkan pada huruf diftong, dalam bahasa Indonesia terdapat gabungan huruf vokal yaitu ai, au, ei, dan oi
- e. Gabungan huruf konsonan  
Gabungan huruf konsonan yaitu kh, ng, ny, dan sy.
- f. Huruf kapital  
Ada beberapa kaidah/ penggunaan dalam huruf kapital diantaranya:
  - Huruf pertama awal kalimat
  - Huruf pertama unsur nama orang, julukan. (tidak dipakai pada nama orang yang sudah menjadi jenis atau satuan ukuran, misal 5 ampere)
  - Awal kalimat petikan langsung (misal "Kapan kita pulang?")



- Huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci dan sebutan untuk Tuhan.
- Huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. (Haji Agus Salim, Doktor Muhammad Hatta)
- Huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan (misal: Selamat datang, Yang Mulia; Terima kasih Kiai; Mohon izin Jenderal)
- Huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. (misalnya: Gubernur Papua Barat)
- Huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa dan bahasa (misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, suku Jawa, bangsa Maori). Namun tidak dipakai ketika misalnya pengindonesiaan kata asing.
- Huruf pertama nama tahun, bulan, hari dan hari besar atau hari raya. (Misalnya: tahun Hijriah, bulan Maulid, hari Galungan)
- Huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah (misalnya: Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia II)
- Huruf pertama nama geografi (misalnya: Jakarta, Jalan Sulawesi, Terusan Suez)
- Huruf pertama semua kata (termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna) dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi atau dokumen kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Misalnya: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Lainnya.
- Huruf pertama semua kata (termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna) di dalam judul buku, karangan, artikel dan kalah serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya: judul buku Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma.
- Huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya: S.H.; M.Hum.; R.A. dan lain sebagainya.

- Huruf peram kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya: Dendi bertanya, "Itu apa, Bu?"; "Silakan duduk, Dik!" kata orang itu.

Catatan:

Istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan dan pengacuan. Misalnya: Kita harus menghormati bapak dan ibu kita; Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga.

Kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya: Siapa nama Anda?

g. Huruf miring

- Untuk menuliskan judul buku, nama majalah, nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya: Saya sudah baca buku *Salah Asuhan*; Pusat Bahasa. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat (Cetakan Kedua). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya: Huruf terakhir kata *abad* adalah d.; Dalam bab ini *tidak* dibahas pemakaian tanda baca.
- Untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya: Upacara *peusijek*; Ungkapan *bhinneka tunggal ika* dijadikan semboyan khusus negara Indonesia.

h. Huruf tebal

- Untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya: Huruf dh pada kata *Ramadhan*. (dh tidak terdapat dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan).
- Untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Misalnya: **1.1 Latar Belakang dan Masalah**;

2. Penulisan kata

- Kata dasar
- Kata berimbuhan
- Bentuk ulang
- Gabungan kata
- Pemenggalan kata
- Kata depan
- Partikel
- Singkatan dan Akronim

- Angka dan Bilangan
- Kata Ganti, ku-, kau-, -ku, -mu dan -nya
- Kata si dan sang

### 3. Pemakaian tanda baca

- Tanda Titik (.)
- Tanda koma (,)
- Tanda titik koma (;)
- Tanda titik dua (:)
- Tanda hubung (-)
- Tanda pisah ( \_ )
- Tanda tanya (?)
- Tanda seru (!)
- Tanda elipsis (...)
- Tanda petik ("...")
- Tanda petik tunggal ('...')
- Tanda kurung ( ( ) )
- Tanda kurung siku ( [ ] )
- Tanda garis miring (/)
- Tanda penyingkat atau Apostrof ('')

Untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya: Malam 'lah tiba.  
( 'lah = telah), 5-2-'13 ('13 = 2013)

### KEJELASAN EKSPRESI

Penggambaran secara tulisan yang tepat berimplikasi pada kejelasan ekspresi yang tepat. Misalnya saja kejelasan ekspresi tertawa, batuk dan suara tidak jelas, atau suara bertumpang tindih harus diberikan penjelasan yang lugas. Namun penulisan pada risalah rapat sementara dapat diberi tanda kurung misalnya saja (tertawa).

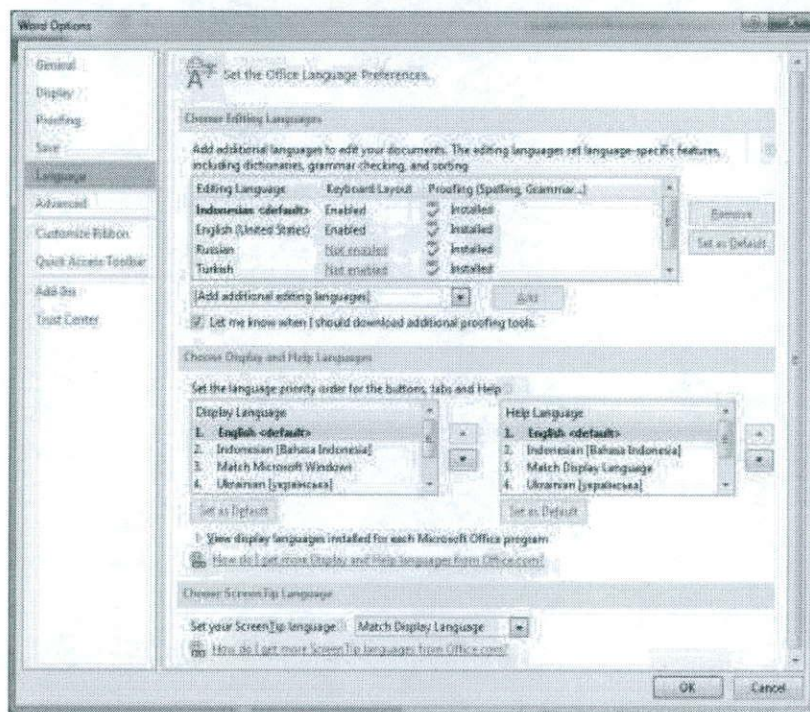


## **Lampiran**

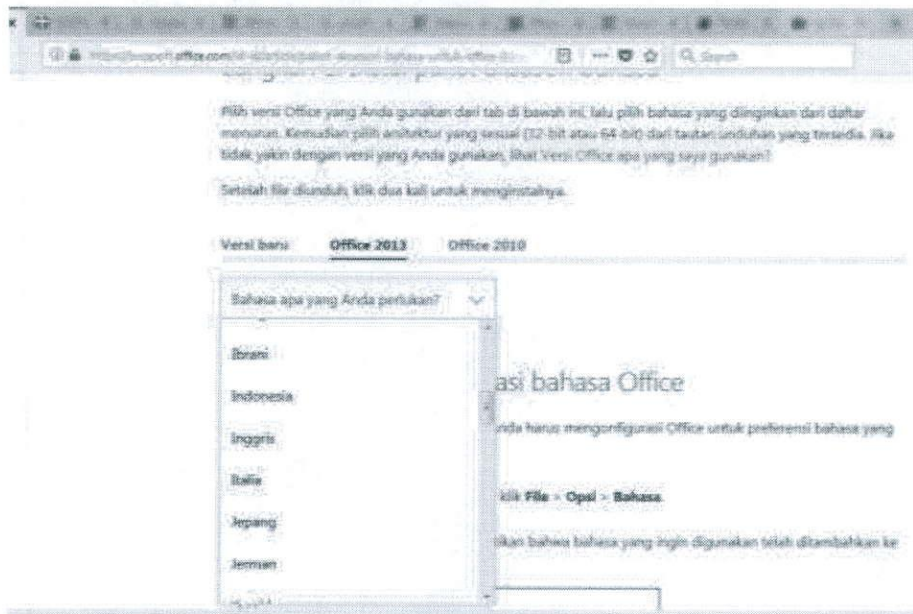
### **Tahapan Kegiatan 3**

## Langkah-langkah yang dilakukan dalam menggunakan fitur *proofing* adalah

1. Memastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam Microsoft Word menggunakan *settingan keyboard* dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Dalam hal ini nanti akan diarahkan pada region dan *language* dalam opsi itu pilih opsi *languages* --> bahasa Indonesia--> *language* bahasa indonesia--> *install*
2. Masuk kembali ke *word file*-->*options*--> *language*--> choose editing language--> add additional editing language--> Indonesian--> add --> keyboard lay out--> enabled--> proofing (speell, grammar) Install.



3. Kemudian nanti akan masuk ke website <https://support.office.com/id-id/article/paket-aksesori-bahasa-untuk-office-82ee1236-0f9a-45ee-9c72-05b026ee809f?ui=id-ID&rs=id-ID&ad=ID>.



4. Setelah pada *website* akan ditemukan perintah untuk (bahasa apa yang diperlukan. Ketikkan indonesia. Lalu pilih 32 bit atau 64 bit sesuai dengan spesifikasi *windows* atau *office* yang digunakan) *install--> run-->* tunggu beberapa saat sampai instalasi selesai. Sebelum instalasi selesai jangan lupa untuk menyimpan pekerjaan anda
5. Buka kembali *word--> file--> option--> language* jika sudah *enable* dalam bahasa Indonesia
6. Siap digunakan untuk mengecek kata yang salah eja.

### Analisa Sistem Proofing pada Microsoft Word

Dalam fitur proofing terdapat beberapa opsi yang dapat juga dikembangkan pada pembuatan risalah rapat sementara.

Pada fitur *proofing* terdapat empat aspek yaitu

1. *autocorrect options*
2. *when correcting spelling in microsoft office programs*
3. *when correcting spelling and grammar in word*
4. *option exceptions for this file*

Jika dalam Bahasa Indonesia tidak bisa digunakan untuk pengecekan tanda baca. Tanda baca hanya digunakan jika menggunakan Bahasa Inggris



saja. Bahasa Inggris yang digunakan ketika melakukan pengecekan tanda baca ditandai dengan garis biru.

Satu hal yang penting dalam melakukan *proofing* adalah memastikan Bahasa dalam *proofing* adalah Bahasa Indonesia dapat dicek dengan mengecek opsi *ribbon* bawah dengan memilih Indonesia dengan memastikan bahwa kolom centang tidak ada. Lalu oke.

Temuan saya pada tanggal 11 September 2019 ini adalah

1. Jika menggunakan fitur *proofing* untuk Bahasa Indonesia hanya bisa digunakan pada kata yang salah eja saja. Kata yang tidak baku. Hal tersebut ditandai dengan garis merah saja.
2. Namun jika menggunakan *proofing* Bahasa Inggris maka akan bisa ditemukan tanda baca yang tidak sesuai.

Sehingga menurut saya, fitur *proofing* dapat dilakukan kombinasi antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam pilihan Bahasa Indonesia maka akan didapat dan diperlihatkan kesalahan eja dalam sebuah dokumen berbahasa Indonesia. Yang kemudian bergaris merah adalah:

- a. Kata yang tidak baku
- b. Kata yang salah ketik
- c. Kata asing
- d. Dan kata yang tergabung dengan kata lain

Sementara jika menggunakan *proofing* Bahasa Inggris, maka akan dimungkinkan untuk melihat kesalahan dalam pemberian tanda baca. Misalnya saja banyak titik dan koma yang *double*. Hal tersebut menjadi penting karena hasil transkrip memiliki potensi kesalahan pada tanda baca. Pada praktik-nya transkrip yang dilakukan dengan jangka waktu yang tepat akan berpotensi pada pengabaian ejaan dan tanda baca. Sehingga menjadi penting dalam menyusun risalah rapat sementara untuk memperbaiki kesalahan yang jamak terjadi tersebut.

Berdasarkan praktik dan observasi yang telah dilakukan maka penulis menyarankan untuk menggunakan *double proofing*. Dengan langkah sebagai berikut.

1. Langkah pertama Perisalah Legislatif Ahli pertama harus mengecek kesalahan eja dalam penggunaan fitur *proofing* dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
2. Langkah kedua demi mendapatkan hasil dimana kesalahan peletakan tanda baca haruslah menggunakan *proofing* yang berbasis Bahasa Inggris. Sehingga *double proofing* ini akan membantu perisalah *legislative* pertama dalam menyusun risalah rapat sementara dengan memperhatikan keakuratan ejaan dan kemudian keakuratan tanda baca.

## **Analisis Instalasi**

### **1. Instalasi *proofing* pada office 2007 dan 2010**

Instalasi *proofing* pada office 2007 dan 2010 tergolong berbeda dengan office yang lain. Instalasi *proofing* dalam bahasa Indonesia tidak tersedia dalam opsi *proofing* (*spelling and check*) pada office 2007. Hanya tersedia dalam bahasa seperti bahasa Inggris, Jerman dan lainnya.

Sedangkan untuk office 2010 sudah tersedia dalam <https://support.microsoft.com>. Namun sama seperti office 2007, office 2010 tidak menyediakan *proofing* dalam opsi bahasa Indonesia. Sehingga menurut saya jika akan menggunakan fitur *proofing* dalam bahasa Indonesia pada Microsoft Word akan lebih baik jika tidak menggunakan office 2007 dan 2010.

### **2. Instalasi *proofing* pada office 2013**

Instalasi *proofing* pada office 2013 relatif mudah dilakukan seperti yang saya jelaskan pada kaidah/langkah instalasi *proofing* yang tersedia pada laman <https://support.microsoft.com>. Pada laman tersebut tersedia office 2013. Office 2013 memiliki opsi *proofing* dalam bahasa Indonesia. Proses instalasi pada office 2013 ini relatif mudah dilakukan. *Proofing* dalam bahasa Indonesia pada office 2013 memungkinkan pengguna/user untuk mengetahui dengan cepat kesalahan yang terjadi pada pengetikan sebuah kata. Dalam *proofing*



bahasa Indonesia tidak bisa juga digunakan pada pengecekan tanda baca yang tepat sesuai dengan kaidah ejaan umum bahasa Indonesia. Sehingga dalam melakukan pengecekan tanda baca maka proofing dalam bahasa Indonesia harus diganti dengan *English (United States)* atau *English (United Kingdom)*. Kekurangan yang lain pada office 2013 dalam penggunaan *proofing* bahasa Indonesia adalah *suggestion word* tidak muncul. Sehingga dibutuhkan pengetahuan kognitif tambahan tentang bahasa yang baku atau bahasa yang tepat dalam kesalahan ejaan.

Mengenai *suggestion word* sebenarnya bukan tidak bisa sekali digunakan pada office 2013. Pada Microsoft Word 2013 kita dapat menambahkan kata yang lebih tepat penulisannya pada fitur add to dictionary. Pada kata yang bergaris merah kemudian klik kanan sekali. Akan muncul opsi *ignore all*, *add to dictionary*, *hyperlink* dan *new comment*. Pilih add to dictionary. Lalu secara otomatis kata tersebut akan hilang garis merah bergelombang yang menandakan bahwa kata tersebut memang merupakan kata yang benar. Dalam office 2013 ini tidak sepenuhnya dapat langsung digunakan sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan risalah rapat sementara. Tetap perlu dibutuhkan kognisi/pengetahuan pada masing-masing individu mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang mana juga dapat diakses pada laman websitenya <https://puebi.readthedocs.io/en/latest/> selain PUEBI website yang dapat menunjang adalah <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

### **3. Instalasi proofing pada office 2016 dan yang terbaru 2019.**

Instalasi proofing pada office 2016 atau 2019 relatif sangat mudah untuk dilakukan. Instalasi ini membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Instalasi proofing untuk office 2016/-2019 ini dapat diakses dengan menggunakan <https://www.microsoft.com/id-id/download/details.aspx?id=52668>. Menggunakan proofing bahasa Indonesia pada office 2016 ini sangat menguntungkan untuk mengecek ejaan mana yang benar dan mana yang kurang tepat.



Tanda *underline* berwarna merah bergelombang menjadi penanda bahwa kata tersebut tidak tepat. Keuntungan yang sangat signifikan adalah dengan adanya *suggestion word* dalam bahasa Indonesia. Tidak hanya mengidentifikasi kesalahan eja tetapi juga terdapat saran kata mana yang lebih tepat dengan cara mengklik kanan pada kata yang teridentifikasi kurang benar dengan tanda *underline* merah. Namun juga ditegaskan sekali lagi pada *proofing* bahasa Indonesia tidak tersedia untuk pengecekan tanda baca. Sehingga jika kita menggunakan *proofing* pada aplikasi *microsoft word* tetap dibutuhkan *double proofing*, *proofing* dalam bahasa Indonesia untuk mengidentifikasi dan memberikan *suggestion word* pada teks. *Proofing* yang kedua dalam opsi bahasa Inggris menggunakan *united states/united kingdom* untuk pengecekan tanda baca yang tidak seharusnya dipakai atau pemakaian tanda baca tersebut kurang tepat.

## **Lampiran**

### **Tahapan Kegiatan 4**

Hijriatul Mabruk

CPNS Perisalah Legislatif Ahli Pertama

Pertanyaan:

1. Menurut anda risalah rapat sementara yang seperti apa yang dikatakan baik secara kualitas?
2. Dalam melakukan pengolahan risalah rapat sementara apa kendala yang sering ditemui?
3. Bisakah anda menjelaskan mengenai penyuntingan yang selama ini anda lakukan untuk menghasilkan risalah rapat sementara?
4. Pernahkah sebelumnya anda mengetahui tentang cara kerja *proofing* pada *microsoft word*?
5. Menurut anda apakah alat/fitur *proofing* dalam kaitannya dengan pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara dapat membantu pekerjaan anda?
6. Apakah anda mengetahui instalasi *proofing*?
7. Menurut anda seberapa penting *proofing* dalam pengolahan risalah rapat sementara?

Jawaban:

1. Risalah rapat sementara yang baik secara kualitas ialah risalah yang dapat diserahkan kepada penyelenggara rapat dalam waktu yang cukup cepat dalam penyusunannya. Selain itu juga risalah tersebut juga harus lengkap dalam hal susunan pembicara, cover dari risalah rapat itu sendiri dan penulisan yang sesuai dengan ejaan KBBI.
2. Kendala yang sering ditemui terkadang tidak lengkapnya kelengkapan penyusunan risalah rapat sementara seperti daftar hadir anggota, bahan rapat dan lapsing agar jika ada materi pembicaraan yang sulit dimengerti dapat ditemukan dengan mudah. Terkadang susunan pembicara sedikit *miss* dengan yang ada di suara rekaman rapatnya. Selain itu terkadang suka terlewat mengenai aturan ejaan yang sesuai dengan KBBI.
3. setelah APL melakukan transkrip rapat, lalu diserahkan kepada PL Pertama untuk segera disusun risalah rapat sementara. Dalam penyusunan risalah rapat sementara saya melakukan *playback* dari kaset rekaman tersebut selagi melakukan penyuntingan terhadap hasil transkrip tersebut. Dan mencari istilah-istilah yang tidak dimengerti didalam pembahasan rapat melalui media Google. Jika masih ada istilah yang tidak dimengerti atau suara yang kurang jelas maka akan diberi tanda didalam risalah tersebut (suara tidak jelas) agar dapat dikoreksi oleh penyelenggara rapat dan PL Muda untuk diperbaiki.
4. Sebelumnya saya belum pernah tahu mengenai *proofing* didalam *MS Word*.
5. Setelah diperkenalkan alat/fitur *proofing* saya rasa dapat mempermudah pekerjaan dalam menyusun risalah rapat sementara.
6. Saya tidak mengetahui mengenai instalasi *proofing*.
7. Menurut saya cukup penting alat *proofing* dalam penyusunan risalah rapat sementara. Karena dapat mempermudah dan membantu dalam mengoreksi jika dalam transkrip tersebut ada kesalahan ejaan dalam KBBI. Dan pastinya penyusunan risalah rapat sementara akan lebih cepat disusun dan diserahkan kepada penyelenggara rapat dan PL Muda.



Tri Apriliani  
CPNS Perisalah Legislatif Ahli Pertama

Pertanyaan:

1. Menurut anda risalah rapat sementara yang seperti apa yang dikatakan baik secara kualitas?
2. Dalam melakukan pengolahan risalah rapat sementara apa kendala yang sering ditemui?
3. Bisakah anda menjelaskan mengenai penyuntingan yang selama ini anda lakukan untuk menghasilkan risalah rapat sementara?
4. Pernahkah sebelumnya anda mengetahui tentang cara kerja *proofing* pada *microsoft word*?
5. Menurut anda apakah alat/fitur *proofing* dalam kaitannya dengan pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara dapat membantu pekerjaan anda?
6. Apakah anda mengetahui instalasi *proofing*?
7. Menurut anda seberapa penting *proofing* dalam pengolahan risalah rapat sementara?

Jawaban:

1. Yang memenuhi unsur-unsur kelengkapan risalah rapat, dan penulisan kata dalam risalah rapat harus sesuai dengan Bahasa yang baik dan benar
2. Kata-kata yang disebut oleh peserta rapat tidak sesuai dengan pelafalan yang benar sehingga harus didengarkan kembali untuk memperbaiki dan untuk memahami pelafalan yang benar
3. Selama ini metode yang digunakan : mendengarkan kembali, crosscheck dengan lapsing dari AKD mengenai isi rapat, dan memeriksa kata melalui kamus online
4. Pernah
5. Dapat
6. Ya
7. Sangat penting karena untuk efisiensi pengolahan risalah

Desy Nirmala Setyawati  
CPNS Perisalah Legislatif Ahli Pertama

Pertanyaan:

1. Menurut anda risalah rapat sementara yang seperti apa yang dikatakan baik secara kualitas?
2. Dalam melakukan pengolahan risalah rapat sementara apa kendala yang sering ditemui?
3. Bisakah anda menjelaskan mengenai penyuntingan yang selama ini anda lakukan untuk menghasilkan risalah rapat sementara?
4. Pernahkah sebelumnya anda mengetahui tentang cara kerja *proofing* pada *microsoft word*?
5. Menurut anda apakah alat/fitur *proofing* dalam kaitannya dengan pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara dapat membantu pekerjaan anda?
6. Apakah anda mengetahui instalasi *proofing*?
7. Menurut anda seberapa penting *proofing* dalam pengolahan risalah rapat sementara?

Jawaban:

1. Risalah yang sesuai, jelas dan benar nama pembicara (tidak tertukar antara pembicara satu dengan yang lain).

Risalah yang tidak ada typo nya.

Risalah yang benar tanda baca dan besar kecil hurufnya.

Risalah yang benar miring tegak kata nya.

Risalah yang benar tebal tipis hurufnya.

2. Istilah2 asing atau yang hanya dibahas dalam suatu komisi menyusahkan pencarian tulisan yang benar. Misal istilah di komisi 7 ttg ESDM banyak yg asing, contoh EOR, Brent, Crude, asing menurutkuuu, hiks ☹
3. Penyuntingannya dengan cara mendengarkan ulang, di edit secara manual per baris sambil dngerin kaset. bcs microsoft nya ngga mendukung proofreading :"
4. Pernah, tapi jarang pake nya
5. Membantu banget, jadi bisa lihat langsung mana kata yg typo, biar lgsg diubah jadi yg benar
6. Gatau sist ☹
7. Kalau pakai presentase, pentingnya sekitar 90% sih. Karena tugas utama PL kan buat risalah sementara, artinya juga membenarkan kata yg salah sehingga layak untuk dibaca. Metode proofreading sangat membantu, tentunya dgn didukung fasilitas dari kantor juga ya hehe



Ines Adhitya Pambudi  
CPNS Perisalah Legislatif Ahli Pertama

Pertanyaan:

1. Menurut anda risalah rapat sementara yang seperti apa yang dikatakan baik secara kualitas?
2. Dalam melakukan pengolahan risalah rapat sementara apa kendala yang sering ditemui?
3. Bisakah anda menjelaskan mengenai penyuntingan yang selama ini anda lakukan untuk menghasilkan risalah rapat sementara?
4. Pernahkah sebelumnya anda mengetahui tentang cara kerja *proofing* pada *microsoft word*?
5. Menurut anda apakah alat/fitur *proofing* dalam kaitannya dengan pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara dapat membantu pekerjaan anda?
6. Apakah anda mengetahui instalasi *proofing*?
7. Menurut anda seberapa penting *proofing* dalam pengolahan risalah rapat sementara?

Jawaban:

1. Risalah rapat yang dapat dibaca dengan baik dan mudah dimengerti dengan diberikan tanda baca yang lengkap serta tidak ada kesalahan penulisan/typo
2. Suara dalam rekaman yang tidak terdengar jelas.
3. Penyusunan risalah rapat sementara dilakukan dengan mempelajari hasil risalah rapat yang sudah ada dan beberapa menanyakan kepada senior mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dengan buku himpunan peraturan jabatan fungsional perisalah legislatif.
4. Pernah
5. Sangat membantu untuk mempercepat dan memberikan keakuratan dalam penulisan setiap kata dalam menyusun risalah rapat sementara.
6. Tidak
7. Sangat penting karena dengan *proofing* tersebut akan sangat memudahkan perisalah legislatif dalam melakukan koreksi pada pengetikan yang typo dan penyusunan risalah rapat sementara.



#### Analisis Kegiatan 4

1. Kendala dalam melakukan kegiatan 4 adalah adanya kebingungan dalam pemilihan dokumen mana yang akan dijadikan contoh untuk penggunaan fitur *proofing*.
2. Ada dua konsiderasi dalam pemilihan dokumen apakah hasil transkrip ataukah hasil risalah rapat sementara teman kerja yang kita cek lagi apakah masih terdapat kesalahan dalam ejaan dan tanda baca.
3. Jika memilih hasil transkrip untuk dijadikan risalah rapat sementara tidak ada file yang memadai.
4. Catatan 11 menit 8 detik adalah waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan eja. Perbaikan ini belum termasuk kesalahan untuk tanda baca.

Waktu yang diperlukan 11 menit 8 detik digunakan pada format halaman *left* 4, *top* 4, *bottom* 3 dan *top* 3; dengan menggunakan spasi 1 dan jumlah huruf 2390 huruf dengan jumlah halaman 8 lembar. Terdapat sekitar 130 kesalahan baik kesalahan eja. Sehingga jika kita bisa membuat rata rata maka setiap halaman akan terdapat  $130/8=16,2$  atau dibulatkan menjadi 16 kesalahan pada setiap lembarnya.

Maka jika sebuah hasil transkrip terdiri dari 50 halaman maka jika diasumsikan rata-rata tiap halaman memiliki kesalahan 16 kali kesalahan ejaan maka kira kira memerlukan waktu kurang lebih 1 jam 5 menit. Hasil tersebut didapat dari  $50 \text{ halaman} / 8 \text{ halaman} = 6.25 \text{ halaman}$

Jika 8 halaman memerlukan waktu 11 menit 8 detik, maka 50 halaman memerlukan waktu kurang lebih 69 menit.  $(6.25 \times 8 = 68,75)$ .

5. Testimoni dari Hijriatul Mabruk, CPNS Perisalah Legislatif Ahli Pertama. Ia menyampaikan bahwa dalam mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara penyuntingan dilakukan dengan mendengarkan ulang rekaman dan di saat yang sama juga melakukan penyuntingan. Ia mengatakan untuk 1 kaset biasanya ia memerlukan waktu 40 menit untuk menyunting 11-12 halaman dengan 1 *spacing*.
6. Menurutnya penggunaan *proofing* dalam melakukan pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara membuatnya lebih jelas untuk mengidentifikasi kesalahan eja. Selain itu, jika menggunakan *proofing office* 2016 lebih dipermudah dengan saran kata. Pada intinya menurutnya penggunaan *proofing* efektif untuk mengidentifikasi kesalahan eja (Kamis, 26 September 2019)

7. Kesimpulan sementara: pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara saat ini dengan mendengarkan kembali untuk melakukan pengecekan keseluruhan. Sehingga penggunaan proofing yang merupakan salah satu elemen dalam penyuntingan/pengolahan risalah rapat sementara dapat membantu pekerjaan secara efektif.
8. Namun jika, diasumsikan tidak mendengarkan ulang kembali maka dibutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk melakukan perbaikan kesalahan eja.
9. Penyuntingan pada pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara setidaknya ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, (berdasarkan praktik kerja di lingkungan kerja):
  - a. Memastikan format risalah rapat sementara seperti: cover, informasi mengenai (tahun sidang, masa persidangan, hari/tanggal, sifat rapat, pimpinan rapat, sekretaris rapat, tempat, acara, anggota yang hadir, anggota yang izin, undangan). Format penulisan nama pembicara, format kertas, format spasi, format kalimat khusus (seperti kalimat pembuka, kalimat salam, dan kalimat seperti rapat dibuka dan rapat ditutup)
  - b. Melakukan playback rekaman untuk memastikan tidak ada kata yang tertinggal.
  - c. Memastikan ejaan sesuai dengan penulisan pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).
  - d. Memastikan tanda baca sesuai PUEBI dan pemenggalan kalimat atau paragraf yang tepat.

Berdasarkan proses pengolahan tersebut penulis lebih condong untuk mengambil fokus untuk memastikan ejaan dengan menggunakan fitur proofing pada aplikasi microsoft word.

#### Mengapa?

Hal ini dilakukan karena masih ditemukan kesalahan eja pada risalah resmi yang sudah terunggah pada website resmi dpr.go.id. Kesalahan eja menjadi titik penting dalam keterbacaan suatu dokumen. Sehingga penulis merasa perlu untuk mencari metode untuk mengidentifikasi kesalahan eja dengan akurat. Salah satunya melalui fitur proofing dalam microsoft word.

#### Bagaimana prosesnya?

1. Proses ini dilakukan dengan terlebih dahulu menginstalasi fitur *proofing* pada microsoft word pada komputer kerja.
2. Setelah menginstal, pastikan aktivasi berjalan baik.



3. Dalam waktu yang singkat otomatis mesin proofing akan bekerja dan mengidentifikasi kesalahan eja.
4. Kesalahan eja dapat langsung diperbaiki jika dengan saran kata bagi office 2016.
5. Namun bagi office selain 2016 maka harus menggunakan sumber KBBI, PUEBI dan tata bahasa yang relevan untuk menyempurnakan kesalahan eja.

#### Bukti/evidence

1. Dalam menunjukkan adanya proses penggunaan proofing pada pengolahan tersebut maka dibutuhkan video singkat untuk tutorial dalam penggunaan risalah rapat sementara.
2. Dibutuhkan analisa hasil transkrip murni sebanyak 1 kaset yang berisi 8 halaman untuk mengidentifikasi berapa kesalahan rata rata setiap halaman.
3. Dibutuhkan risalah rapat sementara yang sudah dibuat risalah rapat sementara namun masih terdapat untuk melihat masih adakah kesalahan eja dalam risalah rapat yang sudah dilakukan.
4. Wawancara inez adhitya pambudi mengenai fitur proofing yang ia gunakan dan hijriatul mabruk.

#### Aksi selanjutnya

1. Tabel kegiatan dan uraian (sudah)
2. Bikin video (belum)]
3. Bikin wawancara (supaya bisa dijadikan tulisan) 3 orang. Inez, Hijri, Desy.
4. Bikin Pedoman
5. Bikin Infografis.

#### Pertanyaan Wawancara:

1. Pernahkah sebelumnya anda mengetahui tentang cara kerja proofing pada microsoft word?
2. Dalam melakukan pengolahan risalah rapat sementara apa kendala yang sering ditemui?
3. Menurut anda bagaimana alat/fitur proofing dalam kaitannya dengan pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara?
4. Menurut anda risalah rapat sementara yang seperti apa yang dikatakan baik secara kualitas?
5. Apakah anda mengetahui instalasi proofing?
6. Menurut anda seberapa penting proofing dalam pengolahan risalah rapat sementara?



Pedoman proofreading/penyuntingan dalam Pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara menggunakan fitur proofing pada microsoft word

1. Kaidah proofreading/penyuntingan Pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara
2. Pedoman instalasi proofing
3. Pedoman penggunaan proofing

## KASET 1

### PIMPINAN

Bapak ibu sekalian kita mulai rapat kita pada sore hari ini. Ada beberapa keadaan yang nanti akan menyusul termasuk kehadiran beberapa mentri tadi ada yang masih sholat dan juga nanti ada Komisi yang masih rapat intern sebentar, Cuma karena syarat rapat koordinasi ini harus dibuka oleh pimpinan dan kebetulan kami juga ada rapim menjawab surat presiden kemarin, pada hari ini. Jadi saya mohon ijin untuk kita buka saja nanti, kami persilahkan kepada pimpinan Komisi untuk menindak lanjuti ya. Sebagaimana mekanisme kita.

Baik bapak ibu sekalian.

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.**

Yang kami hormati saudara Mentri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, atau yang mewakili, mentri kesehatan Indonesia, mentri keuangan saya dengar sedang sholat, mentri sosial beserta jajaran dalam perjalanan, mentri perencanaan pembangunan, saudara ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional beserta jajaran, direktur utama BPJS yang hadir, pimpinan anggota Komisi IX dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama marilah kita bersyukur bisa hadir pada sore hari ini, dan berdasarkan laporan dari sekretariat jendral saat ini rapat gabungan Komisi IX dan Komisi XI dengan para mentri yang saya sebutkan tadi bersama anggota DPR telah dihadiri lebih dari separuh anggota fraksi-fraksi yang ada DPR saya melihat 8 dari 20 fraksi hadir menandatangani, dan dengan demikian kuorum telah tercapai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim perkenankan kami buka rapat gabungan ini.

#### (KETOK PALU 2X)

Selama datang bu Menteri.

Berdasarkan pasal 252 ayat 1 peraturan DPR tentang tatib kami ingin menanyakan apakah rapat gabungan ini kita nyatakan terbuka atau tertutup karena ini adalah rapat gabungan saya usulkan dari meja pimpinan untuk kita nyatakan terbuka ya. Setuju ya?

**(RAPAT:SETUJU)**

Bapak ibu sekalian agenda rapat hari ini adalah membahas mengenai tindak lanjut hasil audit dengan tujuan tertentu dana jaminan sosial kesehatan tahun 2018 oleh BPKP sesuai hasil kesimpulan rapat pada tanggal 27 mei 2019 yang lalu. Dan yang kedua adalah membahas mengenai grand desain serta peta jalan jaminan kesehatan nasional atau JKN 2019-2024 termasuk inovasi pembiayaan dalam jangka, dalam rangka menjamin keberlangsungan JKN. Jadi kira-kira 2 tema itu adlaah tema rapat kita hari ini ya. Kita setuju ya?

**(KETOK PALU 1X)**

Apak ibu sekalian sebelum melanjutkan agenda rapat gabungan Komisi pada hari ini dari meja pimpinan kami sudah lihat para pejabat hadir. Ya Menteri sosial on the way ya? Baik, rapat pada hari ini merupakan lanjutan dari rapat kerja Komisi IX DPR RI pada tanggal 27 mei 2019 dan rapat kerja Komisi XI DPR RI pada tanggal 21 agustus 2019. DPR memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan JKN selama kurun waktu 5 tahun ini terutama terkait mismatch atau defisit dana Jaminan Sosial. Permasalahan JKN yang dikelola BPJS Kesehatan ini bersifat multifaktorial sehingga perlu segera dilakukan perbaikan secara sistemik. DPR sejak tahun 2016 telah mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap sistem JKN dari hulu sampai ke hilir, pada akhir tahun 2018 dan awal tahun 2019 Menteri Keuangan meminta BPKP untuk melakukan audit terhadap keseluruhan perangkat JKN, terhadap hasil audit ini DPR telah mendesak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah percepatan perbaikan sitem JKN termasuk mempertimbangkan bauran kebijakan untuk dijadikan sebagai kebijakan permanen jangka panjang dalam rangka menekan defisit JKN serta mengkaji rasionalisasi antara manfaat yang seharusnya diterima peserta dengan biaya iuran yang dikeluarkan oleh peserta. Adapun pemutakhiran data kepesertaan dan data klising BPJS Kesehatan diberi waktu sampai tanggal 31 Juli 2019. Oleh karena itu DPR mengharapkan adanya pembahasan yang komprehensif terhadap keseluruhan permasalahan JKN termasuk laporan tindak lanjut atas hasil keismpulan rpaat kerja yang lalu serta pemaparan terkait grand desain JKN dan peta jalannya. Dengan harapan adanya kesepahaman tentang bagaimana kita menjaga kesinambungan program nasional ini yang merupakan pengwejahtahan dari amanat konstitusi dan undang-undang. Untuk itu kami mempersilahkan pada Menteri yang menjadi juru bicara nanti apakah sendiri-sendiri atau bersama-sama, maksudnya masing-masing. Dan saya mohon ijin karena melanjutkan program pimpinan, saya ingin menyerahkan kepada pimpinan komisi. Ibu



Saya kira di tata tertib jelas, rapat gabungan dipimpin oleh pimpinan DPR itu sudah dilakukan. Keabsahan forum rapat ini, instansi rapat ini adalah kuorum. Kuorum tadi sudah disebutkan bahwa sudah peserta yang hadir sudah melebihi 50%. Jadi tidak ada kuorum pimpinan, kuorum itu peserta. Oleh karena itu saya pikir jangan menunda lagi. Jangan skors. Kita mulai saja, toh mitra sudah lengkap. Makasih.

#### **FAHMI IDRIS DIRUT BPJS**

Baik, ijin pimpinan.

Saya baru membaca tatib kita ini pasal 235 ayat 3, disini jelas dibolehkan. Jaid memnag intinya kalo sudah dibuka oleh pimpinan DPR. Intinya kan pimpinan DPR membawahi beberapa Komisi-Komisi yang Kesra tadi, ini kan bagian Kesra. Jadi pak Faris sudah cukup mewakili. Pasal 235 bukan ayat 3 disini pak. Butir 3. Ya ini saya bacakan ini, "pimpinan gabungan Komisi terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih oleh anggota Komisi yang bersangkutan dari pimpina Komisi tersebut dalam rapat gabungan Komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR, nah kecuali bila Badan Musyawarah menentukan lain." Ini kan Badan Musyawarah nggak terlibat, berarti sudah dipimpin oleh wakil ketua DPR. Saya kira cukup ya? Lanjut ya? Lanjut. Terima kasih.

#### **PIMPINAN (DEWI ASMARA)**

Baiklah, tadi sebenarnya hanya tawaran saja sebagaimana sudah kami sampaikan bahwa rapat tetap bisa dilanjutkan karena memang sudah emenuhi tatib yang ada. Baiklah bapak ibu hadiin sekalian para mitra kerja dan rekan-rekan anggota Komisi XI dan IX DPR RI pada hari ini rapat kita adakan secara kusus menyangkut permasalahan dengan BPJS. Dan yang lebih khusus lagi adalah kita menginginkan rapat ini ada pendalaman dari hasil audit BPKP dimana kita telah mendesak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah percepatan perbaikan sistem JKN, termasuk mempertimbangkan bauran kebijakan untuk dijadikan sebagai kebijakan permanen ataupun jangka panjang. Dalma rangka menekan devisit JKN dan mengkaji rasionalisasi antara manfaat uyang seharusnya diterima peserta dengan biaya iuran yang dikeluarkan oleh peserta. Adapun untuk pemutakhiran data peserta dan data cleansing BPJS kesehatan diberi waktu sampai 30 Juli 2019. Oleh karenanya untuk pembahasan yang komprehensif ini saya langsung saja, dan untuk pertama kali kami mengharapkan terlebih dahulu agar para mitra kerja dan rekan-rekan di Komisi XI juga mendapat pemahaman yang lebih komprehensif, kami persilakan bagaimana tindak lanjut dari BPJS

terhadap hasil audit dari BPK tersebut, BPKP dan silakan untuk kami berikan kesempatan terlebih dahulu untuk memberikan paparannya. Dan ini kami berikan waktu sekitar 10 menit, kami persilakan pak.

**FAHMI IDRIS DIRUT BPJS**

Bissmillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati pimpinan rapat gabungan Komisi IX Komisi XI, anggota DPR Komisi IX Komisi XI.

Kalo boleh menyampaikan sedikit informasi ibu pimpinan kami internal pemerintah sudah rapat bersama yang untuk rapat gabungan hari ini sebenarnya paparan tunggal dari Menko PMK, apakah kami boleh seperti itu apa kami langsung teknis?

Silahkan saja pak, karena disini ada kehadiran dari rekan-rekan yang lain nanti setelah ini kami berikan kesempatan kepada paparan dari Menko PMK yang lebih mewakili untuk lebih melengkapi penjelasan bapak. Mungkin itu tentu kami berikan kesempatan pertama sengaja kepada BPJS, terima kasih.

**FAHMI IDRIS DIRUT BPJS**

Terima kasih bu pimpinan.

Baik tolong slide, sesuai dengan undangan dan notulen kesimpulan rapat kerja Komisi IX 27 mei ada berapa yang menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan dan kami akan, karena ini paparan kami siapkan mohon izin pimpinan, ibu bapak anggota dewan sebagai lanjutan dari penjelasan atau paparan umum dari ibu Menko PMK, jadi kami langsung masuk hal-hal teknis pendalaman terhadap apa yang di paparkan. Slide berikut, jad pertama terkait dengan cleansing data,

**ABIDIN**

Pimpinan interupsi sebentar sebelum dilanjutkan.

Bahannya bisa di copy? Yang dipaparkan. Mohon ijin pimpinan apakah bahan bisa dibagikan? Terima kasih.

4 **PIMPINAN (SALEH DAULAY)**

Ijin pimpinan.

BPJS belum memberikan data ya paparan? Nggak ini syaa tanya dulu ini jangan dijawab dulu kita tanya ke BPJSnya. Sudah ada nggak?

**FAHMI IDRIS DIRUT BPJS**

Sudah, saya sekretariat koordinasi. Sudah pak.

**AMSORI**

Pak Fahmi Idris tidak usah tegang, selow saja. Bisa-bisa saja calon Menkes itu.

**PIMPINAN (SALEH DAULAY)**

Yaudah ada ini bahannya dibagi dulu minta tolong sekretariat dibagi. Lanjut saja pak. Bisa dilanjutkan ya? Saya kembalikan pimpinan.

**PIMPINAN (DEWI ASMARA)**

Baik karena kementerian terkait lain sudah memberikan bahan, sembari berjalan bahan dari BPJS dibagikan kami persilahkan silakan lanjut pimpinan dari BPJS.

**FAHMI IDRIS DIRUT BPJS**

Baik terima kasih pimpinan.

Iya mohon maaf jadi sangat teknis karena flow nya tentunya kami tadinya di rapat Kementerian PMK paparan dulu dari bu Menko mulai kami masuk ke item-item yang ada. Jadi item pertama kami jelaskan adalah tentang cleansing data, temuan BPKP ada 27.443.550 jiwa record yang dengan berbagai variannya tidak ada NIK itu 27 juta sekiamn, NIK dengan karakter bukan huruf tapi angka 4.000 kemudian NIK ganda 10.000.000, kolom faskes kosong dan nama tidak lengkap kami sduah lakuakn cleansing sebanyak 16.789.000 record jadi masih ada sisa temuan BPKP 10.654.000 kami mengusulkan terhadap 10.000.000 ya record ini kepada kementerian sosial untuk melakukan evolusi dipercepat tahap kedua penggantian kepesertaan. Pemutakhiran data peserta hasil pemadanan dengan Dukcapil. Jadi itu yang kami sampaikan terkait yang cleansing data kemudian yang kedua next slide. Yang kedua haisl temuan BPKP ada badan usaha yang belum tertib, ini juga sama dengan BPJS kesehatan jadi BPKP mendapatkan jumlah badan usaha tersebut adalah 50.475 setelah akmi perdalam dari 50.475 badna usaha itu ternyata memang sudah



Dewi dan tetapi sebelum saya pergi karena ini adlaah sektor yang langsung dibawah koordinasi saya, bapak dan ibu sekalian kami punya pembahasan dan FGD serta catatan juga dari seluruh yang akan kita persoalkan itu, temuan kesekretariatan Kesra adlah pada data begitu. Jadi itu kata kuncinya, jadi kalo kita menyimpulkan kekacauan penyelenggaraan pemerintahan yang banyak kita temukan termasuk dari pemilu sampai pelayanan tekhnis itu ada pada tidak selesainya pemutakhiran dan single identiti number yang sudah kita rancang sejak pada awal masa pak SBY dulu. Tidak ada yang berani menuntaskan masalah ini. Dan ini menjadi masalah yang tidak berani di sentuh ya. Jadi selama single identity number kita tidak selesai maka human trafficking tidak bisa kita hentikan. Pelayanan terhadap pekerja imigran tidak bisa kita optimalkan, perdagangan manusia dimana-mana kita lihat, dasarnya adalah karena ketiadaan identitas manusia Indonesia yang tunggal termasuk dugaan penggelembungan angka pelayanan sampai 27,4 juta data PB itu juga dasarnya adalah ketiadaan apa namanya, identitas tunggal dari secara elektronik dari manusia Indonesia. Jadi saya menitip apa pesan kepada sebenarnya harus ada kementerian dalam negri dan Dukcapil disini karena saya tidak tahu di pemerintahan ini yang memegang otoritas data itu siapa, karena masing-masing punya data sendiri-sendiri. Nah inilah yang saya kira untuk kita berterus terang memikirkan bagaimana kita menuntaskan persoalan yang berulang-ulang yang ada didalam negara kita ini. Jadi kepada bapak Tubagus Ahmad Khusni dari Menko PMK, pak Agus Suprpto ini Deputy dua-duanya. Kemudain ibu Nila Muluk, kemudain ibu Sri Mulyani mentri keuangan, pak Agus gumiwang, pak Subandi dari deputy bidang pembangunan manusia di Bappenas, kemudain pak Fahmi Idris yang juga hadir saya kira. Kemudain pak Tugbaqus Ahmad Khusni ini dari DJSN serta dari Kemensos ini kebetulan pak Menteri diwakili oleh bapak Andi Dulung ya. Kami mohon agar bersama mitra-mitra Komisi yang ada yakni dituntaskan on the way Komisi XI akan hadir setelah rapat intern, oh sudah ada. Sudah ada pak Misbagon dan teman-teman. Mohon ini dibahas tuntas dan jika tmeuan kami di sekreariat kesra itu memang merupakan kenyataannya maka pemerintah perlu ada keberanian ya. Saya terus terang karena memperhatikan kasus E-KTP dari awal itu sumber ketidakberanian pemerintah. Tolong lah itu diselesaikan karena inilah bias dari seluruh penyelenggaraan pelayanan publik kita kedepan. Itu saja pak Saleh, terima kasih bapak ibu sekalian saya mohon ijin karena ini syarat untuk membuka rapat gabungan saya mohon ijin diteruskan. Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

**ABIDIN**

Mohon ijin pimpinan.

Mohon ijin ibu.

Terima kasih, sebelum dimulai mungkin perlu dikonfirmasi apakah pimpinan Komisi XI juga akan hadir? Terima kasih.

**PIMPINAN (DEWI ASMARA)**

Untuk sementara yang kami dapatkan informasi, sementara ini Komisi XI sebahagian masih rapat internal. Sehingga tentu kita mulai karena kita juga menghargai waktu daripada mitra kerja yang sudah kami undang pada hari ini secara bersama-sama oleh Komisi XI dan Komisi IX. Tentu beberapa rekan dari Komisi XI juga sudah nampak hadir di tengah kita. Sambil berjalan kehadirannya tentu nanti akan melengkapi kehadiran bapak ibu para anggota sekalian. Dengan demikian kiranya.

**AMSORI SIREGAR**

Pimpinan. Amsori Siregar.

Kita di Komisi IX sudah tidak bisa terhitung lagi membicarakan BPJS ini. Dan ini adalah rapat gabungan, kalo ketua Komisi atau pimpinan Komisi XI belum datang tolong salah satu orang atau mba Indah atau bapak Misbahun salah satu duduk disini karena kita rapat gabungan ini kita. Atau kalo nanti sudah ada pimpinannya baru bisa di ganti, karena kita rapat gabungan ini. Kalo bicara BPJS disini sudah dower mulut kita untuk bicara ini. Ini karena rapat gabungan in, terima kasih pimpinan.

**KOMISI IX (INDAH)**

Terima kasih pimpinan. Saya berharap pak Misbahkun bisa mewarnai didepan sana pak untuk mewakili Komisi XI, terima kasih pak Misbahkun.

**ABIDIN**

Mohon ijin pimpinan.

Tanpa menghormati pak Misbahkun dan mba Indah ini karena iya tanpa mengurangi rasa horamt gitu nanti ngga enak kalo melihatnya kalo pimpinan datang langsung pak Misbahkun pindah ke, pindah ke yang tempat duduk yang anggota. Jadi saya kira kehadiran dari pak Misbahkun dan mba Indah saya kira sudah cukup nanti kalo pimpinannya sudah

datang silahkan duduk didepan. Saya kira begitu pak Misbahkun ya. Terima kasih.

**KOMISI IX (INDAH)**

Iya terima kasih pak Abidin. Justru itu yang saya hindari saya tidak mau disuruh duduk terus disuruh berdiri lagi.

**AMSORI SIREGAR**

Pimpinan berarti jangan dimulai dulu sebelum ada yang duduk disitu dari Komisi XI. Karena ini kita sekali lagi rapat gabungan Komisi, antara Komisi XI dengan Komisi IX ini mitranya juga mentri Keuangan loh. Jadi mitra inilah yang di Komisi kita gitu loh. Jadi usul saya jangan dimulai sebelum ada pimpinan Komisi XI di depan kita begitu.

**NURMANSYAH TANJUNG**

Pimpinan, pimpinan. Kanan.

Saya rasa karena tadi sudah dibuka pimpinan dan kita sudah melalui prosedur tetap yang berlaku di sini jadi saya rasa sudah bisa dimulai. Jadi dimulai saja jangan kita membuang waktu jadi sambil ini berjalan kemudian nanti bisa dilengkapi pimpinan, silahkan. Terima kasih.

**PIMPINAN (SALEH DAULAY)**

**PIMPINAN (DEWI ASMARA)**

Baiklah hadirin sekalian pada mitra kerja dan rekan-rekan anggota Komisi XI dan XI kami mendapatkan kabar bahwa sebetulnya Komisi XI melakukan rapat internal antara kira-kira 5-10 menit lagi selesai. Dan memandang bahwa tadi rapat sudah dibuka oleh pimpinan DPR, dan menurut peraturan dan ketentuan tatib yang ada pada kami sebetulnya bisa kami lanjutkan, meskipun belum dihadiri karena toh akan menyusul karena tadi sudah dnegan resmi dibuka oleh pimpinan DPR namun tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat kami pada rekan-rekan saya mengusulkan bagaimana kalo kita skor sekitar 10 menit? Silahkan pak Ime?





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT KERJA KOMISI V DPR RI DENGAN BMKG, BASARNAS DAN  
BAPEL BPWS**

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari, Tanggal	: Rabu, 4 September 2019
Pukul	: 14.10 – 18.30 WIB
Sifat	: Terbuka
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Ketua Rapat	: Lasarus, S.Sos
Acara	Pembahasan RKA-K/L Nota Keuangan 2020
Sekretaris Rapat	:
Hadir	: Fraksi PDIP
	1. LASARUS, S.Sos
	2. Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si
	Fraksi P-GOLKAR
	3. Drs. HAMKA BACO KADY, MS
	Fraksi P-GERINDRA
	4. Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO
	Fraksi P-DEMOKRAT
	5. DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM
	6. Dr. Ir. BAHRUM DAIDO, M.Si.
	Fraksi PKB
	7. NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I.
Anggota yang izin Undangan	: 1. Sestama BMKG 2. Sestama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) 3. Deputi Bapel BPWS

**Jalannya Rapat:**  
**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

**Sestama BMKG, Sestama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau yang mewakili, dan Deputi Perencanaan Bapel BPWS beserta jajaran.**

**Serta para hadirin yang kami muliakan.**

Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita pada siang hari ini dapat melaksanakan rapat sesuai dengan undangan yang telah kami sampaikan. Telah hadir dan menandatangani absen 11 anggota dari 6 fraksi yang berbeda, jadi sesuai dengan tatib ini sudah kuorum Fraksi Pak, kita sudah bisa melaksanakan dan mudah-mudahan nanti sambil berjalan anggota akan terus bertambah pada saat kita pengambilan keputusan.

Oleh karenanya sesuai dengan Pasal 251 Peraturan DPR RI Tentang Tata Tertib saya membuka rapat pada hari ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 246 Ayat (1) Rapat Dengar Pendapat ini saya nyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.10 WIB)**

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Sestama BMKG, Sestama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Deputi Perencanaan Bapel BPWS beserta jajaran yang telah memenuhi undangan kami dalam Rapat Dengar Pendapat pada hari ini.

Commented [K1]: Seharusnya, Perencanaan

Teman-teman sekalian harusnya rapat ini dihadiri oleh Sestama dari Basarnas namun diwakilkan oleh Deputi Operasi karena Sestama Basarnas sedang mengikuti PIM I dan melaksanakan pendidikan kepemimpinannya PIM I dan memenuhi surat kepada kita dengan Nomor B/2984/KS.01.05/IXBSN-2019. Surat ini ditandatangani langsung oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Bapak Bagus Puruhito (Marsekal Madya TNI). Saya minta persetujuan teman-teman dahulu untuk hal ini, Pak Sestama Basarnas diwakili oleh Deputi Operasi dari Basarnas. Setuju ya? Ya silakan Pak Jhoni.

**F-P DEMOKRAT (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM):**

Pimpinan, setuju saja. Tapi kalau saya lihat ini penyajian dari Basarnas ini tidak memenuhi standar ini. Karena ini sudah masuk kepada kita **Eselon I**,

Commented [K2]: TIDAK DIPISAH



Eselon II ini kan. Coba dilihat ini, jadi saya kira sekaligus saja, enggak ada bisa dibahas ini. Bukan, bukan Badan Meteorologi, *sorry*.

**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Nanti BMKG, ini Basarnas dulu.

**F-P DEMOKRAT (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM):**

Oiya silakan ya.

Commented [K3]: IDEM

**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Ini lanjut ya? Basarnas ya? Baik, saya ketok dahulu ya.

**(RAPAT : DISETUJUI)**

Terima kasih atas persetujuannya.

Bapak/Ibu sekalian, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Bapel BPWS pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 yang lalu telah disepakati sebagai berikut:

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Bapel BPWS terhadap alokasi anggaran dalam RAPBN Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
  - BMKG Pagu Kebutuhan Rp. 3.860.788.842.000,-. Nota Keuangan RAPBN Tahun 2020 Rp. 3.056.259.932.000,-. Ada kekurangan Rp. 804.528.910.000,-.
  - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Pagu Kebutuhan Rp. 4.657.803.455.000,-. Nota Keuangan RAPBN Tahun 2020 Rp. 2.253.647.651.000,-. Ada kekurangan (*backlog*) Rp. 2.404.155.484.000,-.
  - Bapel BPWS Pagu Kebutuhan Rp. 317.000.000.000,-. Nota Keuangan RAPBN Tahun 2020 Rp. 215.921.503.000,-. Ada kekurangan Rp. 101.078.497.000,-.



Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Bapel BPWS akan memperjuangkan kekurangan anggaran sesuai dengan Pagu Anggaran Kebutuhan melalui mekanisme pembahasan RUU Tentang APBN di DPR RI.

2. Poin berikutnya Komisi V DPR RI dan BMKG, Basarnas, Bapel BPWS sepakat bahwa program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat pada umumnya serta program-program yang sangat dibutuhkan di kabupaten/kota tertentu akan disesuaikan dengan saran, pencapat dan usulan Komisi V DPR RI sebagaimana yang disampaikan dalam rangkaian rapat pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun 2020 serta disesuaikan dengan hasil pembahasan alokasi anggaran untuk fungsi dan program masing-masing Unit Eselon I dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2020 pada Rapat Dengar Pendapat mendatang.

Terkait dengan hasil keputusan atau kesimpulan dalam RDP tersebut, dalam kesempatan ini kami ingin mendapatkan penjelasan dari Saudara Sestama EMKG dan Sestama Basarnas atau yang mewakili, serta Deputi Perencanaan Bapel BPWS. Sejauh mana saran dan pendapat dan usulan Anggota Komisi V DPR RI sebagaimana yang telah disampaikan pada saat rapat sebelumnya, dapat diakomodir dalam rincian program RAPBN Tahun 2020. Oleh karena itu kami persilakan kepada Saudara Sestama BMKG, pertama Pak untuk menyampaikan apakah pendapat, saran atau ada informasi-informasi lain terkait dengan penganggaran ditahun 2020. Saya persilakan Sestama BMKG untuk menyampaikan pemaparan, nanti selanjutnya ke Basarnas atau Sestama Basarnas atau yang mewakili dan terakhir dari Bapel BPWS. Saya persilakan Pak Sestama BMKG.

Commented [K4]: TIDAK DIPISAH

**SESTAMA BMKG (Ir. DWI BUDI SUTRISNO, M.Sc):**

Baik, terima kasih Bapak Ketua.

*Bismillahirrohmanirrohim.*

***Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.***

**Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.**

***Om swastiastu.***

***Namo Buddhaya.***

**Salam Kebajikan.**



**Yang terhormat Bapak Ketua, Para Wakil Ketua, dan Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati.**

**Yang terhormat Deputi Operasi Basarnas, Pak Deputi Perencanaan Bapel BPWS, Bapak Deputi di BMKG.**

**Dan hadirin sekalian yang saya hormati.**

Pertama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan acara utama adalah pembahasan rincian program untuk fungsi dan program masing-masing unit Eselon I dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2020.

**Bapak Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi V DPR yang saya hormati.**

Lanjut, dalam *outline* pertama kami mau melaporkan mengenai realisasi anggaran Tahun 2019. Kemudian dasar penyusunan RKA-K/L BMKG Tahun 2020. Dan ketiga adalah RKA BMKG Pagu Anggaran Nota Keuangan Tahun 2020 berupa rincian RKA BMKG Tahun 2020, kemudian prioritas nasional, prioritas lembaga dan penutup kesimpulan. Lanjut.

Pertama, kami untuk realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019, realisasi sejumlah.

**KETUA (Ir. FARY DJEMY FRANCIS, MMA):**

Pak Sestama.

**SESTAMA BMKG (Ir. DWI BUDI SUTRISNO, M.Sc):**

Baik Pak silakan.

**KETUA (Ir. FARY DJEMY FRANCIS, MMA):**

Yang pertama begini Pak, sebagaimana dengan Rapat Dengar Pendapat kita dengan Kepala BMKG, Basarnas dan BPWS, dalam presentasi kali ini jadi Bapak, kan kita kan kita sudah ikuti yang berulang-ulang Pak. BMKG kan itu kan dapat tambahan, tambahannya kurang lebih berapa, saya lupa-lupa



ingat, dari rapat kita terakhir itu terus ada penambahan berapa tuh Pak? Ya, satu koma? Ya kurang lebih itu, nah itu 1,04 itu mau dialokasin untuk apa Pak? Kan gitu. Yang kemarin kan kita sudah bahas itu yang pertama, usulan pertama dua koma sekian ya? Begitu Pak ya. Terus kemudian ada penambahan nah itu Bapak fokus disitu saja yang tentang realisasi keuangan dan sebagainya sudah ada disini, enggak usah lagi kalau saya bilang terus dari itu.

Terus yang kedua itu beberapa catatan-catatan dari anggota untuk usul saran untuk program-program yang disampaikan itu bagaimana Pak? Itu saja, yang lain kan kita bisa baca ini Pak. Jadi bisa dipahami Pak ya, alur itu yang kemarin kita sepakati. Alurnya bahwa kalau ada penambahan yang penambahan anggaran itu dibuat apa? Terus yang kedua bagaimana usul saran dari para anggota? Itu saja yang kita bahas nanti baru kita serahkan ke anggota lagi. Jadi enggak usah presentasi ini Pak, ini kan sudah kita baca nih. Silakan Pak, saya kembalikan Pak.

**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Silakan dilanjut Pak.

**SESTAMA BMKG (Ir. DWI BUDI SUTRISNO, M.Sc):**

Baik Pak. Untuk tahun anggaran 2020 sebagaimana kita ketahui bersama, kita mendapat tambahan anggaran dari Pagu Indikatif dari semula sekitar 2 Triliun menjadi sekitar 3 Triliun Pak. Jadi ada penambahan sekitar 1 setengah.

**KETUA (Ir. FARY DJEMY FRANCIS, MMA):**

Jadi jangan pakai sekitar Pak. Harus *fix* berapa itu Pak. Yang penting kita punya kesimpulannya Pak.

**SESTAMA BMKG (Ir. DWI BUDI SUTRISNO, M.Sc):**

Baik Pak, jadi kita mendapatkan penambahan sekitar Rp. 1.014.000.990.000,- yang digunakan untuk meningkatkan kepadatan jaringan *Alapama Ignatius* 2019 dan 2020. Kemudian keselamatan penerbangan dan perubahan iklim. Sehingga dari semula Pagu Indikatif BMKG sebesar Rp. 2.040.169.932.000 menjadi Rp. 3.056.259.932.000,-. Jadi intinya bahwa

Commented [K5]: TIDAK DI PISAH

Commented [K6]: TIDAK MIRING KARENA KATA TIDAK BAKU

Commented [K7]: TIDAK MIRING



tambahan itu digunakan untuk meningkatkan kerapatan jaringan *Alapama* Pak, Alat Operasi Utama *Ignatius* untuk peringatan dini tsunami Pak dan juga untuk keselamatan penerbangan dan perubahan iklim.

Demikian kami sampaikan Pak.

**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Baik, itu saja Pak ya? Baik. Sebentar-sebentar. Cukup Pak ya.

Ya baik terima kasih. Apa kita selesaikan saja dahulu semua Bang, supaya kita singkat waktu habis itu nanti kita tanggapikan sekaligus semua. Ya silakan Pak Sestama Basarnas. Coba itu, audionya Mas, audionya mati itu, tolong .

**DIREKTUR OPERASI BASARNAS (Brigjen TNI (Mar) BUDI PURNOMO, S.I.P, M. Agr):**

*Bismillahirrohmanirrohim.*

Yang terhormat Ketua Komisi V DPR RI selaku Pimpinan Rapat.

Yang saya hormati Para Wakil Ketua, Para Anggota Komisi V DPR RI.

Yang saya hormati Sestama BMKG, Deputy Perencanaan Badan Pelaksana Badan Pembangunan Wilayah Suramadu.

Serta hadirin yang berbahagia.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Basarnas untuk menyampaikan penjelasan dan pembahasan rincian program, fungsi dan program masing-masing unit Eselon I Kementerian/Lembaga dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2020.



Kita langsung saja ke anggaran yang 2020. Rencana penggunaan pagu anggaran per program tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut, saya ulangi untuk tahun anggaran 2020 Basarnas telah mengusulkan Pagu Kebutuhan sebesar 4,65 Triliun dengan rincian sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya sebesar 700,70 Miliar.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Basarnas sebesar 377,17 Miliar.
3. Program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan sebesar 3,57 Triliun.

Dari Pagu Kebutuhan sebesar 4,65 Triliun tersebut diperoleh pagu anggaran sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas) tanggal 22 Juli 2019 sebesar 2,25 Triliun. Rincian pagu anggaran tersebut terprogram sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya sebesar 602,76 Miliar.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Basarnas sebesar 145,09 Miliar.
3. Program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan sebesar 1,50 Triliun.

Dengan demikian terdapat potensi kekurangan anggaran (*backlog*) sebesar 2,4 Triliun dengan rincian kekurangan anggaran per program sebagai berikut:

1. *Backlog* pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya sebesar 97,93 Miliar.
2. *Backlog* pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Basarnas sebesar 232,07 Miliar.
3. *Backlog* pada program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan sebesar 2,07 Triliun.

**Ketua, Para Wakil Ketua dan Para Anggota Komisi V yang saya hormati.**

Rencana penggunaan pagu anggaran program tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar 602,76 Miliar yang akan digunakan antara lain:

Commented [K8]: TIDAK DIPISAH

Commented [K9]: TIDAK BAKU

Commented [K10]: TIDAK BAKU

Commented [K11]:



- 1) Untuk penyusunan rencana program, evaluasi pelaporan dan kerjasama.
- 2) Penyusunan produk hukum, organisasi, tata laksana dan pengelolaan kepegawaian termasuk didalamnya reformasi birokrasi dan pengembangan organisasi.
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan, kehumasan, dan protokol termasuk didalamnya pembayaran gaji dan tunjangan.
- 4) Pengelolaan data dan sistem informasi dan pengawasan dan pembinaan internal.

Rencana alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah sebagaimana pada tabel paparan tersebut.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Basarnas sebesar 145,09 Miliar yang antara lain akan digunakan sebagai berikut:

- 1) Pengadaan dan pembangunan prasarana kantor yang antara lain berupa perluasan lahan-lahan dikantor pencarian dan pertolongan Pangkal Pinang, Palembang, Banjarmasin, Kendari dan Banten.
- 2) Pembangunan gedung siaga dan gedung operasional di kantor pencarian dan pertolongan Banda Aceh, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Natuna, dan Maumere.
- 3) Pembangunan gudang di kantor pencarian dan pertolongan Mataram, Kupang, Palu dan Mentawai.
- 4) Pengadaan sarana kantor yang antara lain berupa kendaraan operasional, meubelair dan AC.
- 5) Pengadaan peralatan kantor yang antara lain berupa komputer, printer dan perlengkapan kantor lainnya.

Rencana alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah sebagaimana pada tabel yang ada di slide.

3. Program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan sebesar 1,50 Triliun yang akan digunakan untuk:

- 1) Pengelolaan operasi SAR.
- 2) Pengelolaan kesiapsiagaan SAR.
- 3) Pengelolaan sarana dan prasarana SAR.
- 4) Pengelolaan sistem komunikasi SAR.
- 5) Pengelolaan diklat dan pembinaan tenaga SAR serta pembinaan potensi SAR.

Dari keseluruhan pagu anggaran program pencarian, pertolongan dan penyelamatan sebesar 1,50 Triliun terdapat kegiatan prioritas nasional dengan

Commented [K12]: SEHARUSNYA DIPISAH

Commented [K13]: TIDAK DIPISAH

Commented [K14]: IDEM

Commented [K15]: SEHARUSNYA DPISAH

Commented [K16]: KATA ASING MIRING

Commented [K17]: SINGKATAN ASING MIRING

Commented [K18]: KATA ASING MIRING



anggaran sebesar 906,07 Miliar. Rincian kegiatan prioritas nasional tersebut terdiri dari:

1. Pengelolaan sarana dan prasarana SAR, meliputi:
  - 1) Pengadaan helikopter *medium intermediate multiyears*.
  - 2) Pengadaan *rescue boat* 66 meter, *multiyears*.
  - 3) Pengadaan *rescue boat aluminium* 40 meter.
  - 4) Pengadaan *rigid inflatable boat* untuk 20 kantor pencarian dan pertolongan.
  - 5) Pengadaan 100 set *rubber boat* untuk kantor pencarian dan pertolongan.
  - 6) Pengadaan *rescue car* untuk 38 kantor pencarian dan pertolongan.
  - 7) Pengadaan *rescue truck* untuk 38 kantor pencarian dan pertolongan.
  - 8) Pembangunan prasarana SAR di 8 lokasi, yaitu kantor pencarian dan pertolongan Tanjung Pinang, Palembang, Bandung, Yogyakarta, Pontianak, Jayapura, Timika dan Tarakan.
2. Pembinaan potensi SAR pada tahun anggaran 2020, pembinaan potensi pencarian dan pertolongan akan dilaksanakan di 43 kantor SAR dengan target 10 ribu orang.
3. Pengelolaan operasi SAR. Anggaran kegiatan prioritas nasional ini akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan operasi SAR terhadap kecelakaan, bencana dan atau kondisi yang membahayakan jiwa manusia.
4. Pengelolaan sistem komunikasi SAR. Pada tahun anggaran 2020 akan dilaksanakan pengadaan peralatan komunikasi SAR berupa *bus communication system* SAR untuk melengkapi peralatan dasar komunikasi di 4 lokasi kantor pencarian dan pertolongan yang baru.

Disamping kegiatan prioritas nasional diatas pada program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan Basarnas juga memperoleh pagu anggaran sebesar 599,71 Miliar untuk membiayai kegiatan selain prioritas nasional. Kegiatan tersebut antara lain terdiri dari:

1. Pengelolaan operasi SAR antara lain terdiri dari
  - 1) Pertemuan internasional.
  - 2) Perencanaan dan standarisasi operasi SAR.
2. Pengelolaan kesiapsiagaan SAR.
  - 1) Siaga rutin BCC kantor SAR dan pos SAR.

Commented [K19]: DIPISAH

Commented [K20]: DIPISAH

- 2) Siaga khusus Lebaran, Natal dan Tahun Baru serta PON Papua 2020.
- 3) Latihan SAR didalam negeri dan SAR internasional, baik itu AUSINDO, MALINDO, MARPOLEX, maupun INDOPURA.
3. Pengelolaan sarana dan prasarana SAR berupa pemeliharaan sarana dan prasarana SAR.
4. Pengelolaan sistem komunikasi SAR.
  - 1) Pengadaan peralatan komunikasi.
  - 2) Pemeliharaan peralatan komunikasi, termasuk LUT.
  - 3) Kegiatan Cospas-Sarsat.
5. **Pengelolaan** diklat dan pembinaan tenaga SAR, yaitu:
  - 1) Pembentukan politeknik SAR.
  - 2) Diklat teknik substantif SAR.
  - 3) Pengawasan alat Basarnas, diantaranya helikopter dan *rescue boat*.

Commented [K21]: TYPO SEHARUSNYA PENGELOLAAN

**Ketua, Para Wakil Ketua dan Para Anggota Komisi V yang saya hormati.**

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan pada rapat pembahasan rincian program untuk fungsi dan program masing-masing unit Eselon I Kementerian/Lembaga dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2020. Dan mohon dukungan dari Pimpinan serta seluruh Anggota Komisi V DPR RI agar anggaran Basarnas dapat terpenuhi sesuai dengan rencana kebutuhan kita.

Demikian yang saya sampaikan, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.

***Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Terima kasih.



Yang mewakili Sestama Basarnas, sekarang saya persilakan Pak Deputi Perencanaan Bapel BPWS. Silakan Pak.

**DEPUTI PERENCANAAN BAPEL BPWS (Dr. Ir. AGUS WAHYUDI, SE, MM):**

*Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

**Pimpinan Komisi V DPR RI, Wakil Ketua Komisi V DPR RI.**

**Yang terhormat para Anggota Komisi V DPR RI.**

Pertama kami sampaikan terima kasih dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan rincian daripada anggaran tahun 2020. Seperti yang tadi sudah dipaparkan bahwa anggaran Badan Pelaksana BPWS Tahun 2020 pagu anggarannya berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2020 adalah sebesar 215.921.503.000 dari kebutuhan yang kita pernah sampaikan sebesar 317. Miliar. Jadi masih ada kekurangan sebesar 100.078.497.000. Adanya perubahan-perubahan **didalam** program BPWS yang pertama ada perubahan usulan dari Gubernur Jawa Timur kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 21 Juni 2019. Kemudian ada rapat terbatas di kantor Kemenko Bidang Perekonomian tanggal 17 Juni 2019. Ini ada salah satu rapat yang menetapkan atau menyampaikan suatu usulan penambahan lingkup tugas dan wilayah BPWS sehingga ini berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran. Kemudian untuk usulan alokasi yaitu kurang 101 Miliar ini sebenarnya dari usulan kami semula 315 ribu dengan pagu 215 kami mengurangi target pengadaan lahan kurang lebih empat koma hektar. Sehingga jika nanti kita Badan Pelaksana BPWS akan mendapat dukungan dari Komisi V DPR RI maka usulan yang target semula itu akan kita naikan lagi.

Kemudian usulan perubahan alokasi belanja rincian atau dan usulan perubahan alokasi anggaran BPWS tahun anggaran kami sampaikan seperti berikut dengan pagu anggaran 215.921.503.000 itu terdiri dari Badan Pelaksana BPWS itu ada dua program yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan program percepatan pembangunan wilayah Suramadu.

Dalam program dukungan **managemen** dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ini ada satu kegiatan yaitu dukungan **managemen** internal terdiri dari gaji pegawai, operasional kantor dan peralatan dan dukungan **managemen**. Besarnya pagu anggaran adalah 27.455.099.000 atau kurang lebih 12,72% dari pagu anggaran total. Nah ini karena ada perubahan dari penetapan Menteri Keuangan tanggal 5 Juli 2019 mengenai satuan biaya masukan, kemudian ada

Commented [K22]: DIPISAH

Commented [K23]: TIPO

Commented [K24]: TYPO

Commented [K25]: TYPO



catatan dari opini BPK, kemudian juga bahwa dengan pertimbangan bahwa honorium diterima oleh karyawan yang terendah di BPWS itu masih dibawah UMR Kota Surabaya. Nah ini itu yang kita mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan kemudian keluarlah atau terbitlah Surat Menteri Keuangan Nomor 515/PMK.02/2019 itu.

Perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut yang untuk gaji pegawai yang semula 10.809.761.000 itu menjadi setelah perubahan menjadi 13.162.980.000 sehingga ada selisih 2.353.219.000. Disini juga karena ada 2020 itu kita alokasikan kalau Kepala Badan Pelaksana BPWS didefinitif itu sudah terbit Pak segmen wakil kepalanya. Sehingga gaji dari kepala juga harus kita alokasikan sehingga ada kenaikan disitu.

Kemudian yang kedua operasional kantor dan peralatan, ini kita kurangi dari semula 12.272.462.000 menjadi 10.482.345.000 sehingga ada pengurangan 1.790.117.000. Dan dukungan manajemen yang semula 4.372.876.000 menjadi 3.809.774.000 atau ada penurunan 563.102.000. Sehingga kalau ditambah antara operasional dan kantor peralatan dengan dua manajemen ini jumlahnya sama yaitu 2.353.219.000 jadi tidak mengurangi atau pun tidak mengambil alokasi kekurangannya itu dari program yang lain.

Kemudian yang kedua, program percepatan pembangunan wilayah ini semula adalah 188.466.404.000 masih tetap jumlahnya 188.466.404.000. Tapi dalam perinciannya yaitu perencanaan pengembangan itu ada perencanaan program dan investasi yang semula 7.270.000.000 itu menjadi 10.540.000.000 sehingga ada kenaikan 3.275.000.000. Ini juga karena ada mendukung beberapa usulan dari Gubernur Jawa Timur antara lain. Nah kekurangan itu kita kurangi kita ambil dari design teknis kawasan supervisi yang semula 3.500.000.000 menjadi 3 Miliar, sehingga masih ada kelebihan 500 Juta. Dan dari kegiatan yang ketiga yaitu pengendalian pengembangan wilayah Suramadu semula 175.696.404.000 diusulkan penyesuaian ini tetap sama tetapi perinciannya untuk pengadaan lahan yang semula 103.696.404.000 menjadi 100.921.404.000, disini ada kelebihan 2.775.000.000. Ini yang kita pergunakan untuk mengurangi atau untuk mengalokasikan anggaran di perencanaan dan program sebesar 3.275.000.000. Jadi 500 Juta tadi dari design teknis kawasan supervisi dan 2.775.000.000 ini kalau dijumlah sama dengan 3.275.000.000.

Kemudian perincian alokasi anggaran ini semula program alokasi belanja pada RKA-K/L itu jenis belanjanya adalah untuk program manajemen 27.455.095.000 terdiri dari belanja pegawai tadi 10.809.761.000, belanja barang operasional 12.272.462.000 dan non operasional 3.908.365.000 dan belanja modal 464.500.000. Dan usulan untuk kebutuhan ini setelah ada perubahan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan tanggal 5 Juli 2019 belanja pegawai menjadi 13.162.980.000, kemudian belanja barang dari operasional menjadi 10.482.345.000 dan non operasional 3.345.240.000 dan belanja modal

Commented [K26]: TYPO

Commented [K27]: DIPENGGAL

Commented [K28]: TYPO

Commented [K29]: TYPO

Commented [K30]: TYPO

Commented [K31]: TYPO

Commented [K32]: TYPO

Commented [K33]: TIDAK BAKU

Commented [K34]: TYPO

Commented [K35]: DIPISAH

Commented [K36]: TYPO



tetap. Sehingga kekurangan 202.353.000.000 dengan adanya perubahan anggaran di dukungan **managemen** ini itu teratasi dengan pengurangan belanja operasional dan non operasional senilai 2.363.219.000.

Kemudian kegiatan-kegiatan yang kita pergunakan sebagai pendukung usulan perubahan itu kegiatan perencanaan program dan investasi. Ini semula adalah 7,27 Miliar ini menjadi 10,54 Miliar sehingga terdapat penambahan alokasi 3,27 Miliar ini digunakan untuk penyiapan *review* rencana induk BPWS. Karena dengan adanya penambahan tugas atau perubahan tugas Badan Pelaksana BPWS ini rencana induk ini kita *review* kembali. Karena ada beberapa usulan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur. Kemudian dipergunakan juga untuk *study final business case* dan untuk studi mengenai transaksi dalam rangka memenuhi persyaratan untuk **kerjasama** pemerintah badan usaha yang ini merupakan bahan untuk pelelangan untuk mendapatkan investor **didalam kerjasama** dalam bentuk KPBU.

Kemudian *design* teknis dan supervisi mengalami pergeseran yang semula 3,5 Miliar menjadi 3 Miliar tadi sudah kita sampaikan, 500 Juta ini kita pergunakan untuk kegiatan belanja program dan investasi. Sedangkan **dikegiatan** pengendalian yang tadinya pengadaan atau pembebasan lahan semula 103,69 Miliar menjadi 100,92 Miliar ini terdapat pengurangan 2,77 Miliar ini selisih alokasi tersebut untuk menambah kekurangan alokasi program kegiatan perencanaan dan program tadi sudah kami sampaikan. Lanjut.

Rincian daripada penganggaran untuk tahun 2020 sebenarnya ini sudah disampaikan terlebih dahulu strukturnya, kita lanjut ke *slide* 10 saja. Untuk target pengembangan investasi Suramadu tahun 2020 ini ada dua kawasan yang menjadi tugas BPWS. Semula yang tadinya sebelum ada perubahan penugasan dalam perpres yaitu *final business case* dan transaksi lelang untuk kawasan wisata pesisir seluas 50 hektar. Kemudian **kerjasama** pengelolaan aset, untuk **kerjasama** pengelolaan aset yang sekarang sudah kami bangun disana dengan BUMD Kabupaten Bangkalan. Dan **kerjasama** aset sistem penyediaan air yang sudah kami bangun juga dengan PDAM Kabupaten Bangkalan. Kemudian yang **dikawasan** khusus Madura dipersiapkan terlebih dahulu studi pendahuluan tentang **kerjasama** pemerintah badan usaha untuk kawasan khusus yang seluas 60 hektar untuk kawasan industri.

Kemudian *output* dan target daripada kegiatan prioritas tahun anggaran 2020 ini adalah untuk **mensejahterakan** kawasan lokasinya nanti akan diperuntukkan untuk kawasan industri untuk mengembangkan industri yang berbasis kondisi lokal masyarakat di kawasan khusus Madura. Ini sesuai dengan mendukung juga usulan dari Gubernur Jawa Timur kepada presiden dalam rapat terbatas.

Commented [K37]: TYPO

Commented [K38]: DIPISAH

Commented [K39]: DIPISAH

Commented [K40]: DIPISAH

Commented [K41]: SEHARUSNYA DIPISAH

Commented [K42]: DIPISAH

Commented [K43]: IDEM

Commented [K44]: IDEM

Commented [K45]: IDEM

Commented [K46]: IDEM

Commented [K47]: TIDAK BAKU



Kemudian pengembangan prasarana permukiman air minum ini lokasi ini Kabupaten Bangkalan dengan kapasitas 20 liter per detik. Dan peningkatan infrastruktur jalan lokasinya itu di Bangkalan dan Sampang, Pamekasan dan Sumenep iri sepanjang kurang lebih 22,80 kilometer. Dan yang terakhir untuk pengembangan SDM Madura untuk peningkatan kompetensi ini di Kabupaten Bangkalan dan Pamekasan sebanyak 250 orang.

Kemudian pengadaan lahan yang tadi sudah kami sampaikan, luas lahan total kawasan industri itu yang kami rencanakan dengan yang tercakup dalam tugas Badan Pelaksana BPWS. Luas lahan total kawasan industri yang (suara tidak jelas) itu seluruhnya kita alokasikan 363 hektar.

**(KASET 1 HABIS)**

**DEPUTI PERENCANAAN BAPEL BPWS (Dr. Ir. AGUS WAHYUDI, SE, MM):**

Kita rencanakan baru akan terbebaskan 50 hektar sesuai dengan anggaran yang ada. Sehingga masih ada kekurangan target 2020 sebanyak 45 hektar sehingga apabila mendapat dukungan ataupun mendapat tambahan dari kekurangan anggaran yang dibutuhkan di 2020 itu kita pergunakan untuk menambah pengadaan lahan seluas 45 hektar tadi dan juga untuk mendukung perubahan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur.

Kemudian 2019 ini sudah dilakukan penlok atau penetapan lokasi di Provinsi Jawa Timur. Berikutnya untuk pembangunan jalan akses wisata pesisir yaitu seperti digambar ini disebelah kanan, itu sisi timur itu yang seluas kurang lebih 30 hektar itu sudah dibebaskan itu ditargetkan untuk dikerjasamakan dengan pihak lain, dengan pola KPBU. Dan juga dipesisir di tepi pantai itu di 2019 ini dibebaskan kurang lebih 7-8 hektar. Disitulah perlu adanya akses jalan antara dua area itu yang 30 hektar dan yang 8 hektar ini. Itu dibangun kurang lebih 900 meter dengan anggaran 2,7 Miliar.

Sedangkan program yang lain yaitu untuk prioritas stimulasi itu di kabupaten dikawasan khusus Madura, untuk rencana pembangunan industri pengadaan lahan tadi sudah kami sebut. Dan juga di Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura atau KKJSM untuk perencanaan pembangunan Indonesia Islam Sains Park mendukung gagasan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur. Tadi sudah kami sampaikan pembangunan jalan akses kurang lebih 900 meter sebesar 2,7 Miliar.

Kemudian untuk kabupaten yang lain Kabupaten Sampang ini ada akses jalan juga 2,5 kilometer dengan anggaran 5,4 Miliar. Dan juga untuk perencanaan pengembangan pariwisata dan industri garam yang termasuk

Commented [K48]: DIPENGGAL

Commented [K49]: DIPENGGAL

Commented [K50]: SPASI

Commented [K51]: DIPENGGAL

Commented [K52]: DIPENGGAL



salah satunya adalah usulan daripada Gubernur Jawa Timur kepada presiden waktu di ratas. Sehingga kami perlu mempersiapkan dukungannya untuk pengembangan industri pariwisata dan industri garam tersebut.

Kemudian di Kabupaten Sumenep ini juga sama antara lain ya itu termasuk pengembangan industri garam dan di Pamekasan ada perencanaan pengembangan industri gula. Ini semua merupakan gagasan atau tambahan tugas dari BPWS yang nantinya akan diterbitkan dalam perpres.

Kemudian untuk pengembangan SDM lokal yang tadi kami sampaikan 250 orang dengan alokasi 1,8 Miliar ini, ini akan meliputi pengembangan kompetensi SDM Madura untuk menyiapkan tenaga kerja industri manufaktur yang saya kira kalau, jika industri sudah terbentuk atau terbangun maka tenaga kerja yang siap di Madura itu bisa dimanfaatkan. Ini kurang lebih 40 orang. Kemudian untuk kepariwisataan ini juga 40 orang. Kemudian untuk urusan teknik pemasaran (suara tidak jelas) usaha mikro karena disana banyak PKL jadi kurang lebih 5 orang. Dan untuk pelatihan ekonomi kreatif teknologi pemasaran modern tepat guna ini 120 orang.

Demikian Bapak Pimpinan Komisi V DPR RI, Para Anggota Komisi V DPR RI perincian dari program Badan Pelaksana BPWS tahun 2020 dengan permohonan mendapat dukungan dari Komisi V dan Para Anggota Komisi V yang terhormat.

***Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

***Waalaikumsalam warrahmatullahi wabarakatuh.***

Saya langsung saja Pak, ke anggota untuk menanggapi apa yang sudah dipaparkan tadi. Saya persilakan Pak Jhoni Allen.

**F-P DEMOKRAT (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM):**

Ya Pimpinan. Saya mau pertegas, ini kita kan bicara rincian kegiatan per Eselon I ya, nah dari tiga mitra kerja ini secara umum saya katakan kita harus dukung. Tetapi kita mendukung dan ini kan kita harus paham dan mengerti. Nah dari tiga paparan ini saya kira begitu dibaca yang nyambung dan bisa

**Commented [K53]:** KATA TIDAK BAKU SEHARUSNYA MIRING



dilihat oleh katakanlah itu hanya adalah Suramadu. Dari halaman pertama sampai halaman terakhir, coba ya, sehingga Suramadu saya kira memang walaupun secara anggaran dan organisasinya jauh lebih kecil dari dua lembaga badan ini. Tetapi bukan besar atau kecil menjadi sulit.

Oke saya akan balik tanya kepada katakanlah BMKG, yang tadi mengatakan rincian kegiatan per Eselon I dimana Bapak tunjukkan saya coba, tunjukkan disitu dengan anggaran dan kegiatannya dan di *slide* mana dari paparan Bapak ini? Tunjukkan kepada saya, di *slide* mana Bapak tunjukkan, per deputi dan sebagainya dan lokasinya apa dan dimana dari anggaran 2,6 Triliun ini? Dari penjelasan satu dengan yang lain, enggak *nyambung*, hanya Bapak yang tahu. Kalau ini (suara tidak jelas) siapapun baca langsung tahu ini, enggak terlalu banyak bertanya ini. Walaupun persoalannya hanya dua persoalan pokok. Pengadaan lahan dan pembangunan sarana penduduk. Tetapi bukan berarti juga karena, apalagi dua ini sebetulnya kait *mengkait* daripada kegiatan yang tidak kita inginkan. Kalau BMKG itu kan lebih kepada kata pencegahan atau memberikan informasi dini. Kalau Basarnas kan lebih kepada pelaksanaan apabila terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, kejadian bencana alam, kan *gitu*.

Nah contoh misalnya di BMKG ya toh, contoh saja, Bapak uraikan kegiatan 2 Triliun pengelolaan *database* bla, bla, bla, bla, bla sekian ratus Miliar dan di Batam. Pengelolaan gempa bumi, tsunami hampir 1 Triliun 945, deputi mana, baru disini, dimana Bapak jelaskan rincian kegiatannya, dimana? Baru disini prediksi dan peringatan dini bencana alam 34 provinsi pagu 127 Miliar 34 provinsi, apa ini? Dan seterusnya. Informasi meteorologi 20 lokasi di 20 pelabuhan, pelabuhan Sumatera Utara, pelabuhan Kalimantan Barat, pelabuhan mana ini? Dan berapa anggarannya? Dari rincian kegiatan itu. Mana dia? *Nyambung*nya dimana? Rincian kegiatannya? Apalagi juga nanti dalam realisasinya.

Sehingga dari 2019 apa sih yang kemarin dan apa kekurangannya? Jelaskan dong. Tapi itu penjelasan terakhir, angka-angkanya harus muncul. Semuanya hanya sekian lokasi, lokasi kegiatan segala macam. Angkanya enggak ada disini, hubungan angka ini kesini kemana? Hanya Bapak yang tahu. Dari angka uraian menjadi 2 Triliun ini. Hanya Bapak yang mengerti, kita tidak mengerti. Nah anggaran ini siapapun membaca harus dimengerti oleh *siapa*pun membaca. Seperti yang Suramadu ini. *Nyambung* dia, *nyambung* banget.

Demikian juga Basarnas, ada disini *mutiyears*, ini *multiyears* tahun keberapa ini? Sudah berapa ini dua helikopter? Apa baru tahun ini? Apa sebelumnya sudah dibayar? Sehingga anggaran dari 900 itu, disini enggak ada 900 hanya 1,5, hanya Bapak sebutkan saja tadi, 900 Miliar, 500 Miliar tapi enggak ci *slide* itu. Hanya Bapak yang tahu, tapi yang ada 1,5 sekian. Tapi

Commented [K54]: KATA TIDAK BAKU

Commented [K55]: KATA TIDAK BAKU

Commented [K56]: TIDAK BAKU, MIRING

Commented [K57]: MIRING

Commented [K58]: TIDAK BAKU DAN MIRING

Commented [K59]: IDEM



enggak jelas. Berapa sih *multiyears* yang sudah harus dibutuhkan tahun ini? Sehingga berapa *multiyears* lagi yang harus diselesaikan dua helikopter ini? Kan begitu kira-kira.

Demikian juga yang lain, pembangunan empat alat komunikasi, berapa sih kebutuhannya? Dengan dipenuhi yang empat sebelumnya berapa? Alat komunikasi yang dibutuhkan 100 sebulan, ditambah lagi empat lokasi, lokasinya mana? Yang mana yang belum? Sehingga kita tahun depan tuh nyambung Pak, nyambung. Karena apa, Bapak-Bapak ini terus terang saja secara terminologinya tidak umum Pak. Kalau PUU umum, Pertanian umum apalagi, Perdagangan umum, Perindustrian, kalau ini enggak umum memang. Kenapa? Memang ini adalah kegiatan yang baru yang memang menjadi harus kita tangani prioritas, BMKG dan Basarnas.

Dan Basarnas ini kalau bisa kita minta pada Tuhan, tidak terjadi. Tetapi ya kita harus, kan begitu kira-kira. Dan memang tidak umum, bahkan ini akan terus banyak tantangan. Oleh karena itu lah kita harus paham, sehingga kita mendapat dukungan yang kuat. Demikian juga apalagi BMKG, tiba-tiba tahun lalu ada menambah 900 Miliar dari dia canangkan, sebetulnya enggak boleh, walaupun itu sudah masuk APBN. Dari B99 misalnya, dia harus masuk sudah harus kita ketok, jadi yang kita ketok sebelumnya itu adalah BMKG 2 Miliar naik berapapun harus ada dalam perubahan. Walaupun itu dari pergeseran anggaran dari belanja lain-lain atau (suara tidak jelas) itu lah yang namanya perubahan. Enggak bisa otomatis, kalau enggak titip saja semua anggaran di B99. Kalau ada kurang ambil saja enggak perlu dibahas lagi dong di DPR. Jadi harus mendapatkan persetujuan juga disini secara teknis sebetulnya. Itu salah satu catatan ya. Dan kita minta BMKG menjelaskan itu dalam konteks realisasi, yang saya dengar menambah 900 Miliar dari 2019, kok tiba-tiba.

Walaupun itu memang dalam pagu anggaran APBN yang sudah kita tetapkan. Tapi posisi anggaran itu dimana? Sementara pergeseran diantaranya juga harus mendapatkan persetujuan. Apalagi dari Departemen Keuangan B99 terus masuk ke departemen (suara tidak jelas) saya enggak tahu belanja dan lain-lainnya.

Saya kira itu Pimpinan, sehingga saran saya serta teman-teman untuk saya, Suramadu saya kira tidak terlalu masalah *clear*. Hanya barangkali sudah diberikan gambaran, tinggal *gambaran* (suara tidak jelas) sudah berapa lama tinggal itu saja, anggarannya memang kecil dan begitu-begitu saja. Sementara katakanlah BMKG ini ada prioritasnya pasti ada juga pengembangannya, tingkat kedekatannya, tingkat persoalannya ini harus diperjelas. BMKG ini dana anggarannya juga meningkat terus. Demikian juga Basarnas, juga harus *progress* nya jelas, dibagi walaupun dalam bentuk program ini, program ini tapi harus nyambung anggarannya per Eselon I.

Commented [K60]: IDEM

Commented [K61]: TYPO

Commented [K62]: TYPO

Commented [K63]: TIDAK BAKU



Ini barangkali Pimpinan, saya sendiri saya tidak bisa melihat ini walaupun secara gambaran umum bahwa katakanlah pengelolaan sekian Triliun ini tapi tidak **nyambung** kepada uraian-uraian berikutnya. Contoh misalnya ya, contoh ini Basarnas yang saya bacakan Basarnas, dari katakanlah 2,25 Triliun itu kan tadi disebutkan tadi disini di satu titik itu ada 1,5, itu paling besar sebetulnya, yang paling besar tadi secara lisan disebutkan pada *slide* kegiatan prioritas nasional pengadaan helikopter *multiyears* dua unit. Nah itu bukan harga, karena ini *multiyears* artinya tidak dibayar sekaligus. Ini *multiyears* **keberapa**? Berapa lama *multiyears*? 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun **keberapa** ini? Dan berapa anggaran yang sudah cadangkan dari hampir 1 Triliun kesini nih? Demikian juga *boat* 66 meter ini, *multiyears* juga satu unit ini, masa satu unit berapa sih? Masa *multiyears*? Silakanlah pemerintah, tentunya ini juga sudah mendapatkan persetujuan Departemen Keuangan, saya tahu betul, kalau enggak, enggak akan mungkin kan? Tapi kita sebagai mitra kerjanya ini *multiyears* **keberapa** dan anggaran? Supaya nanti kita tahu berapa *multiyears* lagi ini?

Commented [K64]: IDEM

Commented [K65]: DIPISAH

Commented [K66]: DIPISAH

Demikian juga yang lain-lain, pengadaan *rescue boat* 66 ini, berapa ini? Dari uraian yang hampir 1 Triliun tadi. Demikian juga tadi Bapak bilang sekitar 500 di kegiatan prioritas nasional dalam konteks pembinaan potensi SAR 10 ribu personil, berapa ini anggaran 10 ribu personil ini? Ini kan dari 1,5 tadi Bapak jelaskan dari kalau saya simak, saya hanya simak tapi enggak kelihatan dia, yang kelihatan itu adalah 1,5 ini terdiri dari pengelolaan operasi SAR, **penegelolaan** kesiapan, sementara kesini langsung global, sebenarnya bisa diuraikan disini. Pengelolaan operasi SAR ini apakah sama dengan pelatihan potensi SAR? Misalnya. Pengelolaan operasi SAR atau potensi SAR apakah itu yang dimaksud atau apa? Kan yang Bapak ambil kan dari yang 1,505 menjadi hampir 900 dibagi dua menjadi 500 sekian. Artinya harus **nyambung** juga, sementara disini ada terminologi-terminologi A sampai F, Bapak bagi dua dari 1,5 itu menjadi adalah kegiatan pembinaan potensi SAR dan pengelolaan sarana dan prasarana. Boleh-boleh saja, tapi angka itu harus **nyambung** dengan jenis kegiatannya, **nyambung** dia Pak dari 1,5 Bapak sebutkan ini. Yang sesungguhnya sebenarnya yang betul itu apa yang disebut pengelolaan operasi SAR ada 86 Miliar Bapak uraikan sebetulnya apa bagian itu.

Commented [K67]: DIPISAH

Commented [K68]: TIDAK BAKU

Commented [K69]: TIDAK BAKU

Commented [K70]: TIDAK BAKU

Apa itu yang Bapak sebutkan misalnya pengelolaan sarana dan prasarana SAR, apakah yang 900 atau pengadaan tadi disini masuknya misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga antara tabulasi satu atau penjelasan kotak satu dengan kotak-kotak berikutnya **nyambung**, jadi tidak kami berpikir apa seperti ini **gitu** loh. Ini standar umum dari awal saya katakan. Enggak sulit Pak, enggak sulit kalau Bapak mau apa (suara tidak jelas). Tapi kalau Bapak enggak mau ya percuma Pimpinan.

Commented [K71]: TIDAK BAKU

Commented [K72]: TIDAK BAKU

Itu saja Pimpinan, karena saya enggak bisa bicara banyak ini, karena hampir tidak saya temukan pembahasan rincian kegiatan anggaran



kementerian/lembaga dalam hal ini SAR dan BMKG enggak bisa saya lihat kan. Walaupun secara perspektifnya ada tapi kita tidak bicara perspektif. Perspektif ini penting sebagai katakanlah sebagai informasi tambahan. Sama tadi informasi tambahan oleh Suramadu, "oh dengan angka sekian ini sudah tersambung" itu namanya penjelasan dari kegiatan anggaran "oh dari 1,8 Miliar untuk pembinaan keterampilan untuk sekian orang" ada penjelasan 40 sekian "oh ini untuk ekonomi, untuk teknologi tepat guna dan sasaran" oh nyambung dia Pak, nah itu keterangan tambahan. Supaya apa? Ditabulasi anggaran tidak terlalu padat.

Saya kira demikian Pimpinan, saya terus terang saja secara pribadi apapun khususnya dua semua mitra kerja Komisi V harus kita dukung tetapi alangkah naif nya kalau ada orang bertanya "bagaimana sekarang kondisi BMKG kita di negara ini?" misalnya katakanlah ditanya saya di Nias, "loh saya enggak pernah bisa jawab". Karena apa? 34 provinsi. Atau misalnya dimana yang di Aceh yang kemarin-kemarin terjadi tsunami, bagaimana? Nah enggak kegambar disini. Ada sekian titik lokasi, nah tentunya dilaksanakan, oh ini masih dalam posisi sekian persen misalnya ini yang pernah tsunami Aceh, Nias atau katakanlah daerah-daerah mana misalnya Banten, masih harus kita butuh sekian. Sehingga kita nanti berdebat pun didalamnya nyambung kan.

Kalau Basarnas lebih kepada kesiapsiagaan sesuatu yang tidak kita inginkan, walaupun itu juga harus ada persiapan kelengkapan minimal harus terpenuhi dan peralatan minimal dari setiap titik khususnya yang rawan dari informasi atau kejadian yang ada dari BMKG. Karena ada dua instansi yang sangat kuat kaitannya, satu untuk memberikan informasi dini, satu untuk mengurangi, mengatasi, menolong dan segala macam.

Demikian Pimpinan, angka-angka saya belum bisa komentar. Saran saya untuk minta dibetulkan sebagaimana standar umum bukan standar khusus dari dua lembaga BMKG dan Basarnas.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Baik. Itu masukan dari Pak Jhoni pada BMKG dan Basarnas Pak ya. Jadi tolong dipertemuan berikutnya dibuat lebih detail rincian kegiatannya sehingga bisa dipahami oleh kami. Nah kami juga tidak bisa menyetujui anggaran kalau anggota tidak menyetujui bersama.

Si'akan Pak Bahrum.

Commented [K73]: TIDAK BAKU

Commented [K74]: TIDAK BAKU

Commented [K75]: TIDAK BAKU

Commented [K76]: DIPISAH

Commented [K77]: TIDAK BAKU

Commented [K78]: DIPISAH



**F-P DEMOKRAT (Dr. Ir. BAHRUM DAIDO, M.Si):**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Basarnas, BMKG dan Badan Pengembangan Suramadu beserta seluruh jajarannya.**

**Yang saya hormati Pimpinan dan Teman-Teman Anggota Komisi V.**

Pertama saya ke Suramadu Pimpinan. Saya protes Pak Jhoni Allen. Dia tidak katakan Suramadu tapi Suryamadu. Surya tuh nama cewek madu itu bulan madu ada hubungannya semua. Jadi ini saya juga jadi bingung ini Pak Jhoni Allen, Suryamadu salah itu Suryamadu, saya perbaiki Suramadu, ya Pak Jhoni Allen ya. Jangan dikembangkan Suryamadu Pak, itu bahaya itu.

**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Pak, Pak Bahrum, itu logat Pulau Samosir Pak.

**F-P DEMOKRAT (Dr. Ir. BAHRUM DAIDO, M.Si):**

Ya jadi pertama Pak saya ke Suramadu. Ini uraiannya sudah jelas, hanya saya mau **nanya**, Suramadu kan ini jasa Pak, Badan Pengembangan Suramadu ini jasa, penyediaan tanah kemudian *me-lobby* kepada investor. Investor melihat kemudian oh ada celah untuk pengembangan bisnis ya dan sebagainya. Saya melihat di Badan Pengembangan Suramadu ini ada pembangunan infrastruktur, kok Badan Suramadu bangun infrastruktur bagaimana sih saya bilang. Saya enggak setuju ini bangun infrastruktur, infrastruktur yang bagaimana yang dibangun oleh Badan Pengembangan Suramadu. Kalau pendukung kawasan boleh saja, tetapi jangan pakai duit Badan Pengembangan, pakai duitnya PU.

Yang lalu waktu **kesuatu** peninjauan saya tanya ada pembangunan air bersih, penyediaan air bersih. Sementara program kita di PU itu ribuan itu untuk pembangunan air bersih. Jadi pakai dana itu Pak Suramadu, jangan pakai dana Suramadu. Kalau pakai dana Suramadu (suara tidak jelas) kecil ya habis Pak, habis untuk bangun infrastruktur. Padahal ini Badan Pengembangan Suramadu ini jasa. Jadi kita buat *masterplan*, *plan* yang strategis kemudian kita sajikan kepada investor, investor berminat kita jual begitu atau dipersewakan. Kan begitu Pak ujung-ujungnya. Tetapi saya lihat ada pembangunan infrastruktur, untuk apa kita bangun infrastruktur? Nah itu yang pertama, barangkali bisa

Commented [K79]: TIDAK BAKU

Commented [K80]: DIPISAH



dijelaskan nanti Bapak Badan Pengembangan Suramadu, bukan Suryamadu, Suramadu, nah bisa dijelaskan nanti itu tentang kenapa harus bangun infrastruktur. Ya Pak Jhoni Allen ya, itu yang pertama.

Kemudian yang berikutnya, betul Pak Jhoni Allen. Saya juga bingung tadi ini melihat unit Eselon I, Kedeputan Meteorologi, Kedeputan Klimatologi, Kedeputan Geofisika, Kedeputan Inskarekjarkom Pak susah juga sebutkan. Saya lihat ada belanja barang cukup besar, belanja modal juga cukup besar. Belanja barangnya tidak jelas, ya jelas apa yang diuraikan disini, enggak tahu belanja barang modal ini saya juga enggak bisa bedakan disini. Ini barangnya, misalnya saya kasih contoh ya. Pengelolaan meteorologi penerbangan ini belanja barangnya 1055 Miliar kemudian belanja modalnya 266 Miliar kemudian hanya dikatakan ada lokasi, sekian lokasi, tidak ada anggaran disini. Benar Pak Jhoni jadi kita bingung, ini ancar-ancar anggarannya ini untuk lokasi dimana enggak tahu kita ini, terus kemudian pemeliharaan sistem informasi bingung saua juga melihatnya, benar Pak Jhoni Allen, saya dukung Pak Jhoni Allen, pendapat saya seperti pak Jhoni Allen.

Jadi kedepan saya pengin juga ada lokasi yang jelas terhadap satu lokasi itu berapa anggarannya lokasi mana saja, kemudian apa yang diadakan, kemudian anggarannya ancar-ancarnya berapa. Jadi terukur, ini kan enggak terukur yang seperti ini. Hanya ada global saja, global muncul dimakro, secara makro kita lihat belanja modal 265 Miliar, 265 Miliar mana itu? Berapa dilokasi ini, dilokasi ini berapa gitu. Ini belanja modal 155 Miliar, mana ini belanja modalnya apa, dilokasi ini berapa belanja modalnya enggak jelas ini. Jadi tidak terukur ditiap-tiap lokasi. Jadi harapan saya juga seperti Pak Jhoni Allen itu harus ada terukur ditiap-tiap lokasi, berapa belanja modal.

Begitu juga dari Basarnas, saya lihat Basarnas juga ini langsung makro. Jadi kebutuhan, indikatif, pagu anggaran, *backlog*. Ya tetapi diuraian ini tidak jelas, pembelian-pembelian ini. Sekian unit, pengadaan helikopter *medium intermediete* dua unit, berapa ancar-ancar anggarannya? Ya pengadaan *rescue boat* 66 berapa? Jadi enggak jelas begitu dia punya *breakdown*. Ya *breakdown*, walaupun *breakdown* yang ada disini masih makro juga, ya belum satuan tiga belum, ini masih makro juga. Tetapi seharusnya makro itu harus dimunculkan dia punya anggaran, jadi enggak jelas enggak terukur kita.

Ada *backlog* 2 Triliun 404 Miliar, dimana ini *backlog*-nya, enggak tahu juga kita kan? Iya enggak terukur, kekurangan *backlog*-nya dimana, harganya, ancar-ancarnya bagaimana? Jadi supaya terukur ada batas-batas tertentu sehingga kita mengetahui "oh disini butuh, disini helikopter butuh, di *boat* butuh, di ini butuh, disini butuh, sekian-sekian" jadi terukur, enggak terukur.

Commented [K81]: TYPO

Commented [K82]: TYPO

Commented [K83]: DIPISAH

Commented [K84]: TIDAK BAKU

Commented [K85]: DIPISAH

Commented [K86]: DIPISAH

Commented [K87]: DIPISAH

Commented [K88]: DIPISAH



Untuk itu Pimpinan saya juga harapkan kepada Basarnas agar melengkapi ancar-ancar anggaran tiap-tiap apa yang dibutuhkan. Ini mungkin satuan dua namanya ya, apa istilahnya itu, enggak tahu juga. Satuan satu kan ini mungkin global, satuan dua ini, satuan tiga nanti rinciannya yang sangat detail begitu.

Jadi demikianlah penyampaian saya, lebih dalamnya saya mohon maaf.

**Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.**

**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Sebetulnya saya ini sudah 10 tahun Pak di Komisi V ini dan 10 tahun pula saya sudah jadi pimpinan Pak. Kita sudah sering mengingatkan Pak Jhoni sebetulnya, baik dari Basarnas, BMKG maupun dari Bapel BPWS ketentuan UU DPR itu fungsinya tiga Pak. Hari ini kita adalah menjalankan dua fungsi, pertama adalah fungsi anggaran yang berkaitan nanti dengan fungsi pengawasan. Bagaimana kita bisa melakukan pengawasan dengan sistem penganggaran seperti ini. Karena dalam pelaksanaan penyusunan anggaran itu sendiri berjalan juga fungsi pengawasan kita, penting apa enggak untuk dianggarkan, ini kan yang Pak Jhoni maksud.

Jadi saya rasa, kita belum selesai hari ini Pak Jhoni masih ada, karena Pak Hamka di Banggar juga belum selesai kan Pak ya? Jadi kita akan masih akan ada ketemu lagi. Tadi saya berharap masukan, saran teman-teman rapat terdahulu itu bisa disampaikan seperti yang tadi Pak Ketua sampaikan disini. Jadi tidak normatif kita mengulangi paparan *backlog* sekian, ini sekian, ini sekian. Jadi ini kayanya semacam rutinitas yang makan pagi, makan siang, makan malam gitu saja. Jadi saya harap masukan dari teman-teman ini diperbaiki Pak. Seperti contoh kalau di PU dan Perhubungan kemarin kita sudah rapat jelas. Jalan disini, jembatan disini kan begitu kemarin toh, semua ada, anggarannya sekian ada Pak. Jadi sampai ke lokasi kegiatannya disampaikan kepada kita. Jadi kami bisa mengawasi, sumur bor sekian, sumur bor saja dikasih tahu ke kita Pak di PU itu, Bapak bayangkan sumur bor berapa sih satu titik. Disampaikan sekian jumlah sumur bor akan dilokasikan disekian titik.

Ini memang Bapak bandingkan sendiri lah enggak usah saya sebut lagi lah yang ada disini kan. Bagaimana kami bisa melakukan fungsi pengawasan dengan paparan yang begini. Nah sekarang kita balik saja, kalau Bapak diposisi kita, kita diposisi Bapak, Bapak bertanya enggak? Sederhana saja. Kata orang Jawa bilang *tepo seliro* Pak. Ya sekali-sekali kita mesti berani berpikir berbalik, andai saya jadi mereka dan mereka jadi saya. Jadi supaya sebagai mitra kita salaing melengkapi antara satu sama lain dan kami toh tidak menentukan Pak,

Commented [K89]: CETAK MIRING

Commented [K90]: TIDAK BAKU

Commented [K91]: DIPISAH

Commented [K92]: TYPO



Bapak harus bikin ini disini dengan anggaran sekian, harus bikin ini disini dengan anggaran sekian, kan tidak. Silakan Bapak yang bikin ya, kami akan mengadakan ini disini anggarannya sekian, nah Bapak yang menentukan, bukan kami.

Ya kami melihat begitu loh, tentu kita kan membahas anggaran ini *sorry* saya perlu ngomong karena sudah dua anggota bicara ini. Saya perlu ngomong kita bahas anggaran ini kan kita kan pegang data juga Pak. Kami sebelum duduk di rapat sini baca dulu hasil rapat kemarin, rapat kemarinnya lagi, kemudian anggaran Bapak-Bapak tahun-tahun lalu kita lihat semua. Baru kita duduk disini Pak. Jadi saya rasa hal ini tidak perlu kami sampaikan berulang-ulang. Saya sengaja tidak mau membukanya tapi biarlah teman-teman anggota yang menyampaikan oleh karenanya saya minta ini nanti diperbaiki, diperjelas Pak. Diperjelas, contoh saya lah Pak Jhoni ya. Pimpinan kan menandatangani anggaran ini, kalau Pimpinan tidak tandatangan Bapak-Bapak kesulitan Pak di Kementerian Keuangan. Nah kami disuruh menandatangani sesuatu yang penuh tanda tanya. Makanya saya bilang tadi sekali-kali kita balik posisinya, andai Bapak jadi kita, kita jadi Bapak, kan begitu.

Jadi supaya kita bisa tahu bagaimana perasaan kita dengan sistem yang berjalan ini. Nah kami disuruh menyetujui sesuatu yang kami tidak pahami secara utuh. Tapi kami adalah bagian dari legal formal yang harus dijalani dalam proses kita bernegara. Nah ini dengan ketentuan undang-undang. Nah ini seharusnya saya juga menandatangani harus detail saya mesti tahu Pak, harusnya. Apakah karena memang toleransi sudah terlalu longgar kita kasihkan selama ini akhirnya "ya sudahlah nanti sampaikan saja ke dewan ya nanti juga disetujui kok". Nah kalau kita sudah berpikir begitu kacau kita ini Pak. Sudah tidak bagus hubungan kita ini.

Jadi saya mengingatkan kepada kita semua untuk taat asas yang wajar-wajar saja, kita juga tidak pernah mempersulit Pak, saya rasa saya tidak pernah mempersulit mitra kerja selama ini. Walaupun penuh tanda tanya kadang-kadang kita juga masih tandatangani demi kelancaran semua proses ini dan mitra bisa bekerja dengan baik.

Saya persilakan selanjutnya Pak Hamka, Pak Hamka dulu lah biar ada info-info juga kita dari Banggar toh. Silakan Pak Hamka.

**F-P GOLKAR (DRS. HAMKA BACO KADY, MS):**

*Bismillahirrohmanirrohim.*

Commented [K93]: TIDAK BAKU, MIRING

Commented [K94]: DIPISAH

Commented [K95]: TIDAK BAKU, CETAK MIRING

Commented [K96]: DIPISAH



**Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.**

**Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati.**

**Bapak Sestama, Pak Deputy yang mewakili Sestama Basarnas, BPWS.**

Sebenarnya kalau saya membaca ini juga pertanyaan pertama saya Pak Sestama BMKG, apakah tambahan itu sudah masuk didalam pada posisi pagu 2.655 realisasi 877 sehingga baru capai target 33,04 Pak ya. Nah ini kan pencapaian Bapak ini 33, penjelasan kemarin kenapa belum capai target yang maksimal karena ada tambahan yang masih proses penggunaan ya Pak ya, oke. Itu pertanyaan saya yang pertama, 26,55 pagu ini sudah masuk tambahannya atau belum? Saya pikir sudah masuk ya Pak ya, nah itu yang pertama.

Yang kedua kita masuk pada tahun 2020. Kalau melihat pagu anggaran disini itu menjadi 3.056.259.932, artinya apa, pagunya Bapak 2019 naik lagi di 2020 kan begitu Pak logika hitungannya. Sudah dinaikkan 2019 naik lagi untuk 2020. Mudah-mudahan saya salah baca. Karena 2020 ini 3.056, kalau pagu kita 2019 ini 2.655 yang lalu. Berarti sudah dua kali naik ini Pak Sestama ya, kalau begitu posisinya.

Nah saya hanya ingin mengingatkan menyambung pembicaraan Pak Ketua tadi memang kalau kita balik fungsi kita ibaratkan kita kesana dan Bapak-Bapak duduk kesini mungkin bisa kita saling merasakan dulu bagaimana perasaan itu. Tetapi saya tetap berpikiran positif bahwa Bapak-Bapak masih bisa memperbaiki laporan ini dengan baik ya. Karena membacanya itu harus, persoalan yang pertama yang diminta oleh Ketua tadi kalau saya tidak salah tambahan itu untuk apa saja sih, 900 dengan yang lalu itu pagunya sekian-sekian tambahan 900 itu untuk apa? Karena saya yakini bahwa tambahan itu adalah untuk kegiatan mengenai peringatan dini tsunami, itu kesepakatan di Badan Anggaran. Saya minta maaf beribu maaf dimuka Pak Sestama dan seluruh jajaran Kementerian BMKG, saya diledekin tadi pagi Pak, "Pak Hamka kita sudah bantu BMKG jangan sampai akurasiya tidak sama dengan diluar negeri. Kalau di luar negeri bahwa tiga hari akan datang hujan, hujan betul" itu ledekin saya dimukanya, dimuka forum Pak.

Artinya apa, penambahan ini diminta akurasi karena *outcome*-nya itu adalah akurasi karena ini adalah alat. Saya tahu persis bahwa memang mungkin tidak semua orang bisa mengintervensi itu, paham. Kita harus mencari lebih baik. Saya jujur saja Pak, saya tidak tahu mau bicara apa lagi dengan kawan-kawan. Saya ditugasi Pak Ketua tadi dibisikin untuk bagaimana 2020 ini ada tambahan Basarnas. Saya juga sudah sampaikan tadi besok baru dibahas lebih lengkap lagi Pak Sestama atau Pak Deputy ya mengenai itu. Yang kita cari

Commented [K97]: DIPISAH

Commented [K98]: TIDAK BAKU

Commented [K99]: IDEM

Commented [K100]: IDEM



ini sumbernya darimana, sementara tadi ini sumber, sumber, sumber, sumber karena yang kita berikan kepada BMKG hutang juga Pak. Saya juga sempat ngomong tadi jangan sampai ini kita gali lubang tutup lubang, jadi hutang lagi, ya hutang lagi.

Nah oleh karena itu untuk kedepan, saya kira Pak Ketua, saya kira kita sepaham kami tidak mau mengganggu nanti setelah satu bulan atau tiga bulan Ketua didalam undag-undang itu harus diserahkan satuan tiganya. Supaya itu menjadi dasar kita untuk mengontrol. Apakah alat ini dibeli seperti itu harganya. Sekarang ya bisa tidak ada dasar Pak. Kalau Bapak dengar-dengar rekaman tadi di Banggar itu, saya yang diledek-in ya. Oke saya kira ini perbaikan Pak Ketua kedepan untuk menjalankan fungsi pengawasan kita. Apa yang mau diawasi kalau kita tidak tahu satuan tiga, tetapi untuk sementara tidak ada masalah. Tidak diketahui satuan tiga itu tidak ada masalah memang sekarang, tetapi kewajiban setelah ditetapkan harus ada satuan tiga sebagai dasar pengawasan. Itu setahu saya itu undang-undang. Yang penting disini adalah bagaimana, dimana lokusnya, alatnya apa, karena outcome daripada BMKG ini adalah akurasi, akurasi, akurasi informasi, itu.

Nah oleh karena itu saya belum lihat ini memang ini secara total, saatnya sekarang kita memplototi bagaimana pengawasan itu kita fungsikan dengan baik. Kalau ada datanya barulah kita bisa berbuat. Jangan hanya sekedar kita kunjungan kerja Pak Ketua, tidak jelas yang mana. Kita ngomong-ngomong saja, kita tidak lihat alatnya, berapa harganya, kita kroscek harganya, ya jangan begitu lah. Kita saling menghargai disini. Kami tidak mau saling mencelakakan Bapak-Bapak semuanya. Apalagi kalau sudah tidak mau dihubungi lagi deputinya dan kapusnya ya alhamdulillah terima kasih, enggak ada masalah itu.

Saya kira itu yang saya ingin tanyakan, yang 2019 harus diperbaiki Pak Sestama mohon dengan hormat. Pak Sestama apa anggaran itu tadi sekian untuk, sesuai permintaan Ketua, tambahannya untuk apa, progresnya kaya seperti apa, 33% oke tidak ada masalah. Tapi kedepan saya kira untuk 2020 saya kira perlu dilokusnya dimana, untuk apa dan sebagainya sebanyak 3,056. Saya prinsipnya adalah concern didalam pengawasan. Saya tidak mau cari tahu lagi bagaimana prosesnya, concern pada pengawasan. Mudah-mudahan penyusunan RAPBN atau RKA-K/L 2020 ini clear untuk kita sepakati. Dan saya setuju Ketua, jangan dan pasti Ketua tidak tandatangan kalau kami juga belum setuju, itu pasti.

Saya kira itu saja untuk Basarnas, saya sudah lanjutkan tadi Pak, mudah-mudahan ada peluang sedikit ya. Karena saya sudah lapor kepada Pimpinannya juga Pak Lasarus seluruh Pimpinan, Insya Allah akan bicara juga dengan Pak Lasarus, Pimpinan ada yang ada disini.

Commented [K101]: TIDAK BAKU

Commented [K102]: DIPISAH

Commented [K103]: TYPO

Commented [K104]: TYPO

Commented [K105]: IDEM

Commented [K106]: TIDAK BAKU

Commented [K107]: TIDAK BAKU, CETAK MIRING

Commented [K108]: TYPO

Commented [K109]: DIPISAH

Commented [K110]: DIPISAH

Commented [K111]: IDEM



Saya kira itu saja Ketua, saya tidak mau bahas detailnya karena belum ada yang detail. Coba kalau ada detail ini global semua. Terima kasih.

*Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Baik. Terima kasih Pak Hamka.

**F-P DEMOKRAT (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM):**

Interupsi Pimpinan, interupsi. Supaya enggak lanjut.

**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Ya, silakan.

**F-P DEMOKRAT (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM):**

Saya baru cek kepada *database* bahwa BMKG tahun 2019 yang kita ketok adalah 1,7, yang kita ketok. Sehingga menurut hemat saya sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku yang kita minta realisasinya adalah dari 1,7, bukan dari 2,6 itu peraturan perundangan berlaku. Darimana anggaran itu 900 slakan mereka pertanggungjawabkan kepada yang memberikan anggaran. Kalau tidak ada perubahan untuk kita ketok menjadi 2,6. Saya hanya mengingatkan Ketua realisasi disini sudah *memperspektifkan* 2,655, sementara saya cek *database* 1,7 yang ketok anggaran 2019 untuk BMKG. Jadi salah besar komisi ini kalau mencoba menerima perspektif 2,6 dari 1,7 yang diketok kalau tidak ada perubahan. Atau yang 900 boleh saja dari katakanlah B99 atau apa silakan itu pertanggungjawabkan kepada Departemen Keuangan, tidak dipertanggungjawabkan pada sini. Karena kita nanti akan bisa menjadi, kalau nanti misalnya silakan, saya atau Pak Pras akan memberikan catatan kalau itu. Karena apa, ini akan bisa muncul pada suatu saat dalam konteks peraturan perundangan berlaku tentang pengelolaan keuangan negara.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

Commented [K112]: TIDAK BAKU



**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Baik catatan Pak Jhoni.

Saya silakan Bu Neng.

**F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I):**

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semuanya.

*Om swastiasu.*

**Pimpinan Komisi V beserta Anggota Komisi V yang saya hormati.**

**Mitra kerja baik dari BMKG, Basarnas dan BPWS beserta jajarannya yang saya hormati dan saya banggakan.**

Sebenarnya kalau dilihat dari anggaran untuk tahun 2020 yang disampaikan oleh pertama BMKG dulu ya, itu sudah lumayan ada kenaikan gitu kan luar biasa. Padahal kalau melihat dari serapan anggaran terlepas tadi apa yang dikatakan oleh Pak Jhoni Allen Marbun bahwa sebenarnya dipersetujuannya itu tidak 2,655 itu kan tapi melihat realisasi di akhir Agustus itu tidak sampai 50%, hanya 33,04%. Sedangkan untuk 2020 justru ada peningkatan luar biasa walaupun kemudian misalkan ada *backlog*. Saya kira itu sudah perjuangan Komisi V yang selalu dalam rapat-rapatnya untuk bagaimana menaikkan anggaran untuk BMKG itu saya kira sukses, berhasil. Saya beberapa minggu lalu, kita koordinasi dengan Menteri Keuangan beserta Pimpinan MPR karena saya kebetulan di Banggar MPR gitu kan, memang instruksinya adalah semua kementerian dan badan dikembalikan *sideback* lima tahun kebelakang anggarannya. Semua dikurangi kecuali beberapa kementerian dan lembaga yang itu dianggap strategis dan mungkin akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat seperti itu. Nah artinya BMKG disini termasuk juga salah satu lembaga yang itu mendapat perhatian khusus seperti itu. Walaupun mungkin banyak yang sebenarnya sesuatu yang tidak sesuai yang diharapkan oleh masyarakat dan tidak sesuai juga dengan yang menjadi prioritas BMKG, dimana kebutuhan SDM yang berkualitas, berdaya saing bisa menjawab tantangan diera destruksi. Ingin menuju BMKG yang lebih canggih terus juga organisasi yang kurang efisien juga saya kira itu.

**Commented [K113]:** TIDAK BAKU, CEPATAK MIRING

**Commented [K114]:** TYPO

**Commented [K115]:** TIDAK BAKU

**Commented [K116]:** DIPISAH

**Commented [K117]:** DIPISAH KARENA PENANDA WAKTU



Saya kira beberapa hal isu-isu yang menjadi strategis di BMKG itu juga kalau saya melihat belum tercapai seperti yang diidealkan oleh kita semua seperti itu.

(KASET 2 HABIS)

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I):

Itu secara umumnya Pak. Terus saya ingin mengkritisi juga menanyakan mungkin yang lebih teknis yang untuk anggaran 2020 yang dihalaman 14 Pak. Untuk pagu anggaran BMKG untuk kegiatan ditahun 2020 itu Pak. Saya lihat disini untuk pengelolaan gempa bumi dan tsunami disini mendapatkan alokasi anggaran yang paling besar dibanding dengan yang lainnya. Nah mungkin tentu saja saya agak awam ini dibidang ini, tetapi bahasa pengelolaan gempa bumi, bagaimana mengelola gempa bumi? Bagaimana tsunami dikelola?itu kita memang butuh penjelasan manifes kegiatannya seperti apa. Karena kalau bagi masyarakat umum, masyarakat awam mungkin ini bagaimana sih gempa bumi dikelola, tsunami dikelola, itu seperti apa gitu kan? Ini yang agak ini Pak. Kalau misalkan pengelolaan layanan informasi itu pasti langsung ngeh gitu kan, tetapi kalau ini gempa bumi dikelola, tsunami dikelola seperti itu, padahal gempa bumi dan tsunami itu pun untuk prediksi yang selama ini dilakukan oleh BMKG itupun banyak yang tidak akurat. Sedangkan disini untuk pengelolaan tersebut itu anggarannya cukup, cukup besar. Nah itu artinya kan gempa bumi dan tsunami itu bisa terjadi bisa tidak gitu kan, seperti itu. Tetapi disini mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar seperti itu. Walaupun pasti kita semuanya tidak ingin terjadi gempa bumi dan tsunami seperti itu. Tolong ini nanti manifest kegiatan dan sebagainya juga tolong dijelaskan ya, karena ini saya lihat ini juga menjadi perhatian kerja kedepan untuk BMKG.

Terus untuk selanjutnya, Basarnas ya. Kalau Basarnas saya kira untuk penyerapan anggaran lumayan ya, lebih dari 50%, yaitu sekitar 55%. Walaupun sebenarnya padahal kerja-kerja Basarnas itu kan ketika bencana misalkan sudah terjadi barulah dia datang gitu, sudah ada kejadian barulah dia bisa bekerja dengan maksimal. Maka tentu kata kucunya adalah *respon time* yang kemudian menjadi alat kerja yang paling utama bagi Basarnas. Nah oleh karena itu walaupun mungkin penyerapan ditahun kemarin lebih dari 50% saya kira tetapi kita mungkin bisa ditingkatkan lah terkait kecepatan *respon time* itu. Karena beberapa kemarin memang banyak yang agak terlambat seperti itu.

Saya sebenarnya, terutama kami dari PKB ya memang punya ide bagaimana agar BMKG mungkin Basarnas yang terkait dengan kebencanaan itu, terus BNPB dan sebagainya itu bisa jadi satu kementerian. Sehingga koordinasinya bisa cepat. Hari ini kan Basarnas hanya disitu kerja utamanya ketika sudah terjadi bencana misalkan, sedangkan BMKG sebelum informasi-informasi sebelum bencana misalnya, terus kemudian BNPB itu penanggulangan bencana. Jadi sama-sama bencana, nah ini agar bagaimana

Commented [K118]:

Commented [K119]: DIPISAH

Commented [K120]: TIDAK BAKU

Commented [K121]: TIDAK BAKU/TYPO

Commented [K122]: DIPISAH

Commented [K123]: TYPO

Commented [K124]: DIPISAH



ini komprehensif dan kemudian *nyambung* kita sebenarnya punya saran agar bagaimana itu digabung menjadi satu dan menjadi kementerian tersendiri saya kira seperti itu. Walaupun mungkin ini bukan forumnya saya untuk menyampaikan seperti itu tapi tidak masalah ini menyampaikan. Karena saya lihat koordinasi akan lebih cepat ketika itu digabung. Sedangkan hari ini seperti seolah-olah jalan sendiri-sendiri tetapi ketemu ketika terjadinya bencana kan seperti saya lihat sistematisasi kerjanya seperti itu.

Terus kemudian untuk BPWS saya tidak akan mengkritisi terkait anggaran BPWS karena saya juga mendengar masalah di BPWS itu masih ada masalah terkait persoalan struktur dan pejabat organisasi di BPWS. Hingga sampai saat ini kan masih sementara. Kalau informasi yang saya dengar pada Juli lalu juga menyebutkan Menteri Bidang Perekonomian itu mereka sudah dimedia sudah mengatakan punya beberapa calon. Dan salah satu diantaranya dari Kementerian PUPR. Jadi dengan struktur organisasi BPWS yang sekarang ini sudah kalau menurut perpres itu sebenarnya sudah habis sampai akhir tahun 2018. Sedangkan ini 2019 sudah mau sudah dibulan September, Agustus sudah lewat seperti itu. Artinya kan untuk masalah kebijakan-kebijakan tentu itu tidak bisa kemudian bekerja sendiri gitu kan, dengan kondisi seperti itu. Namun walaupun rencana kedepan gitu kan, struktur organisasi ini beberapa diusulkan dari bupati sebagai penasehat, beberapa bupati penyangga disana sebagai penasehat, terus kemudian tokoh keagamaan didaerah tersebut menjadi masuk kedalam struktur tersebut sebagai penasehat dan ada disitu tambahan satu yaitu deputi terkait mengurus investasi. Itu saya sangat mengapresiasi. Karena hanya sekedar mengandalkan anggaran dari APBN saya kira apa yang kemudian dicita-citakan, diidealkan itu mungkin tidak akan tercapai sampai kapanpun. Maka dengan ada penambahan struktur seperti itu saya sangat mengapresiasi dan itu juga saya kira bagus.

Namun yang ingin saya tanyakan terkait kepada BPWS adalah ini yang ada rencana terkait membangun *Islamic Science* dan LRT yang mana itu rencananya akan ditempatkan, ini kan perencanaan pemprov nih, Pemprov Jawa Timur ya, yang mana akan diletakan di Kaki Madura ini. Otomatis ini kan wilayah kan wilayahnya BPWS ya Pak ya, berarti ini dibangun diatas wilayah BPWS Pak?

**DEPUTI PERENCANAAN BAPEL BPWS (Dr. Ir. AGUS WAHYUDI, SE):**

Kita usul.

Commented [K125]: TYPO

Commented [K126]: DIPISAH

Commented [K127]: DIPISAH

Commented [K128]: TIDAK BAKU

Commented [K129]: DIPISAH



**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Sudah nanti, nanti biar Bapak jawab nanti saja. Silakan, silakan. Tolong dicatat Pak nanti dijawab sekalian.

**F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I):**

Oh ya sudah, oke oke. Nah pembangunan *Islamic Science Park* ini diatas lahan seluas 110 hektar dimana akan dimanfaatkan 20% untuk edukasi, terus 30% untuk kesenian, juga sisanya pariwisata. Dan pembangunan *Islamic Science Park* Madura ini juga merupakan pengembangan dari delapan proyek yang sebelumnya ditawarkan oleh BPWS kepada investor, Nah ini yang perlu digarisbawahi. Termasuk juga fasilitas transportasi di *Indonesia Islamic Science Park* ini juga akan menggunakan *design* LRT. Nah dan delapan proyek tersebut kalau menurut catatan kami ini berada di kawasan khusus Madura Pak ya, di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu, sisi Madura dengan nilai investasi sekitar 53 Triliun. Nah ini artinya ini akan ada anggaran yang mungkin bukan dari APBN akan masuk kesana Pak, jadi kami ingin menanyakan itu bagaimana itu kerjasamanya, posisi BPWS itu dimana dalam hal proyek *Islamic Science* tersebut dan pembangunan LRT tersebut Pak? Mohon kami diberikan penjelasan, karena apa ya, karena mengingat secara struktural hari ini BPWS kan secara perpres sudah habis masanya, maka ini berarti kan masih PLT. Dan berarti kan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis nah ini jangan sampai kemudian sudah mengambil kebijakan nanti dianulir oleh kepengurusan BPWS yang baru. Ini mohon kami diberikan penjelasan terkait itu. Mungkin itu saja.

Commented [K130]: DIPISAH

Terima kasih.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thoriq.*

*Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Baik, terima kasih Bu Neng. Siapa lagi? Pak Yoseph silakan.

**F-PDIP (Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si):**

Terima kasih Pak Ketua.



**Pak Ketua dan Bapak-Bapak Anggota yang saya hormati.**

**Bapak/Ibu para Sestama baik BMKG, Basarnas maupun BPWS serta seluruh jajaran yang saya hormati.**

***Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.***

Pertama saya mau mengarah ke BMKG dulu, ini Pak Dwi Budi ini. Sebelum itu saya menyampaikan selamat dulu, menyampaikan selamat kepada Pak Dwi yang dipercaya untuk menjadi orang nomor dua di lembaga yang saya kira sekarang ini semakin naik daun, dibutuhkan dan semakin terkenal dan menjadi tiang harapan kita untuk mendapatkan informasi tentang berbagai hal yang mengancam keselamatan jiwa masyarakat kita. Sehingga lembaga ini betul-betul seluruhnya harus merasa percaya diri dan merasa diharapkan menjadi menjalankan amanah rakyat. Dan BMKG itu adalah ujung tombaknya pemerintah ini dalam melaksanakan pembukaan Undang-Undang Dasar dimana tujuan daripada negara ini diadakan adalah melindungi segenap bangsa dan tanah air. Melindungi itu artinya melindungi dari segala macam ancaman musibah bahaya, nah jadi oleh karena itu harus bangga dan harus memiliki **kesemangatan** yang tinggi didalam melaksanakan tugas dari Pimpinan sampai kepada seluruh jajaran di daerah-daerah.

Dan tentu untuk sampai kepada tujuan yang dimaksud agar dapat menyelamatkan masyarakat dari ancaman itu harus bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Produk berkualitas itu produk yang tepat, tepat, sebab kalau tidak tepat nanti informasinya salah bisa **berabe** itu jadi bisa. Ketepatan itu tergantung daripada kemampuan sumber daya manusianya (SDM) dan sarana prasarana kita, alat-alat ukur kita, monitoring dan evaluasi kita harus tepat. Oleh karena itu tantangan kita kedepan ini bukan semakin ringan tetapi semakin besar. Perubahan iklim, pemanasan global dan sebagainya, polusi, dan bencana musibah, klimatologi, banjir, ombak yang besar dan seterusnya. Jadi bukan kita makin, harus makin kita memberdayakan diri baik sumber daya manusianya maupun juga peralatannya. Ini saya kira hal yang kiranya terus disadari oleh rekan-rekan di BMKG. Kita dukung dan kita berikan **support** yang besar tanpa **reserve** tanpa. Oleh karena itu, selain SDM saya kira setiap tahun selalu melakukan pelatihan Pak, melakukan simulasi dan melakukan perbaikan generasi dan seterusnya. Tapi yang penting adalah sarana prasarana itu, sarana prasarana yang kita tahu bahwa harapannya cukup tinggi tetapi kemampuan kita **didalam** menyediakan sarana prasarana itu juga karena keterbatasan anggaran sehingga tidak memadai, itu suatu fakta yang kita tidak bisa hindari.

Nah oleh karena itu bagaimana dapat menggunakan keterbatasan anggaran itu untuk mendapatkan sarana prasarana yang berkualitas yang

Commented [K131]: TIDAK BAKU

Commented [K132]: TIDAK BAKU

Commented [K133]: DIPISAH



tahan lama tentunya, artinya berkualitas tidak hanya lima tahun, sepuluh tahun rusak tetapi yang bisa, nah ini tentu kita harus betul-betul amanah menemukan atau menentukan, menetapkan alat-alat yang benar dan baik, berkualitas. Dan yang paling penting adalah kalibrasi dan pemeliharaan, selama ini kan kita mengikuti dan menyaksikan betapa lemahnya kita. Kalibrasi dan pemeliharaan peralatan-peralatan kita yang dulu-dulu. Yang ini juga sering menjadi *excuse*, sering menjadi sasaran kritik kita tidak bisa bekerja optimal dan maksimal karena keterbatasan alat dan tidak berfungsinya alat itu dengan baik.

Nah saya senang bahwa didalam fokus pembangunan 2020 ini banyak kepada pemeliharaan dan kalibrasi. Namun saya belum mendapatkan kemantapan hati sebelum saya melihat presentasi anggaran untuk kalibrasi dan pemeliharaan itu sebenarnya berapa persen Pak dibandingkan pembangunan dan pengelolaan pengembangan alat peralatan atau pembangunan baru ya. Itu berapa persen jumlahnya dan berapa alokasi anggarannya dari sisi kuantitatif, tidak hanya lokasi dan lokusnya saja tetapi juga itu nanti untuk 2020 itu berapa persen nanti akan kita bisa kalibrasi dan kita pelihara selesainya itu. Ini tolong Pak Dwi bisa, agar kita semakin mantap, semakin yakin "oh iya sudah berada dalam". Kalau harapan kita dimasa yang lalu ketika kita menginformasi berbagai kejadian kan sasarannya Pak "ya gimana kita alat-alat kita juga banyak yang tidak berfungsi baik jadi tidak bisa menghasilkan produk yang baik, yang tepat dan informasi yang tepat dan cepat". Maka ini kita ingin memastikan itu supaya nanti tidak lagi menjadi sasaran, tidak lagi menjadi *excuse* dari itu. Itu yang pertama.

Yang kedua meskipun peralatan kalibrasi dan sarana prasarana kita baik, tetapi kalau sistem informasi dan diseminasi informasi kita itu juga lemah, itu juga tidak ada gunanya Pak Dwi. Maka ini harus kita perkuat ya diseminasi informasi terlebih sistemnya, sistemnya. Kecepatan kita supaya masyarakat itu langsung mendengarkan informasi-informasi kemungkinan ancaman bahaya kepada mereka ya. Ya kayak kasus di Palu, kaya banyaknya kapal tenggelam dan seterusnya, itu juga. Dan memang saya yakin tidak mungkin dengan anggaran yang terbatas ini bisa optimal. Oleh karena itu diperlukan suatu koordinasi, suatu sistem koordinasi dengan pemerintahan daerah dan lembaga-lembaga badan usaha transportasi atau apa yang lain begitu ya. Supaya ketenangan dan keamanan jaminan akan keselamatan itu bisa dapat diperoleh dengan yakin. Nah ini saya tidak tahu yang diseminasi informasi dari sisi politik anggaran kita berapa persen? Karena itu penting juga, penting sekali selain produknya berkualitas sistemnya dan diseminasi informasi ini penting.

Sebenarnya BMKG ini tidak hanya lembaga ini yang bertanggungjawab ya, karena ke-MKG-an itu juga dimiliki oleh semua lembaga yang lain. Artinya kementerian-kementerian lain itu harus memiliki wawasan ke-MKG-an. Tidak hanya jadi tanggungjawab BMKG tetapi kementerian-kementerian yang lain itu harus berpikir ke-MKG-an juga. Artinya apa? Artinya kalau memang dia tidak memiliki sarana prasarana dia selalu berkomunikasi dengan BMKG untuk

Commented [K134]: DIPISAH

Commented [K135]: TIDAK BAKU, CETAK MIRING

Commented [K136]: DIPISAH

Commented [K137]: IDEM

Commented [K138]: DIPISAH

Commented [K139]: DIPISAH



mendapatkan informasi. Misalnya PU ingin membangun bendungan, ingin membangun jembatan, ingin membangun apa, tetapi kalau *feeling* BMKG nya rendah atau *survey* BMKG nya rendah maka pembangunan itu bisa mubazir atau bisa "oh disini daerah yang sangat rawan gempa kok dibangun bendungan, dibangun jembatan, ya sudah barang pasti tidak akan bisa bertahan lama" misalnya gitu. Ini sejauh mana itu, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintahan disejajar horizontal itu. Kementerian Kelautan misalnya, dia kan juga memerlukan suatu informasi tentang cuaca laut. Kalau mereka jalan sendiri, jalan sendiri-sendiri kan sayang. Ya kalau perlu ya komunikasi itu lebih akrab lebih baik gitu supaya Kementerian Kelautan itu meleak MKG, meleak MKG ini penting.

Daerah-daerah yang disitu tandus atau daerah yang curah hujannya rendah kok dibangun embung, dibangun embung, bendungan ya kering terus gitu misa nya. Ini kadang-kadang tidak kita sadari, dianggap atau dipandang sebelah mata ini oleh kementerian ini "hah ini lembaga kecil saja kok". Atau mungkin mereka memiliki sarana prasarana sendiri bisa juga. Sebenarnya menurut undang-undang mereka itu harus kalau memiliki itu wajib untuk menyampaikan informasi kepada BMKG. Supaya terkoordinir gitu untuk informasinya kepada masyarakat. Bahkan juga kapal-kapal swasta pun yang memiliki MKG, memiliki peralatan itu dia wajib menyampaikan produknya kepada stasiun BMKG di paling dekat begitu. Jadi itu saya kira yang sangat penting tadi saya mohon untuk tiga hal tadi yang perlu diperhatikan tadi. Baik terima kasih.

Yang kedua Basarnas, Basarnas itu tujuan utamanya adalah menyelamatkan orang ya Pak sekecil-kecilnya. Artinya sebesar-besarnya bisa menyelamatkan orang. Itu tujuan paling utama, bukan menjadi pemimpin proyek bukan menjadi pengadaan, ya itu pengadaan itu dalam rangka itu, dalam rangka itu. Nah disini pengelolaan sarana prasarana kan 930 Miliar dari 1,2 Triliun. Nanti terlalu sibuk dengan proyek-proyek pengadaan itu lalu lupa tugas jati dirinya itu menyelamatkan orang sebenarnya ketika terjadi bencana. Artinya dengan kata lain mohon bisa ditanggapi atau dibaca bahwa yang saya maksudkan itu kemampuan kita atau keahlian kita untuk menyelamatkan dengan cepat dan tepat dalam waktu yang *respon time* yang cepat itu yang penting. Jangan kita lalu nanti terkesima dengan "oh ini membangun ini, membangun itu, pengadaan ini, pengadaan itu" lalu kemampuan kita lemah. Jadi fokus utamanya adalah itu.

Nah oleh karena itu politik anggaran kita harus seimbang, sejauh mana, berapa dalam atau berapa kuat politik anggaran kita untuk melatih orang-orang itu untuk bisa tidak hanya secara mental dia memiliki jiwa ketangguhan yang *luarbiasa* tetapi juga kemampuan teknis yang cukup baik juga. Latihan-latihan itu kan memerlukan anggaran kan, nah ini jauh dengan sarana prasarana ya 72 Miliar. Termasuk diantaranya pembinaan potensi SAR 24 Miliar, nah ini programnya bagus tapi dari sisi politik anggarannya ini menunjukkan kita belum

Commented [K140]: KATA ASING, MIRING

Commented [K141]:

Commented [K142]: KATA TIDAK BAKU, MIRING

Commented [K143]: DIPISAH



terlalu fokus pada upaya kita yang penting itu menyelamatkan orang itu dulu. Bukan berarti lalu pengelolaan sarana prasarana atau pengadaan barang sarana prasarana itu dikedepankan tidak, tetapi itu jangan sampai lupa. Barangkali sudah ya, syukur lah.

Nah saya juga mendukung tadi disini disebutkan SAR *goes to school*, SAR *goes to campus*. Ini yang penting Pak. Sebab dengan kemampuan keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan maka yang paling penting itu men-SAR-kan manusia Indonesia. Kalau setiap orang itu memiliki kemampuan untuk melakukan SAR sudah itu didepan mata ada kecelakaan kejadian dia secara mental itu bagaimana bisa didorong oleh kepedulianya itu tetapi juga mampu dia secara teknologi secara potensi, potensi SAR ini saya kira perlu. Lalu juga tentu maka *goes to campus*, *goes to school*, *goes to LSM*, *goes to organisasi-organisasi kemasyarakatan*, pokoknya potensi SAR itu kita berdayakan lah. Ya tentu dengan kerjasama aparat TNI itu juga potensi SAR yang besar. Yang juga harus selalu dijalin hubungan dengan baik.

Ini pelaksanaan operasi SAR ini 90 Miliar, selama ini cukup enggak Pak dengan anggaran segitu Pak? Memang susah ya, kita tidak bisa menduga besok akan terjadi kecelakaan apa saja, terjadi bencana apa saja kita susah memang. Tapi rata-rata anggaran yang selama ini kita anggarkan untuk tiap tahun itu cukup enggak untuk melaksanakan operasi SAR dalam tempo satu tahun itu? "wah Pak selama ini kurang" ya kenapa tidak kita tingkatkan, misalnya ini. Jadi anggaran SAR ini, operasi SAR saya kira perlu dipikirkan kembali untuk itu. Untuk kerjasama dengan negara lain saya kira perlu juga dalam rangka kemanusiaan itu kita harus memiliki kemampuan kita untuk mengundang negara-negara lain untuk ikut bergabung dalam penyelamatan manusia tadi.

Yang terakhir ini BPWS, saya kira BPWS masih eksis ya dan saya kira apa yang sudah diputuskan Bapak Presiden laksanakan sampai tuntas dan sampai sesuai dengan kita tuju ya tujuan kita yaitu untuk mengembangkan daerah sekitar Suramadu, wilayah Madura dan Surabaya yang saya kira ya mudah-mudahan lah sesuai dengan rencana. Tetapi begini Pak BPWS ini saya kira manusia ini semakin lama semakin *mobile*. Artinya *mobile* itu setelah dia hidupnya baik, hidupnya cukup dia akan melakukan wisata, melakukan tujuan perjalanan, melihat yang belum pernah dilihat. Di Madura itu potensi wisata saya kira cukup besar juga ya, apa selain industri juga mengelola daerah-daerah wisata Pak. Kan ada satu pulau yang memiliki sumber oksigen tertinggi di dunia, ini saya kira bisa menjadi daya tarik wisata untuk mereka-mereka yang mencari oksigen yang paling baik di dunia ini di Madura. Ini aksesnya maupun juga apa nya, ini kan masuk wilayah BPWS atau tidak, saya juga tidak tahu. Kalau yang persiapan lahan untuk industri dan sebagainya saya yakin saja lah. Jadi kita dukung itu untuk itu.

Commented [K144]: DIPISAH

Commented [K145]: DIPISAH

Commented [K146]: DIPISAH

Commented [K147]: TIDAK BAKU

Commented [K148]: DIPISAH

Commented [K149]: DIPISAH



Pak Ketua saya kira demikian, ini masukan sekaligus juga perbaikan anggaran ini untuk kedepannya. Terima kasih.

***Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Baik, demikian dari anggota sudah habis. Saya rasa begitu Pak ya. Nanti Bapak jawab tidak perlu panjang lebar. Pak Dwi Budi saya lupa ucapin selamat tadi Pak, saya ingat rupanya Bapak baru pertama kali rapat disini sebagai Sestama BMKG, selamat Pak Dwi Budi untuk mengemban tugas baru sebagai sestama di BMKG. Mudah-mudahan dengan Bapak sebagai sestama hubungan dengan Komisi V tetap oke baik. Komisi V ini kita dukung terus kerja BMKG Pak, untuk kiranya dari tahun ke tahun bisa memperbaiki seluruh sarana prasarana dan kinerja BMKG dalam menjalankan tugasnya.

Saya persilakan dulu dari Pak Sestama BMKG untuk menyampaikan secara *highlight* saja yang dianggap penting Pak. Ya saya rasa tapi yang paling penting adalah bagaimana melaksanakan catatan, masukan dan saran yang tadi disampaikan oleh teman-teman, sehingga *dipertemuan* berikutnya nanti betul-betul rinciannya jelas Pak ya. Program yang akan disampaikan kepada kita. Pak Ses, yang tadi mewakili Sestama Basarnas mungkin nanti juga perlu Pak disampaikan kepada kami bahwa *multiyears* yang disampaikan tadi apakah itu *multiyears* yang disetujui oleh Kementerian Keuangan, kalau dia sudah disetujui dengan persetujuan surat Menteri Keuangan nomor berapa kan gitu, disampaikan kepada kita, biasanya kalau *multiyears* yang disetujui oleh Kementerian Keuangan itu ada suratnya Pak. Atau memang itu sistem penganggarannya yang oleh Basarnas dibuat *multiyears*, tidak bisa dilakukan *singleyears* karena kekurangan anggaran. Jadi nanti disampaikan kepada kami di rapat berikutnya Pak ya, di rapat berikutnya.

Saya rasa itu saja untuk mempersingkat waktu saya persilakan dari BMKG dulu Pak untuk menyampaikan beberapa hal penting saja yang disampaikan oleh *teman-teman*. Lain-lain nanti adalah perbaikan untuk kita bertemu di rapat berikutnya. Kita masih ada dua kali lagi pertemuan Pak, baru nanti kita menuju kepada pengesahan anggaran. Kami persilakan Pak dari Sestama BMKG dulu Pak Dwi Budi silakan.

**SESTAMA BMKG (Ir. DWI BUDI SUTRISNO, M.Sc):**

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan.

Commented [K150]: DIPISAH

Commented [K151]: ISTILAH ASING, CETAK MIRING

Commented [K152]: TYPO



Jadi pertama-tama terima kasih atas saran dan masukan dari Bapak/Ibu sekalian. Dari Pak Jhoni Allen, Pak Bahrum, Pak Ketua Pak Lasarus, Pak Hamka, Bu Neng dan Pak Yoseph Umar Hadi. Pada prinsipnya kami bisa menerima apa yang disarankan oleh Bapak/Ibu sekalian. Dan kami akan mencoba untuk memperbaiki dari tampilan Pak ya, tampilan dari presentasi kami. Agar bisa Bapak/Ibu sekalian lebih tahu secara lebih detail. Dan kami juga setelah RKA-K/L ditetapkan, tentunya satuan tiga pasti akan kami kirimkan ya kepada Bapak/Ibu sekalian sebagai bahan untuk pengawasan pada saat pelaksanaan anggaran di tahun 2020.

Namun demikian ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan disini bahwa memang untuk hal-hal yang terkait dengan pertanyaan dari Bapak/Ibu sekalian, misalkan dari Pak Yoseph Umar Hadi terkait dengan perbandingan antara pemeliharaan Pak ya dibandingkan dengan belanja modal kami hitung sekitar 21%. 21% karena dari 421 Miliar dibandingkan sekitar 2 Triliun itu memang sekitar 21%. Yang kami harapkan memang kan peralatan butuh pemeliharaan Pak, sehingga dapat melakukan observasi menangkap sinyal-sinyal bahaya baik dari segi meteorologi, klimatologi maupun geofisika, sehingga kami berupaya alat-alat utama ini terpelihara dengan baik pak dalam memberikan informasi.

Dan terkait dengan tadi disampaikan oleh Bu Neng, memang tidak dalam porsi ini Ibu Neng ya terkait dengan dijadikan satu kementerian tapi kami sampaikan disini BMKG tidak hanya untuk *warning* terhadap bencana tapi juga *warning* terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah secara umum. Misalkan untuk klimatologi terkait dengan cuaca iklim, terkait dengan pertanian, kemudian terkait dengan konstruksi, terkait dengan transportasi, sehingga kami secara terus menerus menyajikan data-data yang disampaikan secara teratur, regular kepada instansi terkait, ada 100 lebih ya. Jadi misalkan di stasiun klimatologi Malang itu menerbitkan buletin yang disampaikan kepada lebih dari instansi terkait. Sehingga benar-benar informasi dari iklim itu benar-benar *terinformasi*. Tentunya selain itu ada info BMKG yang kami siapkan secara *online* sehingga sewaktu-waktu informasi itu bisa didapat.

Kemudian terkait nanti sekali lagi kami sampaikan bahwa kami mencoba seperti disampaikan Pak Jhoni Allen, per provinsi Pak kami sampaikan untuk presentasi berikutnya mungkin kami coba menjabarkan per provinsi kira-kira berapa alokasi anggarannya. Tentunya ini butuh waktu bagi kami mungkin di presentasi berikutnya akan kami laksanakan.

Saya kira itu yang dari kami, terima kasih.

Commented [K153]: TYPO

Commented [K154]: TIDAK BAKU



**Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.**

**F-P DEMOKRAT (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM):**

Intèrupsi sedikit Pimpinan.

**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Baik, silakan Pak Jhoni.

**F-P DEMOKRAT (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM):**

Ya Pimpinan ya, ini setelah saya baca ya 2017 ya, ini geofisika ya, apa namanya klimatologi. Karena saya tahu, tidak banyak orang paham ini karena baru. Tetapi jangan sampai enggak banyak paham orang, istilah di 2017 saya minta istilah di 2018-2019. Saya mau tanya nanti apakah istilah-istilah ini tidak sama hubungannya dengan apa ini, karena istilah-istilah ini, kalimat-kalimat ini kan program, tapi agak berbeda. Sehingga jangan Bapak ada satu khas pemikiran karena ini enggak apa ya haruslah. Kalau ibarat ini kalau tidak masuk dalam sini berarti kita anggap selesai. Jangan Bapak merubah istilah, merubah-merubah istilah yang kita (suara tidak jelas) seolah-olah baru. Ini juga Pimpinan untuk BMKG ini, karena saya lihat didalam lampiran-lampiran 2018-2019 berbeda misalnya disini penyelenggaraan operasional sistem klimatologi teknik geofisika potensial dan tanda waktu, disini hanya bicara penyelenggaraan operasional geofisika, hampir titik-titik lokasi. Bapak jangan bermain istilah-istilah ilmiah, ya ini saya ingatkan, saya ingatkan pakai istilah yang betul-betul permanen dalam konteks penganggaran. Jangan Bapak merubah-merubah, supaya kita *mudeng*. Jangan seolah-olah ini baru-baru, padahal itu-itu juga. Hati-hati saya ingatkan hati-hati. Ini tolong Bapak lihat di 2019, setelah saya, apa ini geofisika potensial tanda waktu. Saya lihat disini hanya penyelenggaraan operasional geofisika. Tapi dibawahnya hampir ada yang sama, ada yang tidak sama uraian kegiatannya. Ini saya ingatkan tolong ini, yang mana yang benar, saya minta dalam konteks pemeliharaan atau apa pakai istilah dari tahun ke tahun hal yang sama kecuali ada persolan baru dalam temuan klimatologi atau geofisika, karena memang tidak tahu ya. Kita juga sama-sama lulus sekolah mulai dari SD, kalau dulu TK jarang, kita sama-sama lulus Sekolah Dasar. Jadi jangan main-main Bapak karena ini baru dan memang ilmu ini tidak begitu sifatnya umum saya tahu ini, jangan menjadi sesuatu Pak Ketua ini. 2019 2000 berapa hampir, lokasinya sama ini. Nah itu satu.

Disini juga saya lihat tidak ada bicara soal perbedaanya, apa memang sudah tuntas ini di 2019 ada namanya sekolah lapang iklim, sekolah lapang

Commented [K155]: TIDAK BAKU

Commented [K156]: TIDAK BAKU, CETAK MIRING

Commented [K157]: TYPO

Commented [K158]: IDEM

Commented [K159]: TYPO



nelayan, sekolah lapang geofisika, terlampir, lah kok saya lihat disini enggak ada. Apa memang enggak ada berarti kita anggap berarti program itu selesai kan kira-kira begitu, atau memang rutin. Atau ada istilah lain lagi disini. Nah ini tolong supaya kita nyambung Pak. Jadi jangan Bapak yang paham, kami juga harus paham, nah paham itu harus, kalau memang katakanlah itu dari awal katakanlah bentuknya adalah A, ya Bapak seterusnya ngomong A, jangan nanti A ini gitu loh. Kecuali memang persoalan program baru didalam penjelasannya.

Jadi saya ingatkan, karena apa, hampir enggak bisa ini apa ini, berbeda-beda saya bingung. Walaupun sesama geofisika, ini geofisika tapi ini sistem (suara tidak jelas) teknik geofisika potensial dan, beda enggak dengan ini nih? Tapi uraian dibawahnya hampir sama juga kok, pemeliharaan sistem proses gempa bumi dan tsunami 36 lokasi disini sekian lokasi. Disini ada contoh nih, disini 41 lokasi tapi disini 40 lokasi. Apakah ini lokasi yang berbeda atau lokasi yang sama? Kenapa dulu 41 kenapa 40 misalnya. Ini tolong ya, jadi Bapak jangan terjebak, kami akan seperti kata Pak Ketua, kami akan mengikuti lampiran-lampiran yang Bapak buat sebelumnya, ada nanti, 40, 41. Apakah menjadi 31? Kenapa dulu 41 kenapa sekarang 40 misalnya. Ini harus *clear* dalam *terminology* yang sama ya.

Jadi saya minta ini yang membuat perencanaan ini, "bolehlah DPR tidak tahu apa-apa itu, paling *cuman ngomong doang*" hati-hati, hati-hati Pak. Kita akan nanti, apalagi apa kita akan *disc* bahkan kalau perlu kita angkat, BMKG kalau perlu kita suruh periksa. Jangan karena baru, Bapak main-main, kita tahu barang ini juga barang ini memang juga bukan barang umum, kita tahu Pak, saya paham. Kalau semen, batu semua segala sudah tahu, tapi barang ini bukan barang umum. Saya tahu jadi Bapak jangan main-main. Saya mintakan BMKG, Eapak jangan main-main.

Secara khusus nanti walaupun saya juga bisa berikan secara ini, kalau saya buktikan ada sesuatu yang tidak terbuka dalam hal ini. Ini sangat kita dukung karena persoalan alam, persoalan ini, tetapi jangan Bapak main-main disini, karena Bapak, memang ini tidak banyak orang mengerti. Jurusan ini pun dulu jurusan yang sangat tidak banyak, karena memang, tapi sekarang ini menjadi persoalan yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini karena persoalan *perubahan cuaca*.

Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Baik, itu koreksi dari Pak Jhoni. Saya rasa Pak cukup jadi catatan ya Pak Dwi ya. Nanti diperbaiki *dipertemuan* berikutnya. Kita percaya Pak juga disana ada audit dan segala macam, tapi dalam konteks pengawasan tentu

Commented [K160]: ISTILAH ASING, CETAK MIRING

Commented [K161]: KATA TIDAK BAKU DIGARIS MIRING

Commented [K162]: TYPO

Commented [K163]: DIPISAH



penyusunan anggaran ini harus kita sama-sama memahami Pak. Karena kami disuruh menyetujui sesuatu yang kami *ndak* paham, ini kan lucu nanti nih. Jadi kita menyetujui.

**F-P DEMOKRAT (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM):**

Sebentar Pimpinan, terima kasih ya.

Tahun 2019 sama itu, pemeliharaan gedung tower radar cuaca belanja rutin UPT, 2019 41 lokasi, di 2020 diusulkan 40 lokasi. Mana ini yang benar nanti? Apakah menjadi 81 lokasi? Ini sudah selesai? Tapi disini bicara rutin, belanja rutin UPT. Di 2020 40 lokasi, 2019 41 lokasi, tadi itu yang membuat saya, apakah memang 41 atau memang sudah bagus? Ah ini nanti minta penjelasan. Coba baca 2019 41, karena tertarik saya belanja rutin, ya toh kira-kira begitu ya, 41, 40 berarti ada 1 lokasi yang apa? Kira-kira begitu Pak. Terima kasih ya, sebutkan nanti.

**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Baik. Selanjutnya saya persilakan Pak dari Basarnas Pak. Nanti singkat saja seperti yang disampaikan oleh Sestama BMKG. Yang paling penting nanti adalah perbaikannya Pak. Perbaikan seluruh rincian program yang Bapak sampaikan itu, sehingga dapat dipahami oleh kami kegiatannya kemudian lokasi kegiatannya dimana, sasaran anggaran yang akan *dalokasikan* nanti Bapak yang sampaikan. Jadi kita jangan terjebak juga Pak, saya melihat mitra ini mungkin karena ada putusan Mahkamah Konstitusi lalu anggota tidak boleh masuk pada satuan tiga, kalau Bapak menyusun satuan tiga kan kami kan tidak masuk kesana, kami kan *pengin* tahu satuan tiganya dimana gitu loh. Toh nanti satuan tiganya juga disampaikan kepada kami Pak, pada saatnya nanti setelah ditetapkan. Nah kan harus diketahui, bagaimana kita menyetujui ini kita juga bingung pada sistem berlaku ini, sehingga kami tidak bisa melaksanakan fungsi kami secara maksimal. Jadi kita sudah koreksi Pak dari mitra kita seperti yang saya sampaikan tadi PU, Perhubungan semua sudah melaksanakan koreksi kita, Menteri Desa juga sudah melaksanakan koreksi kita, terkait hal ini semua sudah, lokusnya, kemudian besarnya anggaran itu sudah mereka sampaikan kepada kita. Bukan kami yang menentukan, tapi Bapak-Bapak yang menentukan. Dalam konteks pengawasan kami wajib untuk tahu.

Silakan Pak.

**(KASET 3 HABIS)**

**DIREKTUR OPERASI BASARNAS (Brigjen TNI (Mar) BUDI PURNOMO, S.I.P, M. Agr):**

Commented [K164]: DIPISAH

Commented [K165]: ISTILAH ASING, CETAK MIRING

Commented [K166]: TYPO

Commented [K167]: KATA TIDAK BAKU, CETAK MIRING



Anggota **Komis V** sekalian yang saya hormati.

Commented [K168]: TYPO

Terima kasih tadi banyak masukan-masukan yang diberikan kepada Basarnas. Yang pertama dari Pak Jhoni Allen, tadi memberikan masukan-masukan supaya dijelaskan angka-angkanya. Tadi sebagai contoh misalnya alkom 4 lokasi itu dimana saja, baik Bapak nanti kami akan perbaiki, nanti kami akan tindak lanjuti hal tersebut. Termasuk juga tadi Pak Bahrum juga memberikan masukan-masukan hampir sama juga secara detail untuk dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Termasuk tadi dari Bapak Ketua masalah rapat yang kemarin itu menjadi acuan bagi pelaksanaan RDP saat ini. Nanti kami akan sesuaikan Bapak Ketua apa yang menjadi poin-poin ataupun menjadi penekanan dari Komisi V sekalian.

Termasuk tadi dari Pak Hamka, juga menyampaikan tentang pengawasan dan pelaksanaan program di tahun 2020, nanti kami akan segera menyesuaikan. Termasuk juga dari Bu Neng tadi, tentang *respon time* harus ditingkatkan, terima kasih Bu Neng. Nanti kami akan selalu meningkatkan Bu untuk *respon time* ini sehingga kita bisa melayani SAR kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Kemudian yang terakhir tadi dari Pak Yoseph, Pak Yoseph menyampaikan bahwa program-program yang ada di Basarnas terutama tadi yang disampaikan adalah masalah pembinaan potensi SAR perlu ditingkatkan, memang kami selalu berusaha untuk meningkatkan Pak. Diantaranya SAR *goes to school* maupun pembinaan potensi yang lain. Termasuk disitu anggarannya tadi disampaikan oleh Pak Yoseph, nanti kami akan evaluasi kembali. Jadi untuk SAR *goes to school* maupun pembinaan potensi yang lain kami akan tingkatkan terus sehingga pelaksanaan operasi kita akan lebih mudah karena kita mempunyai banyak potensi yang ada di daerah-daerah ya. Termasuk juga tadi masalah anggaran untuk operasi kita juga harus mendapatkan perhatian. Memang saat ini kita masih ada beberapa kegiatan operasi yang masih ada kekurangan, khususnya yang berada di kantor-kantor SAR.

Saya rasa itu Pak ketua yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya dari Basarnas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas masukan-masukan yang diberikan oleh Bapak/Ibu sekalian.

Terima kasih.

**Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.**



**Shalom.**

**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Baik, terima kasih.

Silakan dari Bapel BPWS. Singkat saja Pak, nah Bapak punya anggaran ini. Tapi saya juga tadi tertarik dengan yang Bu Neng sampaikan Pak ya. Ini saya biasanya kalau BPWS ini tidak terlalu apa, karena anggarannya juga kecil dan bahkan kita pernah diskusi disini apa enggak badan ini kita **didegradasi** saja ke *sorry* di mungkin digabung ke PU saja supaya lebih, ya Cipta Karya lah atau apa lah. Tapi kalau Lumpur Sidoarjo kan sudah jadi salah satu bagian di PU toh Pak. Nah ini kok saya juga bingung BPWS ini kepalanya enggak diangkat-angkat, sampai hari ini belum ada Pak ya, definitifnya? Tapi juga dibiarkan terus belum lengkap. Ini kita sudah rapat beberapa kali, nah ini yang tadi disampaikan oleh Bu Neng itu saya **bertanya-juga**, apakah kita ini bikin-bikin sesuatu supaya ada kegiatan lagi, ada kegiatan lagi gitu. Ini mendapat perhatian serius dari kita nanti Pak kegiatan ini ya. Tapi yang penting menurut saya sih terkait dengan fungsi Pak dan prospek kedepan itu seperti apa, kawasan ini mau kita kembangkan nanti *output* dan *outcome*-nya apa yang mau kita dapatkan. Dari sana saya pikir ini penting disampaikan kepada kita. Saya mohon **dirapat** berikutnya nanti Bapak coba kupas ini ya. Tadi saya lihat teman-teman di komisi ini dengan BPWS ini Pak hampir saya katakan sudah hampir apatis Pak sudah. Ya sudah lah kita setuju saja, ya sudahlah kita setuju, setuju saja kan jadi. Tapi bagaimana pun ini uang negara yang harus kita pertanggungjawabkan secara bersama-sama yang jumlahnya juga tidak kecil Pak atau besar juga jumlahnya. Tahun ini anggaran berapa tadi total Pak?

**DEPUTI PERENCANAAN BAPEL BPWS (Dr. Ir. AGUS WAHYUDI, SE, MM):**

2019, 218.

**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Ya 218 Miliar Pak. Ini juga bukan uang kecil yang harus kita pertanggungjawabkan secara bersama-sama. Singkat saja Pak silakan, mudah-mudahan jam 5 kita sudah selesai.

**DEPUTI PERENCANAAN BAPEL BPWS (Dr. Ir. AGUS WAHYUDI, SE, MM):**

Commented [K169]: DIPISAH

Commented [K170]: PEMBERIAN TANDA BACA YANG KURANG TEPAT

Commented [K171]: DIPISAH



Terima kasih.

Yang pertama terima kasih Pak Jhoni Allen, kami terus akan meningkatkan penjelasan-penjelasan tentang penggunaan anggaran pasti. Kemudian tadi ada yang dari Pak Bahrum, Pak bahrum enggak ada “kok ada pembangunan infrastruktur?” memang ada tugas untuk itu, tapi tidak seluruhnya ditangani oleh BPWS. Misalnya kalau disektor ada kewenangan jalan, ya jalan sektor gitu. Semuanya begitu. Nah ini provinsi juga demikian, sedangkan yang kita dekati ini adalah yang dari kabupaten. Yang kalau jalan tidak nyambung dengan jalan yang provinsi jalan yang itu enggak nyambung. Tapi kami hanya stimulasi saja, misalnya jalannya 20 kilometer kami hanya memulai dengan 2,7 kilometer gitu. Kita sudah matok tidak boleh lebih dari 20% dari total pembiayaan.

Kemudian Bu Neng, iya memang Bu Neng, Indonesia *Islamic Science Park* ini memang digagas oleh Bu Gubernur Jawa Timur 101 hektar. Kami sekarang ini sedang terus menerus melakukan koordinasi dengan pemprov, agar nanti apa yang sudah kita ada itu menjadi bagian terintegrasi dari pembangunan IISP Bu. Jadi kita terus menerus melakukan koordinasi terus, sedangkan konsep IISP sendiri secara detailnya belum ada. Tapi kita menawarkan, “ini BPWS sudah punya ini, bisakah ini dijadikan satu bagian daripada gagasan untuk IISP itu?” demikian, seterusnya.

Terus kemudian kalau posisi dan kerjasama LRT ya Bu ya, LRT ini memang ada didalam kawasan IISP itu Ibu Gubernur mengatakan nanti akan ada dibangun LRT disana, tapi didalam kawasan itu saja LRT itu. Kami akan men-support itu dengan apa yang bisa oleh BPWS dan apa yang bisa dipertanggungjawabkan oleh BPWS jadi begitu. Nanti bisa ter-connect dengan kawasan-kawasan yang kita rencanakan atau yang sudah kita bangun kalau memang itu dibangun LRT.

Terus kemudian dari Pak Yoseph Umar Hadi ya, kami akan melaksanakan Pak instruksi presiden Pak, jadi supaya kami rencanakan sesuai dengan rencananya dan instruksi dari presiden seperti apa, pasti kita akan melaksanakan itu.

Demikian Pak, terima kasih.

Commented [K172]: NAMA ORANG, HURUF KAPITAL

Commented [K173]: DIPISAH

Commented [K174]: TIDAK BAKU, CETAK MIRING

Commented [K175]: IDEM

Commented [K176]: KATA TIDAK BAKU, CETAK MIRING

Commented [K177]: TYPO

Commented [K178]: TYPO

Commented [K179]: DIPISAH

Commented [K180]: IDEM



**F-P DEMOKRAT (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM):**

Pimpinan, sedikit Pimpinan.

Ini tahun lalu ya Pak Agus ya, tahun lalu ini kan lahan ya, tahun lalu sudah sekian hektar ya, tolong dijelaskan dong, biasanya setiap tahun itu, 2018 ditambahkan 2019, kan ini kan pembebasan lahan sama pembangunan apa dikawasan itu. Volume itu saja kerjanya ini kan, oke enggak apa-apa selama itu programnya. Tapi maksud saya kita lihat *progress report* nya yang kemarin itu sebetulnya lahannya yang paling banyak, sebenarnya kalau kawasan sebetulnya kalau dari target dari situ sudah melebihi kalau melihat daripada perspektif program awal ya. Itu maksudnya gambaran itu selalu harus muncul Pak, jangan diputus, saya lihat putus. Itu satu.

Commented [K181]: DIPISAH

Yang berikutnya sudah ada enggak yang menggunakan, ini kan model Batam dulu ini kan? Bebaskan lahan, jasa, sudah ada enggak melakukan kegiatan dengan nyewa, atau dengan *sharing* apa disitu? Dengan lahan dan kawasan yang sudah terbangun selama ini, sudah ada enggak? Yang saya dapat informasi ya belum gitu. Tapi ya mudah-mudahan saya salah infomasinya. Mungkin sedikit bisa langsung Pak Ketua.

Commented [K182]: KATA TIDAK BAKU, CETAK MIRING

Commented [K183]: TYPO

**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Silakan, silakan, silakan.

**DEPUTI PERENCANAAN BAPEL BPWS (Dr. Ir. AGUS WAHYUDI, SE, MM):**

Baik terima kasih Pak Jhoni Allen.

Jadi pertama kita membebaskan 10 hektar, pertama kali. Karena kita lima tahun kita terkendala dalam pembebasan itu, 10 hektar dulu kita selesaikan ditahun 2016. Kemudian kita perluas lagi, karena lokasinya tidak sama Pak gitu kan. Tapi peruntukannya untuk pariwisata juga yang mendekati pantai, jadi artinya dari jembatan semua Pak Suramadu itu nanti terlihat begitu. Disitu juga ada sesuatu kegiatan pariwisata yang cukup indah itu Pak, itu 30 hektar sampai 40 hektar.

Commented [K184]: DIPISAH

Commented [K185]: TYPO

Commented [K186]: TIDAK BAKU

Terus tahun 2019 ini kita membebaskan lahan kurang lebih 7 sampai 8 hektar yang di pantainya Pak, di pesisirnya di bawah jembatan Suramadu itu,



karena apa, karena itu sangat harus kita amankan dari situ supaya tidak ada bangunan-bangunan yang liar seperti *anu* itu. Berbahaya untuk keselamatan atau ketahanan jembatan Suramadu sendiri. Itu kita perbaiki supaya bibir pantainya juga sangat indah bisa dilihat oleh dan kebetulan Gubernur Jawa Timur juga memandang seperti itu, IISP ini supaya terlihat di jembatan Suramadu di *main bridge* nya itu "wah itu ada IISP" gitu, sehingga kita usulkan untuk bisa terintegrasi lagi disitu. Kami sudah mulai ini Bu, supaya ini menjadi bagian dari itu sendiri.

Terus kemudian, saya kira kalau seluruh lahan yang 600 itu tentu pemerintah tidak akan membiayai itu Pak. Kami mencari investor untuk menggandengnya itu. Tapi sudah ada yang sekian, *segini* gitu. Biasanya kalau yang sudah kita temui, kita dekati itu nah *sharing*-nya pemerintah apa *gitu* loh? Kami *ndak* bisa *anu*, lah ini kami tawarkan gitu Pak, ini ada ini yang bisa dipergunakan sebagai bagian investasi *sharing* dari pemerintah. Termasuk ini nih, nanti 2020 kita beresin yang di kawasan khusus Madura itu yang untuk kawasan industri dan pelabuhan Pak. Jadi beda lokasi yang sudah ini.

Nah ini selanjutnya nanti *diistu* kita tawarkan juga, kita sudah mempunyai 50 hektar target kita. Nah kita kalau ada *backlog* nanti tambah lagi 45 jadi 95 hektar, begitu Pak.

**F-P DEMOKRAT (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM):**

Masuk ya, sedikit Pimpinan.

**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Ya, silakan.

**F-P DEMOKRAT (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM):**

Sudah ada belum? Ya itu kan maksud saya itu sudah diceritakan, maksud saya dari cerita itu sudah ada terealisasi belum? Itu pertanyaannya.

**DEPUTI PERENCANAAN BAPEL BPWS (Dr. Ir. AGUS WAHYUDI, SE, MM):**

Commented [K187]: TIDAK BAKU

Commented [K188]: TIDAK BAKU, CETAK MIRING

Commented [K189]: TYPO, TIDAK BAKU, CETAK MIRING



Oh belum Pak. Karena begini Pak, untuk kerjasama ini kan ada proses prosedur yang harus kita lakukan. Maka kami disitu kita melakukan *outline business case* dulu OBC.

#### F-P DEMOKRAT (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM):

Pak, Pak. Enggak usah Bapak *ceritain* itu. Pak makan tuh ada prosedurnya Pak. Pesan ikan, sayu, teh, apa saja (suara tidak jelas). Makan saja ada prosedur Pak, enggak ada tiba-tiba datang nasi, itu kira-kira. Itu jawab saja "belum" kenapa belum? Dimana? Ya kan? Karena begini ya toh, kan saya sangat senang dengan presiden ini maunya cepat. Saya setuju itu. Ya tapi kalau begini *gimana* ya? Nah contoh ya. Nah apalagi Pimpinan disini sedikit saja nih, undang-undang kita tadi kemarin ditunda, kita sudah ini kan gara-gara, ya maksud saya jangan gitu dong, dukung dong. Bapak Presiden kemana-mana saya lihat itu luar biasa ke daerah-daerah *gitu* loh, maksud saya ya apa, saya kira enggak ada yang sulit. Ya kalau itu untuk pembangunan bangsa yang mendatangkan uang. Saya kira DPR pun tetap lalu ketok langsung, enggak perlu *nanya*.

Ya itu jadi belum, nah jadi itu jawabannya belum sama sekali walaupun dengan ini segala macam. Ya sudah cukup Pimpinan, sudah berarti belum. Karena memang saya dengar juga belum, saya kira tadi dengan penjelasan tadi sudah ada enggak *gitu* loh. Kan penjelasan tadi kan menarik, ini ya kan gitu, biasanya begitu. Tapi sudah ada belum terealisasi, kan itu pertanyaannya. Berarti belum, nah soal belumnya kita berharap dengan Bapak tadi ada disana, ada disini kita berharap bagaimana supaya minimal terealisasi entah satu titik, dua *titik* dalam perspektif pola pemikiran apa dulu terhadap Suramadu. Itu saja harapan kita, supaya uang yang hampir rata-rata 200 sampai 250 Miliar tiap tahun bisa bermanfaat secara komprehensif untuk bangsa ini. Biar bisa menghasilkan investasinya. Ya kalau memang dikasih kemudahan ya kasih dulu kemudahan, supaya investasi datang. Ya ini mohon maaf Pak Ses, ya toh. Orang juga gitu, daripada kosong kontrakan tadinya 10 Juta ya 5 Juta juga enggak apa-apa. Begitu laku bisa naik kan kira-kira begitu misalnya kerjasamanya.

Demikian saja Pimpinan, terima kasih.

#### KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):

Commented [K190]: DIPISAH

Commented [K191]: KATA TIDAK BAKU, CETAK MIRING

Commented [K192]: CETAK MIRING TIDAK BAKU

Commented [K193]: TIDAK BAKU, CETAK MIRING

Commented [K194]: TIDAK BAKU, CETAK MIRING

Commented [K195]: CETAK MIRING, TIDAK BAKU

Commented [K196]: TYPO



Bak. Saya rasa tidak perlu Bapak perdebatkan ini Pak. Tinggal diperbaiki kalau memang ada datanya ada ini disampaikan kepada kita di rapat berikutnya. Ini kan masukan ini, anggota ini memberikan saran dan pendapat Pak. Tidak kita untuk berdebat. Saya rasa demikian. Masih ada?

**F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I):**

Sebentar tambahan sedikit ya.

**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Silakan.

**F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I):**

Terkait untuk BPWS mungkin kita nanti untuk rapat selanjutnya untuk mohon mungkin kesepakatan-kesepakatan yang sudah diambil bersama pemprov itu bisa, kalau misal menggunakan lahan apakah semuanya atau berapa, terus kemudian sisa wilayah BPWS tinggal berapa dan sebagainya, peranannya seperti apa BPWS disitu itu gitu kan, terus nanti setelah jadi itu bagaimana, baik sebelum maupun setelah itu juga setelah jadi itu peranan BPWS dimana, terus misalkan kalau ada bagi hasil misalkan antara pemprov dan BPWS seperti apa dan sebagainya, mohon itu nanti konsep-konsep kerja dan kerjasama saat ini. Dan kedepan mohon nanti disampaikan ketika, walaupun sebenarnya ini kan karena investasi ya anggaran 53 Triliun kan investasi, kita tetapi kita hanya ingin tahu saja gitu, walaupun tidak secara ini kan tidak dipertanggungjawabkan. Tetapi karena BPWS ini adalah mitra Komisi V maka tentu kita juga ingin tahu. Nah kalau untuk semacam laporan pertanggungjawabannya nanti tentu yang anggaran dari APBN misalnya dipakai untuk koordinasi apa dan sebagainya. Tetapi kalau yang itu bukan pertanggungjawaban, hanya melaporkan saja, ingin tahu posisi dan peran BPWS dalam hal kerjasama itu seperti apa.

Commented [K197]: DIPISAH

Commented [K198]: DIPISAH

Mungkin itu saja, terima kasih.

**F-P GERINDRA (Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO):**

Izin Pimpinan.

**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**



Interupsi Mas ya? Ya interupsi jangan panjang-panjang. Kita sudah mau selesai ini.

**F-P GERINDRA (Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO):**

Ya Pak, interupsi. *Ndak-ndak anu* hanya sedikit saja untuk mohon izin..

**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Ya, silakan, silakan.

**F-P GERINDRA (Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO):**

Terima kasih Pimpinan.

Langsung saja, ini kebetulan kan beberapa kali kita suarakan untuk terutama untuk Basarnas, yang menjadi ujung tombak daripada keselamatan baik itu claan bencana maupun dalam kecelakaan transport. Jadi kalau saya lihat tadi anggarannya yang paling banyak 1,5 Triliun itu adalah anggaran operasional penanganan untuk penanggulangan ya Pak ya. Dalam arti mungkin Bapak sudah menghitung jumlah bila terjadi suatu kecelakaan atau bencana, itu dengan adanya itu dihilangkan berarti hampir dikatakan Bapak lumpuh dari sisi operasional. Operasional penanggulangan bencana itu sendiri. Jadi inii berarti apa, kami akan memperjuangkan ini Pak di Badan Anggaran, karena ini bukan untuk kepentingan Bapak, tapi ini adalah untuk kepentingan rakyat Pak. Jadi itu yang terus terang kami suarakan keras ya Pak. Kemarin kita sudah suarakan di Paripurna, kita harapkan diakhir daripada pembahasan anggaran ini bisa direalisasikan 100%. Ini yang kita harapkan. Dan pasti Pak Jokowi akan perhatian Pak terhadap keselamatan daripada nyawa publik ini. Dan pasti beliau akan memperhatikan, kalau enggak pasti saya akan teriak keras lagi Pak. Jadi ini yang moga-moga ini bisa direalisasikan dengan baik. Saya kebetulan duet sama Pak Hamka, jadi luarbiasa kita suarakan keras di Badan Anggaran.

Terima kasih Bapak Pimpinan, hanya itu saja Pak. Moga-moga bisa terealisasi dengan baik.

**Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.**

Commented [K199]: KATA ASING CETAK MIRING

Commented [K200]: SPASI

Commented [K201]: PERLU SPASI

Commented [K202]: CETAK MIRING, KATA TIDAK BAKU

Commented [K203]: PENGAL

Commented [K204]: CETAK MIRING KATA TIDAK BAKU



**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Baik, ini Komisi V ini **luarbiasa** dukung Basarnas Pak ya, sampai sudah teriak-teriak dari Paripurna sampai ke Banggar, itu bentuk dukungan kita kepada mitra kerja Pak. Kalau BMKG kan sudah dapat tambahan, Basarnas belum. Bicara penting semua sama penting Pak, Indonesia yang luas ini sering kali kita telat *respon time* kita belum bisa maksimal untuk mengejar titik-titik dimana terjadi kecelakaan dan seterusnya. Apalagi negara kita ini adalah negara yang luas kemudian berada di lingkar api yang tingkat potensi bencana itu sangat tinggi sekali. Oleh karenanya kita berpikir bahwa tidak mungkin kita bekerja manual Pak hari begini untuk mengejar kecepatan yang harus kita lakukan dalam **upaya** penyelamatan.

Saya rasa cukup tadi kita semua, nanti kita masih ada Pak pertemuan berikutnya kita Pak, kita akan lihat **sejauhmana** nanti pembahasan di Badan Anggaran kita tunggu Mas Bambang dan Pak Hamka dan teman-teman yang di Banggar. Mudah-mudahan mitra kerja Komisi V ini bisa kita *support* secara maksimal dalam rangka mengejar *backlog* yang jauh tertinggal. Baik saya rasa langsung saja kita ke kesimpulan rapat. Saya persilakan untuk ditampilkan.

Ya poin satu. Ini kesimpulan rapat kita pada hari ini, draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sestama BMKS, kemudian Basarnas dan Bapel BPWS.'

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Sestama BMKG, Deputi Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan, (jadi *ndak* usah lagi deputi, disini langsung saja Sestama juga enggak usah disebutkan ya? Apakah dia langsung disebutkan? BMKG, Basarnas dan Bapel BPWS. Ini kan sudah mewakili institusi) Mengenai rincian rencana kegiatan atau kerja dan anggaran masing-masing unit kerja Eselon I BMKG, Badan Nasional Perencanaan dan Pertolongan (Basarnas) dan Bapel BPWS termasuk program kegiatan strategis tahun anggaran 2020 sebagai berikut: (ini angka-angkanya maksudnya ini Bang, nanti catatan kita ada **dibawah dipoin** tiga nya yang Pak Jhoni sampaikan, ini yang seperti tadi saya bacakan di awal ya)

- BMKG Pagu Kebutuhannya Rp. 3.860.788.842.000,-. Kemudian Nota Keuangan RAPBN Tahun 2020 Rp. 3.056.259.932.000,-. Jadi ada kekurangan Rp. 804.528.910.000,-.
- Dengan rincian program dukungan **managemen** dan **pelaksanaan** tugas teknis lainnya itu Pagu Kebutuhannya Rp. 796.261.249.000,-. Kemudian Nota Keuangannya adalah Rp.

Commented [K205]: TIDAK BAKU, CETAK MIRING

Commented [K206]: TYPO

Commented [K207]: DIPISAH

Commented [K208]: DIPISAH, SPASI

Commented [K209]: IDEM

Commented [K210]: TYPO

Commented [K211]: TYPO



377.635.616.000,-. Sehingga ada kekurangan Rp. 418.625.633.000,-.

- Kemudian Pengembangan dan pembinaan BMKG. Pagu Kebutuhannya Rp. 3.064.527.592.000,-. Nota Keuangan RAPBN 2020 Rp. 2.678.624.316.000,-. Sehingga ada kekurangan Rp. 385.903.277.000,-.
- Selanjutnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Pagu Kebutuhannya Rp. 4.657.803.455.000,-. Kemudian Nota Keuangannya Tahun 2020 Rp. 2.253.647.651.000,-. Sehingga ada kekurangan Rp. 2.404.155.804.000,-. Yang terdiri dari:
  - Program managemen dan pelaksana tugas teknis lainnya yaitu Pagu Kebutuhannya Rp. 700.702.622.000,-. Nota RAPBN nya Rp. 602.764.844.000,-. Kemudian ada kekurangan Rp. 97.937.778.000,-.
  - Program peningkatan sarana dan prasarana Rp. 377.172.215.000,-. Kemudian di Nota Keuangan Rp. 145.095.797.000,-. Sehingga ada kekurangan Rp. 232.076.422.000,-.
  - Kemudian Program pengelolaan pencarian dan pertolongan dan penyelamatan Pagu Kebutuhannya Rp. 3.579.928.614.000,-. Di Nota Keuangan 2020 Rp. 1.505.787.010.000,-. Sehingga ada *backlog* atau kekurangan Rp. 2.074.141.604.000,-.
- Bapel BPWS Pagu Kebutuhannya Rp. 317.000.000.000,-. Di Nota Keuangan Rp. 215.921.503.000,-. Sehingga ada kekurangan Rp. 101.078.497.000,-.

Selanjutnya Komisi V DPR RI akan memperjuangkan peningkatan anggaran BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Bapel BPWS sesuai dengan mekanisme dan proses pembahasan RUU Tentang APBN di DPR RI.

2. Komisi V DPR RI dan Sestama BMKG, Komisi V DPR RI dan, Komisi V DPR RI dan BMKG, Basarnas (tadi disesuaikan dengan tadi ya), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Bapel BPWS sepakat bahwa program dan kegiatan masing-masing unit kerja Eselon I BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Bapel BPWS pada tahun anggaran 2020 antara lain diprioritaskan dari hasil kunjungan kerja dan masukan hasil rapat kerja atau Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI mengenai program pembangunan daerah yang sangat dibutuhkan masyarakat di provinisi, kabupaten/kota tertentu dalam rincian program RAPBN Tahun Anggaran 2020.
3. Komisi V DPR RI meminta BMKG dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk menyempurnakan (termasuk Bapel BPWS, tidak, BPWS cukup tadi ya). Baik, Komisi V DPR RI meminta BMKG dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk

Commented [K212]: TYPO

Commented [K213]: TYPO



menyempurnakan format paparan dan rincian program sampai dengan satuan dua berdasarkan fungsi terhadap kegiatan *output* dan *outcome* dalam RAPBN Tahun Anggaran 2020 serta menyesuaikan dengan hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) tanggal 27 Agustus 2019 yang antara lain memperhatikan dan mengakomodasi saran, masukan dan usulan Komisi V DPR RI dalam rapat-rapat pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun 2020 serta hasil kunjungan kerja reses, spesifik atau per **orangan** dan segera menyampaikannya kepada Komisi V DPR RI.

Pak Jhoni, ada yang mau disempurnakan, silakan.

#### F-P DEMOKRAT (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM):

Terima kasih.

Pertama saya lihat ya BMKG ya ini luar biasa loh. Coba BMKG dari anggaran kebutuhannya, khusus dalam katakanlah pengembangan dan pembinaan MKG, kebutuhannya 3 Triliun dipenuhi 90% 2,67, ini saya kira menurut saya dari semua departemen/lembaga 90% hanya BMKG yang diusulkannya 3,6 yang sementara BMKG dalam konteks peran dukungan itu 709 **managemennya** hanya kurang 45. Apa artinya? Pemerintah melihat ini sangat katakanlah kebutuhan. Nah oleh karena itu, oleh karena itu jangan karena ini kebutuhan tapi kebutuhan ini juga ada batas optimalnya dalam konteks kebutuhan kita **didalam** menangani perubahan cuaca dan tupoksi BMKG. Oleh karena itu harus digambarkan dengan pemenuhan anggaran yang demikian besar ini baru kali ini saya lihat 90% dari kebutuhan, 3 Triliun 64 Miliar dikasih hampir 2,7. Artinya hampir 90%. Oleh karena itu artinya kebutuhan Bapak dalam tahun ini dipenuhinya 90%. Nah saya mau lihat nantinya **didalam** tambahan penjelasan berikutnya kira-kira dalam kondisi yang sekarang, ya toh, Bapak yang lebih tahu yang juga sebelumnya pernah ada, kira-kira **kedepan** itu apa lagi? Dan daerah mana yang kira-kira sudah mendekati optimal khususnya **didalam** penanganan tupoksi BMKG dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi perubahan alamnya. Khususnya daerah-daerah yang rentan dengan bencana atau gempa, tsunami.

Ini saya minta nanti enggak usah disini Pimpinan, saya kira sudah cukup. Untuk tambahan penjelasan ke kita nanti. Supaya kita ada gambaran. Jangan karena iri barang yang harus kita **inikan**, terus kita harus punya gambaran. Dari sisi terus terang saja, ini hanya dari sisi untuk masalah soal cuaca kan, kalau dari sisi pembangunan sebetulnya enggak ada ini, tapi untuk mencegah terjadinya kerusakan pembangunan dalam konteks perubahan cuaca atau gempa bumi itu saja ini kan. Tetapi harus juga, ada informasi yang *clear* kita, misalnya katakanlah titik-titik supaya mengetahui di Banten itu dibutuhkan

Commented [K214]: DIGABUNG, MENJADI PERORANGA

Commented [K215]: TYPO

Commented [K216]: DIPISAH, SPASI

Commented [K217]: SPASI

Commented [K218]: IDEM

Commented [K219]: IDEM

Commented [K220]: DIPISAH



1.000 titik misalnya baru ada 400 titik harus ada dong penjelasan itu masih kurang sekian titik kira-kira gitu ya. Karena ini sangat khusus ini dan kita harus minta betul ini Pimpinan, jangan kita, khusus BMKG ini. Karena ini sifatnya bukan barang habis pakai ada *limited* waktunya. Beda dengan katakanlah barang-barang habis pakai atau ini ya, mana juga rutinitas dan ini ya. Karena enggak apa-apa itu terus terang saja enggak ada standarisasi dengan departemen lain. Kalau katakanlah misalnya Basarnas helikopter, ada standarisasi Angkatan laut, Angkatan Darat. Bapak enggak ada standarisasinya dengan tempat lain. Jadi hati-hati itu. Kita agak sedikit apa ini, dan kita akan mendukung BMKG. Tetapi kita dukung tetapi juga harus ada standar-satndar yang sangat normatif. Saya kira itu saja tambahan saya untuk BMKG ya.

Commented [K221]: TIDAK BAKU

Commented [K222]: TYPO

**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Tapi prinsip ini cukup ya?

**F-P DEMOKRAT (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM):**

Cukup, cukup.

**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Baik. Mas Bambang?

**F-P GERINDRA (Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO):**

Cukup.

**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Baik. Dengan demikian selesai lah rapat kita pada hari ini jam 5 kurang 10 menit ya. Saya atas nama Pimpinan dan segenap. Ya baik catatan, ya catatan, nanti di rapat berikutnya kita tanya kembali Bang.

Saya atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Komisi V, Pak Sestama dan juga Deputi Operasi Pak ya, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada rapat kali ini. Mohon maaf Pak mana ada-ada hal yang kurang berkenan,

Commented [K223]: TYPO

dan dengan demikian sebelum saya akhiri mungkin salah satu bisa menyampaikan kata-kata penutup Pak. Pak Sestama silakan mewakili teman-teman atau mewakili pemerintah. Silakan Pak.

**SESTAMA BMKG (Ir. DWI BUDI SUTRISNO, M.Sc):**

Baik. Sebelum menutup mungkin ada koreksi ini saja Pak narasi kurang program itu Pak nomor dua. Program pengembangan dan pembinaan MKG.

**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Baik, baik. Nah ini. Baik, saya *sorry* saya memang kurang belum minta persetujuan Bapak tadi . harusnya minta persetujuan Bapak dulu. Ya silakan Pak mana yang perlu diperbaiki? Sudah?

**SESTAMA BMKG (Ir. DWI BUDI SUTRISNO, M.Sc):**

Sudah Pak.

**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Yang lain cukup Pak ya? Kesimpulannya cukup? Ya saya ketok dulu.

**(RAPAT : DISETUJUI)**

Baik, selanjutnya saya minta Bapak menyampaikan kata-kata penutup.

**SESTAMA BMKG (Ir. DWI BUDI SUTRISNO, M.Sc):**

Baik, terima kasih kami dari BMKG, kemudian dari Basarnas dan Bapel BPWS mengucapkan terima kasih atas masukan dan saran dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan DPR RI Komisi V yang kami banggakan. Dan mudah-mudahan masukan ini akan tentunya akan kami sempurnakan dalam penyajian untuk rapat-rapat mendatang. Dan kami mohon dukungan dan juga saran selanjutnya agar apa-apa yang kita alokasikan dan program-program anggarannya itu benar-benar memberikan manfaat buat masyarakat. Dan



mohon maaf bila dalam penyajian ini ada kekurangan, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi.

Terima kasih.

*Wabillahi taufik walhidayah.*

*Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS):**

Terima kasih Pak Sestama mewakili pemerintah. Sekali lagi kami ucapkan juga Pak terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Dan saya nyatakan dengan demikian rapat kita selesai. Saya akhiri.

*Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP)**

Terima kasih.

**DIREKTUR OPERASI BASARNAS (Brigjen TNI (Mar) BUDI PURNOMO, S.I.P, M. Agr):**

**-Rapat Ditutup Pukul 16.25 WIB-**



## **Lampiran**

### **Tahapan Kegiatan 5**

## **PEDOMAN PROOFREADING/PENYUNTINGAN PADA PENGOLAHAN HASIL TRANSKRIP MENJADI RISALAH RAPAT SEMENTARA MENGUNAKAN FITUR *PROOFING*, MICROSOFT WORD.**

### **PENYUNTINGAN PADA RISALAH RAPAT SEMENTARA**

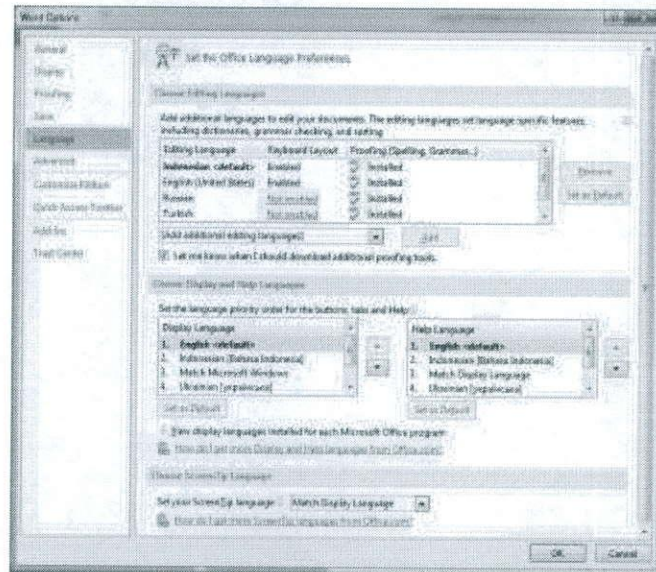
Penyuntingan pada hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara ada beberapa langkah yang harus diperhatikan:

- a. Memastikan format risalah rapat sementara seperti: *cover*, informasi mengenai (tahun sidang, masa persidangan, hari/tanggal, sifat rapat, pimpinan rapat, sekretaris rapat, tempat, acara, anggota yang hadir, anggota yang izin, undangan). Format penulisan nama pembicara, format kertas, format spasi, format kalimat khusus (seperti kalimat pembuka, kalimat salam, dan kalimat seperti rapat dibuka dan rapat ditutup)
- b. Melakukan *playback* rekaman untuk memastikan tidak ada kata yang tertinggal.
- c. Memastikan ejaan sesuai dengan penulisan pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI dan KBBI Online).
- d. Memastikan tanda baca sesuai PUEBI dan pemenggalan kalimat atau paragraf yang tepat.

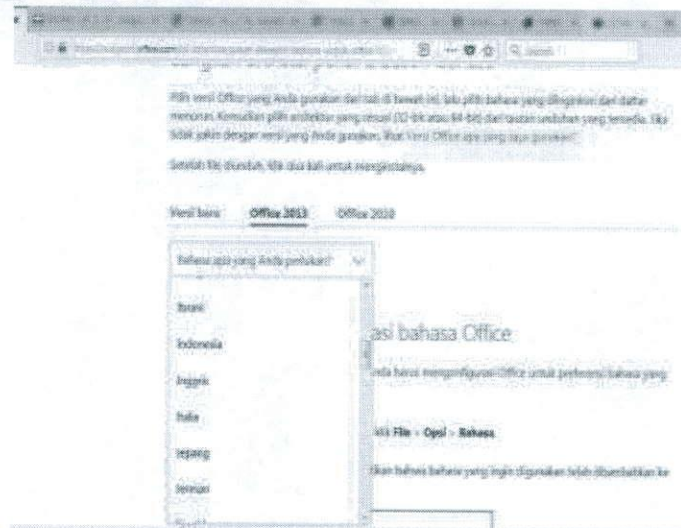
### **INSTALASI PROOFING**

1. Memastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam Microsoft Word menggunakan pengaturan *keyboard* bahasa Indonesia dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Dalam hal ini nanti akan diarahkan pada **region dan language** dalam opsi itu pilih opsi **languages --> bahasa Indonesia--> language bahasa indonesia--> install**
2. Masuk kembali ke **word file-->options--> language--> choose editing language--> add additional editing language--> Indonesian--> add --> keyboard lay out--> enabled--> proofing (spell, grammar) Install.**





3. Kemudian nanti akan masuk ke website <https://support.office.com/id-id/article/paket-aksesori-bahasa-untuk-office-82ee1236-0f9a-45ee-9c72-05b026ee809f?ui=id-ID&rs=id-ID&ad=ID>.



4. Setelah pada *website* akan ditemukan perintah untuk (bahasa apa yang diperlukan. Ketik **Indonesia**. Lalu pilih **32 bit** atau **62 bit** sesuai dengan spesifikasi *windows* atau *office* yang digunakan) **install--> run-->** tunggu beberapa saat sampai instalasi selesai. Sebelum instalasi selesai jangan lupa untuk menyimpan pekerjaan anda

5. Buka kembali **word--> file--> option--> language** jika sudah *enable* dalam bahasa Indonesia
6. Siap digunakan untuk mengecek kata yang salah eja.

## PENGUNAAN FITUR PROOFING

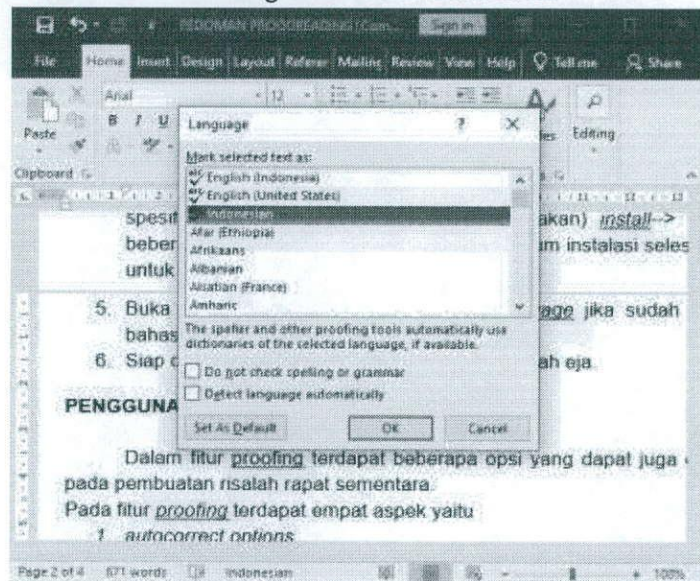
Dalam fitur *proofing* terdapat beberapa opsi yang dapat juga dikembangkan pada pembuatan risalah rapat sementara.

Pada fitur *proofing* terdapat 4 aspek yaitu

1. *autocorrect options*
2. *when correcting spelling in microsoft office programs*
3. *when correcting spelling and grammar in word*
4. *option exceptions for this file*

Jika dalam Bahasa Indonesia tidak bisa digunakan untuk pengecekan tanda baca. Tanda baca hanya digunakan jika menggunakan Bahasa Inggris saja. Bahasa Inggris yang digunakan ketika melakukan pengecekan tanda baca ditandai dengan garis biru.

Satu hal yang penting dalam melakukan *proofing* adalah memastikan Bahasa dalam *proofing* adalah Bahasa Indonesia dapat dicek dengan mengecek opsi **ribbon** bawah dengan memilih Indonesia dengan memastikan bahwa kolom centang tidak ada. Lalu **oke**.



Temuan penting dalam penggunaan fitur proofing:



1. Jika menggunakan fitur *proofing* untuk Bahasa Indonesia hanya bisa digunakan pada kata yang salah eja saja. Kata yang tidak baku. Hal tersebut ditandai dengan garis merah saja.
2. Namun jika menggunakan *proofing* Bahasa Inggris maka akan bisa ditemukan tanda baca yang tidak sesuai.

Sehingga menurut saya, fitur *proofing* dapat dilakukan kombinasi antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam pilihan Bahasa Indonesia maka akan didapat dan diperlihatkan kesalahan eja dalam sebuah dokumen berbahasa Indonesia. Yang kemudian bergaris merah adalah:

- a. Kata yang tidak baku
- b. Kata yang salah ketik
- c. Kata asing
- d. Dan kata yang tergabung dengan kata lain

Sementara jika menggunakan *proofing* Bahasa Inggris, maka akan dimungkinkan untuk melihat kesalahan dalam pemberian tanda baca. Misalnya saja banyak titik dan koma yang *double*. Hal tersebut menjadi penting karena hasil transkrip memiliki potensi kesalahan pada tanda baca. Pada praktiknya transkrip yang dilakukan dengan jangka waktu yang tepat akan berpotensi pada pengabaian ejaan dan tanda baca. Sehingga menjadi penting dalam menyusun risalah rapat sementara untuk memperbaiki kesalahan yang jamak terjadi tersebut.

Berdasarkan praktik dan observasi yang telah dilakukan maka penulis menyarankan untuk menggunakan ***double proofing***. Dengan langkah sebagai berikut.

1. Langkah pertama Perisalah Legislatif Ahli Pertama harus mengecek kesalahan eja dalam penggunaan fitur *proofing* dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
2. Langkah untuk pengecekan tanda baca fitur *proofing* yang berbasis Bahasa Inggris. Sehingga *double proofing* ini akan membantu perisalah pertama dalam menyusun risalah rapat sementara dengan memperhatikan keakuratan ejaan dan keakuratan tanda baca.

## **Lampiran**

### **Tahapan Kegiatan 6**



# MENYUNTING DENGAN PROOFING!

PEDOMAN PENYUNTINGAN  
RISALAH RAPAT SEMENTARA

## APA ITU PROOFING

Fitur proofing terdapat dalam microsoft office (word, excel, ppt). Berfungsi untuk melakukan cek pada ejaan. Misalnya: kata tidak baku, salah ketik (typo), kata asing dan kata kurang sempurna.

### Bagaimana cara memasang proofing?

#### Step 1

1. Buka Ms Word: File-Options-  
Language-Choose Editing  
Language-Add Indonesian-  
Enabled Keyboard Layout-  
Enabled Proofing-Klik.

#### Step 2

Masuk pada Website  
support.office.com: Pilih office-  
Pilih Indonesia-Pilih 32/64 bit-  
download-Run-Ok-Buka kembali  
Ms. Word

### Bagaimana cara menggunakan proofing?



Seperti pada gambar disamping  
carilah opsi tersebut pada  
komputer kerjamu! Pastikan sudah  
dalam proofing sudah ter-install  
bahasa Indonesia!

#### atau

Pastikan teks yang anda  
inginkan sudah terblock. Lalu  
carilah opsi bahasa di bawah  
toolbar! Selamat mencoba



## Proofing dalam Penyuntingan Risalah Rapat Sementara

Ada dua trik dalam penyuntingan  
risalah rapat sementara  
menggunakan fitur Proofing!

#### Trik 1

Gunakan Proofing berbahasa  
Indonesia untuk salah eja.

#### Trik 2

Gunakan Proofing berbahasa  
Inggris untuk mendeteksi  
ketidaktepatan tanda baca

## TESTIMONI TENTANG PROOFING



Hana Karinna (Perisalah Legislatif Ahli  
Muda)

"Mempermudah mencari kata/mendeteksi  
yang salah dan lebih mudah memperbaiki  
karena terdapat referensi kata"

Proofing dapat mempermudah dan  
membantu dalam mengoreksi jika dalam  
transkrip tersebut ada kesalahan ejaan  
dan KBBI. Dan pastinya penyusunan  
risalah rapat sementara akan lebih cepat  
disusun dan diserahkan kepada  
penyelenggara rapat dan PL Muda



"Hatriatul Mabruki, CPNS Perisalah  
Legislatif Pertama"



# MENYUNTING DENGAN PROOFING!

PEDOMAN PENYUNTINGAN  
RISALAH RAPAT SEMENTARA

## APA ITU PROOFING

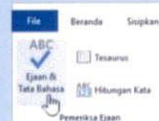
Fitur proofing terdapat dalam microsoft office (word, excel, ppt). Berfungsi untuk melakukan cek pada ejaan. Misalnya: kata tidak baku, salah ketik (typo), kata asing dan kata kurang sempurna.

### Bagaimana cara memasang proofing?

#### Step 1

1. Buka Ms Word: **File-Options-Language-Choose Editing Language-Add Indonesian-Enabled Keyboard Layout-Enabled Proofing-Klik.**

### Bagaimana cara menggunakan proofing?



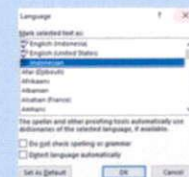
Seperti pada gambar disamping carilah opsi tersebut pada komputer kerjamu! Pastikan sudah dalam proofing sudah ter-install bahasa Indonesia!

#### Step 2

Masuk pada Website [support.office.com](http://support.office.com): **Pilih office-Pilih Indonesia-Pilih 32/64 bit-download-Run-Ok-Buka kembali Ms. Word**

#### atau

Pastikan teks yang anda inginkan sudah terblock, lalu carilah opsi bahasa di bawah toolbar! Selamat mencoba



## Proofing dalam Penyuntingan Risalah Rapat Sementara

Ada dua trik dalam penyuntingan risalah rapat sementara menggunakan fitur Proofing!

#### Triks 1

Gunakan Proofing berbahasa Indonesia untuk salah eja.

#### Triks 2

Gunakan Proofing berbahasa Inggris untuk mendeteksi ketidaktepatan tanda baca

## TESTIMONI TENTANG PROOFING



**Huna Karinna (Perisalah Legislatif Ahli Muda)**

"Mempermudah mencari kata/mendeteksi yang salah dan lebih mudah memperbaiki karena terdapat referensi kata"

Proofing dapat mempermudah dan membantu dalam mengoreksi jika dalam transkrip tersebut ada kesalahan ejaan dalam KBBI. Dan pastinya penyusunan risalah rapat sementara akan lebih cepat disusun dan diserahkan kepada penyelenggara rapat dan PL Muda



**"Hijriatul Mabruk, CPNS Perisalah Legislatif Pertama"**